



**UNIVERSITAS INDONESIA**

**KONFLIK GEORGIA DAN RUSIA DI OSSETIA SELATAN  
PADA BULAN AGUSTUS 2008**

**TESIS**

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh  
gelar Master Sains (M.Si) pada Program Studi Kajian Wilayah Eropa**

**ALI WIBOWO LAKSONO  
0706309026**

**UNIVERSITAS INDONESIA  
PROGRAM PASCASARJANA  
PROGRAM STUDI KAJIAN WILAYAH EROPA  
JAKARTA  
JANUARI 2012**

**HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS**

**Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri,  
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk  
telah saya nyatakan dengan benar**

Nama : Ali Wibowo Laksono  
NPM : 0706309026  
Tanda tangan :



Tanggal : 9 Januari 2012

**HALAMAN PENGESAHAN**

Tesis ini diajukan oleh:

Nama : Ali Wibowo Laksono

NPM : 0706309026

Program Studi : Kajian Wilayah Eropa

Judul Tesis : Konflik Georgia dan Rusia di Ossetia Selatan pada bulan Agustus 2008

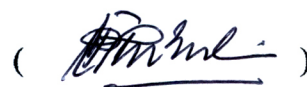
**Telah berhasil dipertahankan di depan dewan penguji dan diterima sebagai persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Sains pada Program Studi Kajian Wilayah Eropa, Universitas Indonesia.**

**DEWAN PENGUJI**


Ketua Sidang : Dr. Polit. Sc. Henny Saptatia D. N



Pembimbing : Dr. C. P. F. Luhulima



Penguji Ahli : Dr. Zeffry Alkatiri



Penguji : Dr. Evi Fitriani



Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : 9 Januari 2012

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

---

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ali Wibowo Laksono  
NPM : 0706309026  
Program Studi : Kajian Wilayah Eropa  
Fakultas : Program Pascasarjana  
Jenis Karya : Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul:

**Konflik Georgia dan Rusia di Ossetia Selatan pada bulan Agustus 2008**

berserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini, Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta  
Pada tanggal : 9 Januari 2012  
Yang Menyatakan



(Ali Wibowo Laksono)

## ABSTRAKSI

Nama : Ali Wibowo Laksono  
Program Studi : Kajian Wilayah Eropa  
Judul : Konflik Georgia dan Rusia di Ossetia Selatan pada bulan Agustus 2008

Tesis ini membahas tentang perang Georgia dengan Rusia yang terjadi pada bulan Agustus 2008. Georgia melakukan penyerangan ke wilayah Ossetia Selatan yang mayoritas penduduknya memegang paspor Rusia. Serangan ke wilayah tersebut juga tertuju pada pasukan perdamaian Rusia yang saat itu sedang menjaga wilayah tersebut. Hal itu membuat Rusia melakukan serangan balasan ke Georgia sehingga terjadi konflik diantara kedua negara. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan alasan dan tujuan tindakan penyerangan yang dilakukan Georgia sehingga memprovokasi Rusia untuk menyerang wilayah Ossetia Selatan. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan ilmu sejarah dan menggunakan metodologi penulisan historis deskriptif. Penelitian ini berorientasi pada konsep kepentingan nasional Georgia dan Rusia serta konsep *responsibility to protect*. Sumber penulisan tesis diperoleh melalui data primer, yaitu media massa *online*, pernyataan Pemerintah Georgia dan Rusia yang didapat melalui konferensi press dan wawancara mengenai konflik yang terjadi di bulan Agustus 2008, dokumen resmi Pemerintah kedua negara mengenai kebijakan politik luar negerinya. Data sekunder yang digunakan berasal dari jurnal dan penelitian yang sudah dilakukana sebelumnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aksi yang dilakukan Georgia ini merupakan suatu cara untuk mendapatkan perhatian masyarakat internasional dan mencari dukungan dalam keanggotannya pada NATO sedangkan Rusia menentang keanggotaan Georgia ataupun negara *near abroad* pada NATO karena dapat mengancam keamanan nasionalnya.

Kata kunci: Rusia, Georgia, Ossetia Selatan, NATO, kepentingan nasional

## ABSTRACT

Name : Ali Wibowo Laksono  
Study Program: European Studies  
Title : Georgia and Russia Conflict in South Ossetia in August 2008

This thesis is about the Georgia-Russia war in August 2008. Georgia started the war by shelling villages in South Ossetia, where Russia have placed its peace keeping force in the region and most Ossetians also hold Russian passports. This provoking act by Georgia made Russia advances into South Ossetia and involved in an armed conflict with Georgia. This thesis is aimed to explain the reason and the intention of Georgia shelling South Ossetia which provoked Russia to attack into South Ossetia using the concept of national interest of both countries and Russian responsibility to protect its citizen. Resources for this thesis is obtained from mass media online, government statements of both countries, and the foreign policy and national interest of both countries as a primary source. As for the secondary source this thesis uses information from journal articles and previous research related to the topic. According to the national interest of Georgia, this provoking is intended to gain international attention and also to gain support for its membership in NATO. Georgia of course gained international attention but its goal to speed up its membership in NATO proofed to be failed. Russia will always against the intention of Georgia or any other countries along the Russian borderline to become NATO member.

Keyword: Russia, Georgia, South Ossetia, NATO, national interest

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Penulisan tesis dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Master Sains Program Studi Kajian Wilayah Eropa. Penulisan tesis ini juga tidak lepas dari bantuan segenap pihak yang telah membimbing, member petunjuk serta memberikan dorongan semangat sejak masa perkuliahan hingga penyelesaian tesis ini. Untuk itu, penulis mengucapkan terima kasih setulus-tulusnya kepada:

1. Dr. C. P. F. Luhulima, selaku pembimbing yang telah berkenan untuk meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan tesis ini;
2. Dr. Polit. Sc. Henny Saptatia D. N, selaku Ketua Program Studi Kajian Wilayah Eropa yang telah berkenan meluangkan waktu untuk memberikan dorongan dan bantuan dalam penyusunan tesis ini;
3. Para dosen yang telah ilmunya kepada penulis selama menjalankan studi di Program Studi Kajian Wilayah Eropa;
4. Seluruh staf sekretariat Program Studi Kajian Wilayah Eropa yang telah memberikan bantuan dan informasi selama perkuliahan dan penyusunan tesis;
5. Seluruh keluarga saya yang telah memberikan segala dukungan dan semangat dalam penyusunan tesis ini;
6. Kepada seluruh teman-teman Prodi KWE yang namanya tidak dapat disebutkan satu per satu, yang telah bersama-sama mengikuti perkuliahan, memberikan masukan dan dukungan selama penyusunan tesis;

Penulis sadar bahwa tesis ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karenanya, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan. Akhir kata, semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi pengembangna ilmu pengetahuan.

Jakarta, 9 Januari 2012

Penulis

## DAFTAR ISI

<b>LEMBAR JUDUL</b> .....	i
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	ii
<b>HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS</b> .....	iii
<b>HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI</b> .....	iv
<b>ABSTRAKSI</b> .....	v
<b>ABSTRACT</b> .....	vi
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	vii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	viii
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	x
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Permasalahan .....	7
1.3 Pertanyaan Penelitian .....	7
1.4 Tujuan Penelitian .....	7
1.5 Metodologi Penelitian .....	7
1.6 Sumber Data .....	8
1.7 Kerangka Konseptual.....	12
1.8 Sistematika Penulisan .....	15
<b>BAB II SEJARAH HUBUNGAN GEORGIA - OSSETIA SELATAN - RUSIA</b> .....	16
2.1 Georgia Pada Masa Uni Soviet .....	18
2.2 Sejarah Konflik Georgia dengan Ossetia Selatan.....	23
2.3 Georgia dan Ossetia Selatan Pasca Uni Soviet.....	28
2.4 Revolusi Mawar .....	31
<b>BAB III ANALISIS KONFLIK GEORGIA DENGAN RUSIA</b> .....	49
3.1 Kebijakan Luar Negeri Georgia .....	49
3.2 Kebijakan Luar Negeri Rusia .....	53
3.3 Perluasan NATO ke Timur .....	55



3.4	Konflik Rusia-Georgia di Ossetia Selatan pada bulan Agustus 2008 .....	61
<b>BAB IV KESIMPULAN .....</b>		<b>81</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>		<b>84</b>



**DAFTAR GAMBAR**

<b>Gambar 1. Invasi Soviet ke Georgia .....</b>	<b>19</b>
<b>Gambar 2. Penyebaran Etnis di Kaukasus .....</b>	<b>24</b>
<b>Gambar 3. Peta Georgia .....</b>	<b>65</b>



**DAFTAR TABEL**

<b>Tabel 1. Kronologi konflik Russia – Georgia terhadap masalah di Ossetia Selatan (1992- 2009) .....</b>	<b>35</b>
<b>Tabel 2. Kronologis Terjadinya Konflik Rusia-Georgia Bulan Agustus 2008 .....</b>	<b>75</b>



# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Setelah Uni Soviet runtuh, Georgia mendeklarasikan kemerdekaannya pada tanggal 9 April 1991, dengan ibukota Tblisi. Secara geografis, Georgia berada di wilayah Kaukasus dan berbatasan langsung dengan Rusia di sebelah Utara dan di sebelah Selatan berbatasan langsung dengan Turki, Armenia, dan Azerbaijan. Wilayah Georgia yang terdiri dari 12 provinsi, termasuk di dalamnya dua wilayah yang ingin memisahkan diri, Abkhazia dan Ossetia Selatan. Georgia adalah negara yang menggunakan sistem pemerintahan Semi-Presidensial Republik yang dipimpin oleh seorang Presiden dan Perdana Menteri. Mayoritasnya penduduk Georgia adalah etnis Georgia (84%) yang menggunakan bahasa Georgia sebagai bahasa resmi dengan total penduduk 4.5 juta jiwa dan wilayah yang kecil yakni 69.700 km<sup>2</sup>. Dari pecahan negara Uni Soviet lainnya, wilayah Georgia adalah salah satu yang paling kecil, sedangkan wilayah yang terbesar adalah Rusia.<sup>1</sup>

Rusia adalah negara dengan wilayah terbesar pecahan Uni Soviet, dengan total wilayah lebih dari 17 juta km<sup>2</sup> dan berpenduduk 143 juta jiwa. Sebagai negara terbesar dan berbatasan langsung dengan Georgia, Rusia merupakan mitra dagang utama Georgia. Sebagai eksportir utama anggur di wilayah Kaukasus, Rusia merupakan tujuan ekspor utama Georgia. Sementara itu, Rusia juga sebagai sumber impor utama Georgia, antara lain minyak, gas, peralatan mesin, dan alat transportasi.<sup>2</sup> Pasca runtuhnya Uni Soviet, hubungan Rusia dan Georgia berjalan dengan baik, baik secara ekonomi maupun politik. Pada tahun 2006, hubungan kedua negara mulai memburuk akibat terjadinya serangkaian konflik yang terjadi di perbatasan kedua negara.

Memburuknya hubungan kedua negara tersebut ditandai dengan aksi saling tuduh terhadap peristiwa ledakan pipa gas di wilayah perbatasan Rusia yang terjadi pada bulan Januari 2006. Pada saat itu Georgia menuduh bahwa

---

<sup>1</sup> Georgia, <https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/gg.html>

<sup>2</sup> *Ibid.*

Rusia telah melakukan sabotase, karena hal tersebut mengganggu aliran listrik dari Rusia ke Georgia. Selanjutnya pada bulan Maret 2006 Rusia melakukan penghentian impor anggur dan air mineral dari Georgia karena kualitasnya pada saat itu tidak memenuhi standar kesehatan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Rusia.<sup>3</sup> Hubungan Rusia dan Georgia terus memburuk hingga pada puncaknya terjadi perang pada bulan Agustus 2008. Pada saat itu Georgia memprovokasi<sup>4</sup> Rusia untuk menyerang wilayah Ossetia Selatan, dengan cara menyerang pasukan penjaga perdamaian Rusia dan kelompok separatis yang berada di wilayah Ossetia Selatan.

Sejak masa pemerintahan Eduard Shevardnadze (1993), Pemerintah Georgia terus melakukan perundingan dengan tiga (Ossetia Selatan, Ajaria, dan Abkhazia) wilayah yang ingin memisahkan diri dari Georgia, namun tidak mengalami kemajuan dan tidak terjadi perubahan. Wilayah Ossetia Selatan berada di sebelah utara Georgia dan berbatasan langsung dengan Ossetia Utara yang berada di wilayah Rusia. Secara *de facto*, sejak tahun 1991 Ossetia Selatan merupakan sebuah Republik sendiri yang terlepas dari Georgia, namun secara *de jure* masih merupakan bagian dari negara Georgia Kedua wilayah tersebut secara sepihak mendeklarasikan kemerdekaannya.<sup>5</sup>

Setelah terjadi pergantian Presiden tahun 2004, Saakashvili mulai melakukan perundingan dengan seluruh wilayah yang ingin memisahkan diri di Georgia. Saakashvili yang berhasil mengintegrasikan wilayah Ajaria ke dalam wilayah Georgia pada tahun 2004, mencoba untuk melakukan hal yang sama pada dua wilayah lain yang ingin memisahkan diri, Abkhazia dan Ossetia Selatan. Hal tersebut juga merupakan salah satu prioritas utama pemerintah Georgia di bawah kepemimpinan Presiden Saakashvili, selain melakukan reformasi demokrasi, perbaikan perekonomian.

Wilayah Ossetia Selatan dan Abkhazia merupakan wilayah yang rawan terjadinya konflik antara kelompok separatis dan Pemerintah Georgia. Rusia

<sup>3</sup> Timeline: Georgia, , [http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/country\\_profiles/1102575.stm](http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/country_profiles/1102575.stm)

<sup>4</sup> Provokasi adalah perbuatan atau tindakan untuk membangkitkan kemarahan; tindakan menghasut untuk melakukan tindakan negatif; penghasutan; pancingan. (Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia ed. 3, Jakarta: Balai Pustaka, 2005. Hal. 900)

<sup>5</sup> M. Sajjadur Rahman, *Georgia and Russia: What Caused the August War*, dalam "Identity, Culture and Politics: An Afro-Asian Dialogue." July 2009

sebagai negara yang berbatasan langsung dengan Georgia dan kedua wilayah tersebut tidak menginginkan adanya konflik di wilayah perbatasannya. Oleh sebab itu, pada tahun 1993 Rusia membantu penyelesaian masalah di Georgia dengan menjadi mediator antara Georgia dan kedua wilayah tersebut. Pada saat itu Abkhazia dan Georgia berhasil mencapai perjanjian damai serta bersepakat untuk menempatkan pasukan perdamaian Rusia dan Georgia di kedua wilayah tersebut untuk menghindari konflik di masa mendatang.

Mikhail Saakashvili yang terpilih sebagai Presiden untuk ke dua kali pada tahun 2008 berjanji akan menjaga integritas bangsanya dengan mengambil alih wilayah-wilayah yang ingin memisahkan diri. Sejak tahun 1991, konflik memang sudah terjadi di Ossetia Selatan dan Abkhazia yang menginginkan kemerdekaan dari Georgia. Di Ossetia Selatan sendiri sudah beberapa kali terjadi perang dan konflik senjata dengan pemerintah Georgia, mulai dari perang Ossetia Selatan tahun 1991-1992, tahun 2004, 2006 hingga saat ini. Sedangkan di Abkhazia, konflik sudah mulai terjadi pada tahun 1992, 1998, 2001, 2006, dan 2008, dengan tuntutan ingin memerdekakan diri. Pada tanggal 17 November 2006, Ossetia Selatan, Abkhazia, dan Transnistria (di wilayah Moldova) memerdekakan diri dan saling memberikan pengakuan di antara mereka, walaupun tanpa pengakuan resmi dari negara manapun.<sup>6</sup>

Pada bulan Juli 2008, konflik terjadi antara kelompok separatis dan tentara Georgia. Pada tanggal 7 Agustus Georgia mulai melakukan penyerangan besar-besaran ke Ossetia Selatan dan Abkhazia untuk merebut dan mengambil alih wilayah itu dari kelompok separatis. Rusia yang telah menempatkan pasukan perdamaian di Ossetia Selatan, mengirimkan tambahan pasukan untuk menyerang Georgia. Etnis Georgia di wilayah Ossetia Selatan adalah minoritas, sedangkan penduduk asli Ossetia Selatan ingin bergabung dengan Ossetia Utara yang saat ini berada di wilayah Rusia. Tentara Rusia masuk ke wilayah Ossetia Selatan melalui terowongan Roki yang menghubungkan Ossetia Utara dan Selatan. Rusia bersikeras memukul balik tentara Georgia keluar dari wilayah Ossetia Selatan dan Abkhazia dengan

---

<sup>6</sup> "Georgia-South Ossetia: Conflict chronology", <http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/georgia/2522729/Georgia--South-Ossetia-conflict-chronology.html>

alasan melindungi warganya. Memang sebelum terjadi konflik, Moscow telah menawarkan 70.000 penduduk di Ossetia Selatan untuk menjadi warga negara Rusia, dan mayoritas dari mereka pun menyetujuinya, sehingga sebagian besar memiliki paspor Rusia.

Beberapa negara menganggap Georgia adalah negara kecil dan tidak memiliki pengaruh yang cukup besar dalam dunia internasional tetapi bila dilihat lebih dalam lagi, Georgia dinilai sangat penting, khususnya bagi NATO. Georgia merupakan alternatif pemasok energi bagi Uni Eropa, sehingga tidak selalu bergantung dari Rusia. Banyak pihak yang beranggapan bahwa Rusia ingin menguasai Georgia karena alasan minyak. Hal ini dikarenakan Georgia dilalui pipa minyak dan gas dari Laut Kaspia menuju Turki, atau biasa disebut pipa BTC (Baku-Tbilisi-Ceyhan). Pemerintah Rusia membantah anggapan bahwa mereka ingin menguasai jalur minyak pipa BTC dengan memberikan alasan bahwa keberadaan serta perlawanannya yang dilakukan di Georgia semata-mata hanya untuk menjamin keamanan warga negaranya yang berada di kedua wilayah konflik tersebut.<sup>7</sup>

Abkhazia dan Ossetia Selatan mendapatkan pengakuan kemerdekaan dari Rusia pada tanggal 26 Agustus 2008, tetapi kemudian mendapat kecaman dari berbagai negara, antara lain Amerika Serikat dan Uni Eropa. Amerika menganggap Rusia telah mengubah garis batas wilayah suatu negara dengan paksa. Selain Rusia, Nicaragua juga mengakui kemerdekaan Abkhazia dan Ossetia Selatan. Perang yang terjadi di Ossetia Selatan pada bulan Agustus 2008 diperkirakan telah memakan korban sebanyak 1500 penduduk sipil. Rusia kehilangan 36 pasukan dan 300 luka-luka, sedangkan Georgia kehilangan 160 tentara dan 300 lainnya hilang.

Perancis yang pada saat itu memimpin Uni Eropa, menyatakan bahwa untuk pertama kalinya Uni Eropa memiliki satu suara terhadap konflik antara Rusia dan Georgia. Melalui Presiden Prancis, Nicolas Sarkozy, Uni Eropa mengecam intervensi Rusia ke Ossetia Selatan, Georgia. Uni Eropa bahkan mengancam akan menghambat seluruh perdagangan Rusia dengan Uni Eropa dan tidak akan melakukan perundingan selama tentara Rusia masih berada di

---

<sup>7</sup> International Crisis Group, *Russia vs Georgia: The Fallout (Europe Report No. 195)*, Tbilisi/Brussels: ICG, 22 Agustus 2008, Hal. 12

wilayah Georgia. Rusia pun membalas ancaman itu dengan mengatakan bahwa Rusia akan menarik pasukannya keluar dari Georgia, tetapi Georgia pun harus menarik pasukannya keluar dari wilayah konflik.

Walaupun Uni Eropa telah memberikan ancaman terhadap Rusia, namun hal tersebut tidak terlalu diharaukan oleh Rusia sehingga menyebabkan Uni Eropa merasa harus lebih bersikap hati-hati terhadap Rusia. Dari beberapa ancaman yang diberikan terhadap Rusia, antara lain dikeluarkannya Rusia dari anggota G-8, diasingkan dari WTO, dan boikot Olimpiade Rusia 2014, tidak satupun yang benar-benar dilaksanakan. Uni Eropa hanya membekukan perjanjian PCA (*Partnership and Cooperation Agreement*) dengan Rusia sebagai sanksi atas serangan ke Georgia. Hal tersebut disebabkan karena Rusia saat ini telah melakukan kerjasama dengan Turkmenistan dan Uzbekistan mengenai pipa gas yang akan melalui wilayah Rusia. Dengan begitu, Rusia dapat mengendalikan pasokan gas dari kedua negara tersebut menuju Barat. Uni Eropa merupakan pasar terbesar bagi Rusia, tetapi ketergantungan beberapa negara di Uni Eropa membuat Rusia memiliki posisi yang menguntungkan dalam melakukan negosiasi. Lebih dari lima negara di Uni Eropa memiliki ketergantungan gas dari Rusia lebih dari 60%. Sebaliknya, ketergantungan Rusia terhadap negara-negara tersebut sangat kecil dan tidak berarti.<sup>8</sup>

Setelah pasukan Georgia dapat berhasil didesak keluar dari daerah konflik, pasukan Rusia juga kemudian berangsur-angsur menarik pasukannya atas desakan dari negara-negara Barat. Amerika Serikat mulai mengirimkan bantuan kemanusiaan dengan mengirim 3 buah kapal perang dan memberikan bantuan dana sebesar \$ 1 milyar, sedangkan Uni Eropa memberikan bantuan dana sebesar \$750 juta. Amerika dan Uni Eropa bahkan tidak akan memberikan visa kepada petinggi perusahaan yang berbasis di Ossetia Selatan dan Abkhazia. Pada tanggal 18 Agustus 2008 Georgia resmi keluar dari anggota *Commonwealth of Independent States* (CIS), karena dianggap kurang memberikan manfaat.<sup>9</sup> Georgia sepertinya cenderung lebih memilih untuk bergabung dengan NATO dengan asumsi jika di masa mendatang

---

<sup>8</sup> "Cold Comfort", *The Economist*, September 6<sup>th</sup> – 12<sup>th</sup> 2008

<sup>9</sup> "Donors pledge \$4.5bn to Georgia" <http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/7683413.stm>



mendapatkan serangan dari luar maka akan dibantu oleh NATO. Jika Georgia ingin bergabung dengan NATO, tentu akan ditentang keras oleh Rusia.

Presiden Rusia Dmitry Medvedev dalam pidatonya mengatakan beberapa hal mengenai politik luar negeri yang dijalankan oleh Rusia. Yang pertama adalah Rusia menjalankan politik luar negerinya sesuai dengan hukum internasional yang saat ini sudah berlaku dalam menjalin hubungan antar negara. Kedua adalah dunia ini harus multi polar. Rusia tidak menginginkan dunia ini diatur oleh sebuah negara yang besar seperti Amerika Serikat. Ketiga, Rusia tidak menginginkan terjadinya konfrontasi dengan negara manapun dan Rusia bermaksud ingin menjalin hubungan baik dengan setiap negara. Keempat, prioritas utama Rusia adalah melindungi warganya dimanapun mereka berada dan melindungi kepentingannya diluar negeri. Rusia juga mengancam akan memberikan respon yang keras terhadap siapapun yang mengancam warganya. Terakhir adalah, sebagaimana negara-negara lain, Rusia memiliki kepentingan di dalam suatu wilayah tertentu, dimana di wilayah tersebut terdapat negara-negara yang sudah menjalin hubungan baik serta Negara yang memiliki hubungan khusus secara historis, khususnya negara anggota CIS.<sup>10</sup>

Dilihat dari pernyataan tersebut, Rusia ingin menjadi polar untuk menyaingi Amerika Serikat dan tidak lagi ingin diatur. Rusia yang kini sudah bangkit akan menjadi kekuatan baru di dalam dunia internasional. Selain Amerika, Rusia memiliki kekuatan nuklir utama dunia. Sejak tahun lalu, Rusia sudah mulai menjalankan pesawat-pesawat *bomber* untuk berpatroli di seluruh wilayah Rusia, terutama di daerah perbatasan dan tahun ini Rusia juga telah menempatkan misil di Kaliningrad untuk pertahanan atas misil Amerika yang di tempatkan di Polandia dan Ceko. Ini menunjukkan bahwa Rusia tidak main-main jika mendapat intervensi dari luar serta untuk memperlihatkan kekuatannya.

---

<sup>10</sup> Paul Reynolds, "New Russian world order: the five principle", <http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/7591610.stm>

## 1.2 Permasalahan

Permasalahan dalam penelitian ini adalah mengapa Georgia memprovokasi Rusia dengan menyerang wilayah Ossetia Selatan dan Abkhazia pada bulan Agustus 2008.

## 1.3 Pertanyaan Penelitian

Pertanyaan pada penelitian ini adalah apa tujuan dan pertimbangan Georgia memprovokasi Rusia untuk menyerang ke wilayah Abkhazia dan Ossetia Selatan pada bulan Agustus 2008.

## 1.4 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa alasan dan tujuan Georgia berani memprovokasi Rusia untuk menyerang ke wilayah Abkhazia dan Ossetia Selatan pada bulan Agustus 2008.

## 1.5 Metodologi Penelitian

Penelitian ini akan menggunakan pendekatan ilmu sejarah dengan menggunakan metodologi penulisan historis deskriptif. Ilmu sejarah adalah ilmu yang menggambarkan atau mengkaji peristiwa di masa lalu dengan pandangan bahwa kejadian atau peristiwa masa lalu merupakan akar peristiwa masa kini. Begitu pula sebaliknya, tidak ada peristiwa masa kini yang tidak berhubungan dengan peristiwa di masa lalu.<sup>11</sup> Pada penelitian ini, peristiwa yang terjadi pada bulan Agustus 2008 di Ossetia Selatan memiliki akar peristiwa yang terjadi di masa lalu. Kejadian atau peristiwa di masa lalu tersebut memiliki hubungan sehingga terjadinya peristiwa yang akan diteliti, yakni perang antara Rusia dan Georgia di Ossetia Selatan. Sedangkan metode penulisan historis deskriptif adalah bagaimana kita menggali informasi tentang suatu peristiwa berdasarkan cara kerja ilmu sejarah dan bagaimana memaknainya.<sup>12</sup>

Menurut Luis Gottschalk, penulisan sejarah adalah sebuah proses menguji dan menganalisa secara kritis rekaman dan peninggalan masa lampau

---

<sup>11</sup> Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah*, Yogyakarta: PT. Bentang Pusaka, 1995, Hal. 5

<sup>12</sup> *Ibid.* Hal. 400

manusia. Rekonstruksi yang imajinatif dari masa lampau itu berdasarkan data yang diperoleh (melalui kritik sumber), atau disebut historiografi.<sup>13</sup>

Pengumpulan data dilakukan dalam penelitian ini akan melalui empat tahapan, antara lain pengumpulan data (heuristik), kritik, interpretasi dan historiografi.<sup>14</sup> Pada tahap pengumpulan data digunakan data-data sekunder yang didapat melalui literatur yang berasal dari buku yang berkaitan dengan konflik di wilayah Ossetia Selatan serta sejarah kronologis awal hingga terjadinya perang pada bulan Agustus 2008. Selain itu juga digunakan data yang berasal dari ensiklopedia, artikel, surat kabar dari berbagai negara, jurnal ilmiah, siaran pers oleh Presiden Medvedev dan Menlu Rusia, serta penelitian yang terdahulu.

Tahap kritik adalah tahap pengujian atau seleksi data. Data yang diambil merupakan data yang memiliki kredibilitas, validitas, serta tingkat relevansi dengan topik yang diteliti. Tahap selanjutnya adalah tahap interpretasi, dimana data-data tersebut kemudian diinterpretasikan untuk memaknai fakta. Terakhir adalah tahap penyusunan, dimana data-data tersebut disusun menjadi sebuah peristiwa yang setidaknya mendekati utuh.

## 1.6 Sumber Data

Data yang akan digunakan pada penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer didapat melalui media massa online mengenai berita terjadinya konflik, antara lain:

1. CNN
  - a. "Russia-Georgia tensions still high one year on from conflict", <http://www.cnn.com/2009/WORLD/europe/08/07/goergia.background/index.html?iref=allsearch>
  - b. "Russia vetoes U.N. mission in Georgia", <http://www.cnn.com/2009/WORLD/europe/06/15/un.georgia/index.html?iref=allsearch>

<sup>13</sup> Luis Gottschalk, *Mengerti Sejarah*. Terj. Nugroho Notosusanto, Jakarta: UI-Press, 1975, Hal. 12

<sup>14</sup> Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah*, Hal. 90

- c. “Death toll from North Ossetia suicide bomb rises to 12”,  
<http://www.cnn.com/2008/WORLD/europe/11/07/north.ossetia.suicide.bomb/index.html?iref=allsearchwww.bbc.com>
2. BBC
- a. “Timeline: Georgia”,  
[http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/country\\_profiles/1102575.stm](http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/country_profiles/1102575.stm)
- b. “Day-by-day: Georgia-Russia crisis”,  
<http://news.bbc.co.uk/2/hi/7551576.stm>
- c. “Donors pledge \$4.5bn to Georgia”,  
<http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/7683413.stm>
- d. “Russia blamed for 'gas sabotage’”,  
<http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/4637034.stm>
- e. Reynolds, Paul. “*New Russian world order: the five principle*”,  
<http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/7591610.stm>
- f. McGuinness, Damien. *Georgia: Anti-Saakashvili protesters vow to continue*, <http://www.bbc.co.uk/news/world-europe-13499227>
3. Telegraph
- a. “Georgia-South Ossetia: conflict chronology“,  
<http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/georgia/2522729/Georgia--South-Ossetia-conflict-chronology.html>
4. Der Spiegel
- a. The West Begins to Doubt Georgian Leader”,  
<http://www.spiegel.de/international/world/0,1518,578273-2,00.html>
5. The Economist
- a. *Cold Comfort*. Edisi 7-13 September 2008
- b. *Russia Resurgent*. 14-20 September 2008
6. Guardian
- a. “Georgia declares 'state of war' over South Ossetia”,  
<http://www.guardian.co.uk/world/2008/aug/09/georgia.russia2>
- b. “Thousands gather for street protests against Georgian president.”

<http://www.guardian.co.uk/world/2009/apr/09/georgia-protests-mikheil-saakashvili>

- c. Traynor, Ian. *Georgian president Mikheil Saakashvili blamed for starting Russian war*,  
<http://www.guardian.co.uk/world/2009/sep/30/georgia-attacks-unjustifiable-eu>

Data lain yang digunakan adalah pernyataan Pemerintah Georgiadan Rusia yang didapat melalui konferensi press atau wawancara yang berkaitan dengan terjadinya konflik antara Rusia dan Georgia pada bulan Agustus 2008, serta dokumen resmi Pemerintah Georgia dan Rusia mengenai kebijakan politik luar negerinya, yaitu:

1. Kremlin, Совместная пресс-конференция по итогам переговоров с Федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель, <http://news.kremlin.ru/transcripts/1102>
2. Kremlin, Интервью телекомпании «Раша тудей», <http://news.kremlin.ru/transcripts/1226>
3. Medvedev, Dmitry. *Meeting with Servicemen who Distinguished Themselves in Battle in the Georgian-South Ossetian Conflict Zone*, [http://eng.kremlin.ru/text/speeches/2008/08/18/2230\\_type82917type84779\\_205494.shtml](http://eng.kremlin.ru/text/speeches/2008/08/18/2230_type82917type84779_205494.shtml)
4. Medvedev, Dmitry. Интервью телекомпании Би-Би-Си, <http://news.kremlin.ru/transcripts/1228>
5. Medvedev, Dmitry. Пресс-конференция по итогам встречи с Президентом Франции Николя Саркози, <http://news.kremlin.ru/transcripts/1330>
6. Transkripsi wawancara PM Rusia, Vladimir Putin, dengan CNN, Sochi, 22 Agustus 2008
7. Transkripsi wawancara Presiden Rusia, Dmitri Medvedev dengan BBC Television, Sochi, August 26, 2008
8. Transkripsi wawancara Presiden Rusia, Dmitri Medvedev with TF1 Television, Sochi, August 26, 2008

9. “Ministry of Foreign Affairs of Georgia”  
[http://embassy.mfa.gov.ge/index.php?lang\\_id=ENG&sec\\_id=10](http://embassy.mfa.gov.ge/index.php?lang_id=ENG&sec_id=10)
10. “National Security Concept of Georgia”,  
[http://embassy.mfa.gov.ge/files/Documents/National\\_Security\\_Concept\\_-\\_E.doc](http://embassy.mfa.gov.ge/files/Documents/National_Security_Concept_-_E.doc)
11. “Foreign Policy Strategy”, [http://embassy.mfa.gov.ge/files/Documents/strategy2006\\_2009.pdf](http://embassy.mfa.gov.ge/files/Documents/strategy2006_2009.pdf)

Selain itu juga digunakan laporan yang dilakukan oleh *International Crisis Group* mengenai keadaan dan perkembangan di Ossetia Selatan sebelum dan sesudah konflik pada bulan Agustus 2008, yaitu:

1. *Georgia: Avoiding War in South Ossetia* (Europe Report No 159). Tbilisi/Brussels: ICG 26 November 2004
2. *Georgia: Sliding toward Authoritarianism?* (Europe Report No. 189). Tbilisi/Brussels: ICG. 19 Desember 2007
3. *Learn To Live like Neighbours* (Europe Briefing No. 65), Tbilisi/Brussels/Istanbul/Moscow, 8 August 2011.
4. *Georgia: Sliding Towards Authoritarianism* (Europe Report No 189). Tbilisi/Brussels: ICG 19 December 2007
5. *Russia vs Georgia: The Fall Out* (Europe Report No 195). Tbilisi/Brussels: ICG 22 August 2008

Data sekunder didapat melalui jurnal dan penelitian yang membahas mengenai latar belakang terjadinya konflik di Ossetia Selatan pada bulan Agustus 2008. Jurnal yang digunakan sebagai sumber dalam penelitian ini antara lain berasal dari Jurnal *Foreign Affairs* dengan judul “*Russia Leaves the West*” oleh Dmitri Trenin; *International Affairs* dengan judul “*The Secret Policemen's Ball: the United States, Russia and the international order after 11 September*” oleh Anatol Lieven, “*Russia: A Part of Europe or Apart from Europe?*” oleh Vladimir Baranovsky, “*Russia Resurgent? Moscow's Campaign to coerce Georgia to Peace*” oleh Roy Allison. Penelitian yang dilakukan oleh Timothy L. Thomas dengan judul “*The Bear Went Through The Mountain: Russia Appraises Its Five-Day War In South Ossetia*” memaparkan apa yang sebenarnya terjadi hingga terjadinya perang pada bulan

Agustus 2008 tersebut, namun tidak menjelaskan apa yang membuat Georgia memprovokasi Rusia untuk menyerang ke wilayah Ossetia Selatan. Penelitian tersebut juga menjelaskan persiapan Georgia yang melakukan latihan militer bersama dengan Amerika Serikat di Georgia. Selain Amerika Serikat, Turki bersama dengan Czech dan Bulgaria juga ikut membantu Georgia dalam memberikan peralatan serta pelatihan personel militer.<sup>15</sup>

### 1.7 Kerangka Konseptual

Kebijakan luar negeri memiliki beragam definisi dan pendekatan yang memberikan aspek pemahaman maupun warna tertentu dalam penelitian yang akan dilakukan. Menurut Chris Brown, kebijakan luar negeri adalah sebuah cara untuk mengartikulasikan dan memperjuangkan kepentingan nasional terhadap dunia luar.<sup>16</sup>

Menurut K.J. Holsti, kebijakan luar negeri adalah ide atau tindakan yang dirancang oleh pembuat keputusan untuk menyelesaikan masalah atau menciptakan perubahan pada kebijakan, sikap, atau tindakan dari negara atau negara-negara lain, pada aktor-aktor non-negara, pada ekonomi internasional, atau pada lingkungan fisik dunia.<sup>17</sup> Sementara itu, menurut Daniel Papp kebijakan luar negeri adalah tindakan-tindakan terarah yang dilakukan negara demi mencapai tujuan-tujuan yang menjadi kepentingannya.<sup>18</sup> Definisi di atas ini menyepakati bahwa kebijakan luar negeri suatu negara tidak dapat dilepaskan dari kepentingan nasional negara tersebut dalam interaksinya dengan negara-negara lain di dalam sistem internasional.

Kepentingan nasional antara lain dijabarkan oleh Holsti sebagai tujuan yang ingin dicapai oleh suatu negara dimana terdapat sekurang-kurangnya empat tujuan yang saat ini lazim ditemukan, yaitu keamanan (*security*), otonomi (*autonomy*), kesejahteraan (*welfare*), dan prestise (*status and*

<sup>15</sup> Timothy L Thomas, *The Bear Went Through the Mountain: Russia Appraises its Five-Day War in South Ossetia*. *Journal of Slavic Military Studies*, (2009) 22:31-67

<sup>16</sup> Chris Brown & Kirsten Ainley, *Understanding International Relations* (3rd ed.), London: Palgrave MacMillan, 2005, h. 63

<sup>17</sup> K.J. Holsti, *International Politics: A Framework for Analysis* (7th ed.), New Jersey: Prentice-Hall, 1995, h. 83

<sup>18</sup> Daniel S. Papp, *Contemporary International Relations: Frameworks for Understanding* (5th ed.), Boston: Allyn & Bacon, 1997, h. 134

*prestige*).<sup>19</sup> James Rosenau mengatakan bahwa konsep kepentingan nasional selama ini digunakan dalam analisis politik dan tindakan politik. Rosenau menjelaskannya sebagai alat analisis yang digunakan untuk menjelaskan memaparkan atau mengevaluasi politik luar negeri suatu negara. Sebagai alat tindakan politik, kepentingan nasional juga berfungsi sebagai sarana membenarkan, mengkritik, atau mengusulkan kebijakan untuk menentukan apa yang terbaik untuk bangsa dalam urusan luar negeri.<sup>20</sup>

Morgenthau kemudian mengatakan bahwa “sasaran-sasaran dari kebijakan luar negeri harus didefinisikan dalam hubungannya dengan kepentingan nasional.”<sup>21</sup> Holsti mendukung pernyataan ini dengan menyatakan bahwa kepentingan nasional utamanya berasal dari dalam negara itu sendiri, atau dengan kata lain merupakan refleksi dari kebutuhan domestik.<sup>22</sup> Namun demikian kebijakan luar negeri juga dipengaruhi oleh situasi dan kondisi sistem internasional maupun kebijakan negara-negara lain. Setiap negara memiliki skala prioritas dan strategi yang berbeda-beda terhadap pencapaian kepentingan nasionalnya.

Keamanan merupakan istilah yang secara sederhana dapat dimengerti sebagai suasana yang bebas dari segala bentuk ancaman bahaya, kecemasan, dan ketakutan. Dalam kajian tradisional, keamanan lebih sering ditafsirkan dalam konteks ancaman fisik (militer) yang berasal dari luar. Menurut Walter Lippmann suatu bangsa berada dalam keadaan aman selama bangsa itu tidak dapat dipaksa untuk mengorbankan nilai-nilai yang dianggapnya penting (*vital*) dan jika dapat menghindari perang atau, jika terpaksa melakukannya, dapat keluar sebagai pemenang.<sup>23</sup> Harold Lasswell juga menilai bahwa masalah utama yang dihadapi setiap negara adalah membangun kekuatan untuk menangkal (*to deter*) atau mengalahkan (*to defeat*) suatu serangan atau kebebasan dari pendiktean negara lain.<sup>24</sup>

---

<sup>19</sup> Holsti, *Op.cit.*, h. 84.

<sup>20</sup> James N. Rosenau, *The Study of World Politics (Vol. 1: Theoretical and Methodological Challenges)*, London: Routledge, 2006, h. 246.

<sup>21</sup> *Ibid.*

<sup>22</sup> Holsti, *op. cit.*, h. 256-266

<sup>23</sup> Walter Lippmann, *The Good Society*, New Jersey: Transaction Publishers, 2004. Hal. 98.

<sup>24</sup> Joseph R. Romm, *Defining National Security*, <http://books.google.co.in/books?id=shxDOnuVcyYC>



Salah satu istilah yang penting dalam kajian keamanan adalah *security dilemma*. *Security dilemma* menggambarkan upaya suatu negara untuk meningkatkan keamanannya dengan mempersenjatai diri justru, dalam suasana anarki internasional, membuatnya semakin rawan terhadap kemungkinan serangan pertama pihak lain.<sup>25</sup>

Pada World Summit 2005, seluruh anggota PBB menyetujui sebuah konsep yang disebut *Responsibility to Protect*. *Responsibility to Protect* menetapkan bahwa setiap negara berkewajiban untuk melindungi warga negaranya dari tindakan genosida, pembantaian etnis, kejahatan perang dan crime against humanity. Jika negara tersebut gagal melindungi warganya, maka negara lain berhak membantu untuk melindungi warga negaranya tersebut. Jika dinilai tetap gagal dan telah melalui jalan damai, maka dapat melakukan intervensi, antara lain dengan pemberian sanksi ekonomi. Intervensi militer merupakan pilihan terakhir.<sup>26</sup>

Separatisme memiliki arti suatu kecenderungan politik yang secara khusus muncul di kalangan penduduk etnik dan wilayah padat penduduk, biasanya mereka memiliki sejarah sebagai negara, yang menentang setiap bentuk penggabungan ke dalam sebuah negara federasi/negara kesatuan. Mereka berkampanye untuk membentuk struktur negara sendiri yang merdeka.<sup>27</sup> Sedangkan menurut Oliver Gebel, separatisme adalah sebuah istilah yang diambil dari istilah politik dan menjelaskan suatu kondisi dimana terdapat keinginan untuk meninggalkan suatu tentitas politik besar (negara) dalam rangka untuk membentuk sebuah negara baru dan independensi politik.<sup>28</sup> Definisi lain mengenai separatisme adalah suatu gerakan untuk mendapatkan kedaulatan dan memisahkan suatu wilayah atau kelompok manusia (biasanya kelompok dengan kesadaran nasional yang tajam secara etnis, suku, ras, agama, atau pemerintahan) dari suatu kelompok yang lebih

---

<sup>25</sup> Robert Jervis, *Perception and Misperception in International Politics* Princeton, New Jersey: Princeton University Press, 1976, Hal.63

<sup>26</sup> United Nations General Assembly, 2005 World Summit Outcome, <http://www.who.int/hiv/universalaccess2010/worldsummit.pdf>

<sup>27</sup> Larry Diamond dan Marc F. Plattner (ed.), *Nasionalisme, Konflik Etnis dan Demokrasi* (Terj), Bandung: Penerbit ITB, 1998, Hal. 143

<sup>28</sup> Gebel Oliver, "*Separatism in Canada – A Nationf at Stake?: Example of Quebec and Newfoundland and Labrador*", San Francisco: Grin Verlag, 2007. Hal. 5

besar (atau suatu negara lain). Mereka menyebutkan aksi yang mereka lakukan adalah gerakan dekolonisasi atau *self determination*.<sup>29</sup>

Pada penelitian ini akan dibahas mengenai apa yang membuat Georgia mengambil langkah untuk menyelesaikan masalah wilayah yang dikuasai oleh kelompok separatis yang berada di Ossetia Selatan, yang juga merupakan bagian dari kepentingan nasional Georgia. Tindakan ini juga akan berdampak terhadap Rusia, karena Georgia dan Rusia sama-sama menempatkan pasukan perdamaian di Ossetia Selatan, sehingga perlu dilihat juga bagaimana kebijakan luar negeri Georgia dan Rusia dalam menyikapi tindakan tersebut.

### **1.8 Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan pada penelitian ini terdiri dari empat bab, yaitu:

Bab pertama berisi pendahuluan yang memaparkan latar belakang, permasalahan, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, sumber data, metode penelitian dan kerangka konseptual dan sistematika penulisan.

Bab kedua berisi mengenai sejarah hubungan Georgia-Ossetia Selatan-Rusia, Georgia pada masa Uni Soviet, sejarah konflik Ossetia Selatan dengan Georgia, hingga terjadinya revolusi mawar pada tahun 2003.

Bab ketiga berisi mengenai posisi geografis Rusia, politik luar negeri Georgia dan Rusia, perluasan NATO ke timur, serta konflik Georgia-Rusia pada bulan Agustus 2008 yang terjadi di Ossetia Selatan.

Bab keempat berisi kesimpulan.

---

<sup>29</sup> R. Harris, Jerry Harris, *The Nation in the Global Era: Conflict and Transformation*, Brill, 2009, Hal. 320

## BAB II

### SEJARAH HUBUNGAN GEORGIA - OSSETIA SELATAN - RUSIA

Republik Georgia adalah sebuah negara yang terletak di wilayah Transkaukasia, sebelah timur Laut Hitam. Di sebelah utara, Georgia berbatasan langsung dengan Rusia, di sebelah timur dengan Azerbaijan dan di selatan dengan Armenia dan Turki. Penduduk Georgia berjumlah sekitar 4,2 juta jiwa dengan luas wilayah sekitar 70.000 km<sup>2</sup> dan pusat pemerintahannya terletak di kota T'bilisi. Sejarah Georgia berasal dari kerajaan Colchis dan Iberia pada abad ke 3, dan merupakan salah satu kerajaan yang mengadopsi agama Kristen pada abad ke 4. Ketika terjadi Revolusi Rusia, Georgia akhirnya menjadi negara yang merdeka dengan bentuk republik pada tahun 1918, tetapi kemudian pada tahun 1922 hingga tahun 1991, Georgia menjadi bagian dari Uni Soviet.<sup>30</sup>

Seperti negara-negara bekas komunis lainnya, Georgia mengalami krisis ekonomi dan konflik internal pada awal-awal kemerdekaannya, khususnya di wilayah Ossetia Selatan, Abkhazia dan Ajaria. Revolusi Mawar<sup>31</sup> yang terjadi pada tahun 2003, menjatuhkan Presiden Eduard Shevardnadze dan digantikan oleh Mikhail Saakashvili yang membawa reformasi demokrasi, tetapi investasi asing dan pertumbuhan ekonomi tidak juga membaik. Untuk membawa perubahan dalam segala bidang, Presiden Saakashvili menegaskan bahwa Georgia sudah bergabung ke dalam beberapa organisasi multilateral<sup>32</sup> untuk memberikan perubahan positif di negaranya pada berbagai bidang.

Pada bulan Agustus 2008, Georgia melakukan penyerangan terhadap kelompok separatis di wilayah Ossetia Selatan dan Abkhazia. Hasil dari konflik tersebut adalah Rusia mengakui kemerdekaan Ossetia Selatan dan Abkhazia, tetapi hanya diakui oleh beberapa negara saja, seperti Nauru, Nikaragua dan Venezuela. Sementara itu, pemerintah Georgia hanya menyatakan bahwa Ossetia selatan dan Abkhazia adalah wilayah yang diduduki oleh Rusia.

---

<sup>30</sup> Britannica Encyclopedia 2009

<sup>31</sup> Revolusi ini berlangsung secara damai untuk menjatuhkan presiden Eduard Shevardnadze dan kemudian digantikan oleh Mikhail Saakashvili.

<sup>32</sup> WTO, United Nations, Organization of the Black Sea Economic Cooperation, Community of Democratic Choice dan GUAM (sebuah organisasi untuk demokrasi dan pembangunan ekonomi).

Peristiwa intervensi militer Rusia yang dilakukan terhadap Georgia di Ossetia Selatan pada bulan Agustus 2008 merupakan sebuah peristiwa yang baru, dalam arti untuk pertama kalinya Rusia mengirim pasukan untuk melakukan operasi militer di luar wilayah teritorialnya sendiri sejak lepas dari Uni Soviet. Namun di sisi lain peristiwa ini tidak sepenuhnya baru karena konflik antara Rusia dengan Georgia mengenai Ossetia Selatan disebabkan oleh kebijakan-kebijakan yang diterapkan Uni Soviet sejak tahun 1920-an.<sup>33</sup>

Pecahnya Uni Soviet pada tahun 1991 telah memunculkan 15 negara baru, yaitu Rusia, Ukraina, Belarus, Moldova, Georgia, Armenia, Azerbaijan, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Uzbekistan, Tajikistan, Turkmenistan, Lithuania, Latvia, dan Estonia. Walaupun sudah menjadi 15 negara merdeka, namun hingga saat ini, Rusia masih menyebut seluruh negara eks Uni Soviet tersebut dengan istilah *near abroad*. Apa yang dimaksud dari *near abroad* tersebut adalah bahwa Rusia mengakui kemerdekaan negara-negara tersebut, namun di sisi lain Rusia merasa bahwa negara-negara ini masih menjadi bagian dari dirinya dan masih bergantung kepadanya dalam suatu hubungan pusat-daerah sebagaimana yang telah berlangsung selama ratusan tahun.<sup>34</sup> Oleh karena itu, walaupun proses disintegrasi Uni Soviet berjalan relatif damai namun sejarah menunjukkan bahwa potensi ancaman justru muncul dari konflik di antara negara penerus (*successor states*) dan dari negara lain yang berusaha memanfaatkan kekosongan kekuasaan.<sup>35</sup>

Secara etnis, Abkhazia, Ossetia Selatan dan Georgia sangat berbeda dari sejarah dan bahasa. Bahasa Abkhazia termasuk kelompok bahasa Kaukasus Barat Laut, sementara bahasa Ossetia Selatan berasal dari Indo-Eropa Iran. Kemiripan diantara keduanya adalah budaya mereka yang berinteraksi secara langsung dengan etnis Georgia.<sup>36</sup> Perbedaan tersebut akhirnya membuat Abkhazia ingin menjadi negara merdeka dan terlepas dari Georgia maupun Rusia. Sementara itu, Ossetia Selatan selain ingin menjadi negara merdeka seperti Abkhazia, tetapi mereka juga ingin menggabungkan diri dengan Ossetia Utara yang berada di

<sup>33</sup> Svante E. Cornell, *Small Nations and Great Powers: A Study of Ethnopolitical Conflict in the Caucasus*, London: Routledge Curzon, 2001. Hal. 120

<sup>34</sup> Richard Sakwa, *Russian Politics and Society (4th ed.)*, London: Routledge, 2008, hal.420

<sup>35</sup> *Ibid.*

<sup>36</sup> Paula Garb, "The View from Abkhazia of South Ossetia Ablaze", *Central Asian Survey*, Vol. 28 No. 2, June 2009, Routledge, Hal. 235-246.

wilayah Rusia. Jika mereka memilih untuk bergabung dengan Ossetia Utara, maka dengan sendirinya akan menjadi bagian dari Rusia.

Konflik yang terjadi pada bulan Agustus 2008 diakibatkan oleh kejadian-kejadian yang menimpa Ossetia Selatan tidak lama setelah kelompok Bolshevik<sup>37</sup> menggulingkan pemerintahan Tsar Nikolas II dan mengakhiri kekuasaan dinasti Romanov yang telah memimpin Rusia sejak abad ke-17. Ossetia Selatan adalah sebuah wilayah yang terletak pada bagian utara Georgia dan terpisahkan oleh pegunungan Kaukasus dengan Ossetia Utara yang merupakan bagian dari Rusia. Ossetia Selatan dihuni oleh etnis Ossetia yang secara etno-linguistik berbeda dengan etnis Georgia. Sejarahwan setempat mengklaim bahwa nenek moyang bangsa Ossetia menetap di wilayah tersebut sejak abad ke-5 Masehi dan membentuk negara Ossetia yang kemudian bergabung dengan Rusia pada tahun 1774. Hal ini menjadi salah satu sumber friksi antara Rusia dan Georgia (dan antara Ossetia Selatan dan Georgia) karena rakyat Ossetia merasa lebih memiliki ikatan dengan Rusia ketimbang dengan Georgia.<sup>38</sup>

## 2.1 Georgia Pada Masa Uni Soviet

Salah satu konflik yang terjadi di wilayah *near abroad Rusia* adalah antara Rusia dengan Georgia. Wilayah yang terletak di kawasan pegunungan Kaukasus ini menjadi bagian dari Kekaisaran Rusia pada tahun 1801 dan setelah Revolusi 1917 sempat mengalami periode kemerdekaan yang singkat (1918-1921) sebelum diambil alih oleh pemerintahan Bolshevik dan dijadikan bagian dari Uni Soviet pada tahun 1922.<sup>39</sup> Pada awalnya wilayah tersebut berdiri sebagai Republik Federasi Transkaukasia (bersama Armenia dan Azerbaijan saat ini) dan pada tahun 1936 berpisah dan menjadi Republik Sosialis Soviet Georgia. Selama berada di bawah pemerintahan Uni Soviet, Georgia memiliki status yang relatif istimewa dibandingkan republik Soviet lainnya. Tingkat pendidikan dan standar hidup di Georgia relatif lebih tinggi, dan Georgia juga relatif lebih independen

<sup>37</sup> Bolshevik merupakan faksi terbesar dalam Partai Pekerja Sosial-Demokrat Rusia (RSDRP), yang kemudian memisahkan diri menjadi suatu partai sendiri, pada bulan Agustus 1903. (A. Fahrurrozi, *Rusia Baru Menuju Demokrasi*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2005. Hal. 129)

<sup>38</sup> *Ibid.* Hal. 188

<sup>39</sup> Svante E. Cornell, *Autonomy and Conflict: Ethnoterritoriality and Separatism in the South Caucasus – Cases in Georgia*, disertasi untuk gelar Ph.D. di Uppsala University, Swedia, 2002, h.142.

dari Moskow dalam arti merupakan salah satu republik yang mampu mempertahankan identitas dan nasionalismenya sepanjang sejarah Uni Soviet.<sup>40</sup> Status ini diperoleh saat Stalin menjadi pemimpin Uni Soviet namun lebih merupakan berkah dari naiknya Lavrenty Beria ke dalam lingkaran kekuasaan di Moskow.

Gambar 1.

Serangan Soviet ke Georgia



Sumber: <http://www.geoarmy.info/rus/1921.htm>

Seperti Stalin, Beria juga berasal dari Georgia dan setelah menjadi ketua Partai Komunis Georgia pada tahun 1931, karirnya terus meningkat hingga diangkat sebagai kepala NKVD (*Narodnyy komissariat vnutrennikh del*, Komisariat Rakyat Urusan Dalam Negeri)<sup>41</sup> pada tahun 1938. Beria

<sup>40</sup> *Ibid.*

<sup>41</sup> Agen Rahasia Soviet yang kemudian berubah menjadi KBG (*Komitet Gosudarstvennoy Bezopasnosti*, Komisi Keamanan Negara) dan saat ini berubah lagi menjadi FSB (*Federal'naya Sluzhba Bezopasnosti*, Badan Keamanan Feredal).

memanfaatkan posisinya sebagai salah satu orang terdekat Stalin untuk menjadikan Georgia sebagai basis kekuatannya; hasilnya adalah posisi Georgia yang relatif bebas dari kebijakan-kebijakan represif Soviet seperti kolektivisasi pertanian dan ‘pembersihan’ masyarakat dari elemen-elemen borjuis serta kontra-revolusioner.<sup>42</sup>

Wafatnya Stalin dan Beria mengubah segalanya bagi Georgia. Rakyat Georgia menanggapi pidato yang dilakukan oleh Krushchev dengan reaksi negatif. Reaksi ini timbul akibat citra Stalin yang sangat kuat di Georgia sehingga pidato Krushchev tersebut tidak hanya dianggap sebagai penghinaan terhadap Stalin, namun juga terhadap seluruh rakyat Georgia.<sup>43</sup> Satu bulan setelah pidato tersebut, bertepatan dengan peringatan tiga tahun kematian Stalin, rakyat Georgia mengenang sang pemimpin besar dengan melakukan unjuk rasa anti-Soviet secara besar-besaran di Tbilisi dan kota-kota lainnya. Aksi yang sangat langka dalam sejarah Uni Soviet ini berhasil dikendalikan oleh Moskow. Pasukan anti huru-hara Soviet yang terdiri dari personil non-Georgia, diperintahkan untuk menjaga gedung-gedung pemerintahan. Mereka melepas tembakan ke arah para pengunjuk rasa dan menyebabkan ratusan korban tewas.<sup>44</sup> Pembantaian ini merupakan titik awal dari kebangkitan nasionalisme Georgia dan menyebabkan rusaknya ikatan emosional Georgia dengan komunisme Uni Soviet yang kemudian menjadi Rusia. Salah satu akibat langsung dari peristiwa ini adalah munculnya kelompok-kelompok anti-Rusia yang dipimpin tokoh-tokoh nasionalis seperti Zviad Gamsakhurdia dan Merab Kostava. Gamsakhurdia nantinya akan memainkan peran yang sangat penting dalam proses kemerdekaan Georgia dari Uni Soviet.<sup>45</sup>

Antara tahun 1960 hingga akhir tahun 1970, kelompok-kelompok nasionalis ini semakin bertambah jumlahnya dan sentimen-sentimen nasionalis semakin keras didengungkan. Salah satu bentuk sentimen ini ditunjukkan pada bulan April 1978 ketika sekitar 5.000 mahasiswa mengadakan unjuk rasa di Tbilisi untuk memprotes rencana pemerintah untuk melakukan amandemen terhadap konstitusi Georgia. Amandemen tersebut hendak menghapus klausul

---

<sup>42</sup> *Ibid.* Hal 145

<sup>43</sup> Svante E. Cornell, *Small Nations and Great Power*, hal. 139.

<sup>44</sup> *Ibid.* Hal 140.

<sup>45</sup> Cornell, *Autonomy and Conflict*, hal. 147.

yang menetapkan status bahasa Georgia sebagai satu-satunya bahasa resmi negara dan menggantinya dengan klausula yang menjadikan bahasa Rusia serta bahasa republik lainnya sebagai bahasa resmi pula. Menghadapi protes ini pemerintah Georgia yang dipimpin mantan Menteri Dalam Negeri Eduard Shevardnadze memutuskan untuk membatalkan rencana tersebut. Tindakan Shevardnadze ini merupakan hal yang baru dalam sejarah Uni Soviet dimana sebuah pemerintahan komunis menetapkan kebijakannya berdasarkan opini publik tanpa mengundang reaksi negatif dari Moskow.<sup>46</sup>

Shevardnadze tidak hanya mendapatkan kebebasan oleh Moskow, namun penunjukannya sebagai kandidat anggota Politburo pada bulan Oktober 1978 dan sebagai Menteri Luar Negeri Uni Soviet oleh Mikhail Gorbachev pada tahun 1985 menunjukkan bahwa Shevardnadze memiliki reputasi yang baik di Moskow dan menyiratkan bahwa Georgia masih mempertahankan statusnya yang istimewa dibandingkan Republik yang lain di dalam Uni Soviet. Reformasi yang dicanangkan Gorbachev setelah menjadi pemimpin Uni Soviet menyebabkan meningkatnya dorongan nasionalisme Georgia. Setelah Moskow memberikan kesempatan untuk melakukan demokratisasi pada tahun 1987, aktivis-aktivis nasionalis di Georgia membentuk organisasi-organisasi yang mempersiapkan kemerdekaan Georgia melalui kampanye promosi budaya, bahasa, dan identitas nasional Georgia.<sup>47</sup>

Sepanjang tahun 1988 terjadi perdebatan sengit antara kelompok komunis konservatif yang masih setia kepada Moskow dengan kelompok nasionalis radikal yang mendukung kemerdekaan Georgia. Puncak dari perdebatan ini terjadi pada tanggal 9 April 1989, yaitu ketika ribuan warga yang melakukan unjuk rasa mendukung kemerdekaan Georgia kembali ditangani dengan keras oleh aparat keamanan. Korban tewas tidak sebanyak pada tahun 1956 namun kali ini dampaknya serupa dengan intervensi militer pertama Soviet di Hungaria. Dengan dasar gerakan nasionalisme, tindakan aparat keamanan justru semakin memperkuat oposisi terhadap pemerintah dan menghancurkan legitimasi pemerintahan komunis Georgia.<sup>48</sup>

---

<sup>46</sup> Cornell. *Small Nations and Great Powers*. Hal. 142

<sup>47</sup> *Ibid.* Hal. 146

<sup>48</sup> *Ibid.* Hal. 149



Jumber Patiashvili yang pada saat itu merupakan pemimpin Partai Komunis, diturunkan dari jabatannya dan digantikan oleh Givi Gumbaridze, yang kemudian dipaksa untuk mengakomodasi tuntutan kelompok nasionalis dan mengumumkan kebijakan baru. Kebijakan tersebut antara lain mengukung kedaulatan Georgia dan supremasi hukum Georgia di atas hukum Soviet. Namun Gumbaridze tidak mampu mengembalikan otoritas partai komunis yang hilang sejak insiden April 1989. Pemilihan umum legislatif Georgia yang berlangsung pada bulan Oktober 1990 dimenangkan secara mutlak oleh aliansi Meja Bundar untuk Pembebasan Nasional yang dipimpin oleh Zviad Gamsakhurdia.<sup>49</sup> Aliansi ini berhasil merebut 155 kursi dari total 250 kursi, sementara Partai Komunis hanya berhasil memperoleh 61 kursi.<sup>50</sup>

Gamsakhurdia dilantik sebagai ketua parlemen dan setelah itu mencanangkan program persiapan kemerdekaan dan 'de-Sovietisasi', antara lain dengan mengubah nama resmi negara menjadi Republik Georgia dan menolak ikut serta dalam referendum bulan Maret 1991 yang diusulkan Gorbachev untuk membahas traktat uni yang baru demi mempertahankan keutuhan Uni Soviet. Gamsakhurdia bahkan membalas Gorbachev dengan menggelar referendum internal pada tanggal 9 April 1991, yang bertepatan dengan peringatan dua tahun insiden di Tbilisi, untuk mengembalikan kemerdekaan Georgia sebagaimana yang dideklarasikan pada tahun 1918. Hasil dari referendum tersebut adalah hampir seluruh rakyat Georgia (98%) mendukung kemerdekaan Georgia, dan pada hari yang sama Georgia mendeklarasikan kemerdekaannya dari Uni Soviet.<sup>51</sup> Pada bulan Mei Gamsakhurdia terpilih sebagai Presiden pertama Georgia dengan meraih suara mayoritas (86%). Kemerdekaan ini baru mendapatkan pengakuan internasional pada pertengahan tahun 1992 setelah Gamsakhurdia dikudeta oleh lawan politiknya dan Eduard Shevardnadze diminta untuk memimpin kembali negaranya, kali ini sebagai Presiden Georgia yang merdeka dan berdaulat.<sup>52</sup>

---

<sup>49</sup> Aliansi ini merupakan gabungan partai-partai oposisi.

<sup>50</sup> Cornell, *Autonomy and Conflict*. Hal 157.

<sup>51</sup> *Ibid.* Hal. 165

<sup>52</sup> Cornell, *Small Nations and Great Powers*. Hal. 178

## 2.2 Sejarah Konflik Georgia dengan Ossetia Selatan

Sejak tahun 1989 sebenarnya sudah terjadi konflik antara Georgia dengan etnis Ossetia akibat rasa nasionalismenya yang sangat tinggi diantara keduanya. Sebelum itu, kedua etnis tersebut hidup berdampingan secara damai bahkan tingkat interaksi dan pernikahan antara keduanya sangat tinggi. Pada saat Revolusi 1917 Georgia berada di bawah kekuasaan kelompok Menshevik yang berseberangan dengan kelompok Bolshevik di Moskow. Kelompok Menshevik memanfaatkan posisi Bolshevik yang masih lemah untuk mendeklarasikan kemerdekaan Republik Demokratik Georgia pada tanggal 26 Mei 1918. Dengan demikian maka Georgia secara resmi memisahkan diri dari Uni Soviet, dan sebagai akibatnya, Ossetia Selatan terpisah secara legal formal dari saudara-saudaranya di Ossetia Utara. Rakyat Ossetia Selatan merasa diperlakukan secara diskriminatif oleh Georgia dan menyuarakan keinginannya untuk bergabung dengan Ossetia Utara, namun hal ini diinterpretasikan oleh Tbilisi sebagai dukungan terhadap kelompok Bolshevik.<sup>53</sup>

Konflik etnis mulai terlihat pada tahun 1918 hingga 1921 ketika pemerintah Menshevik Georgia menuduh bahwa etnis Ossetia telah bekerja sama dengan Bolshevik Rusia dan beberapa kali terjadi pemberontakan oleh etnis Ossetia yang menginginkan kemerdekaannya. Rasa saling curiga antara kedua belah pihak berubah menjadi insiden-insiden perlawanan terhadap pemerintah, dan pada tahun 1920 rakyat Ossetia Selatan yang didukung pasukan Bolshevik dari Ossetia Utara melancarkan pemberontakan besar yang berhasil dipadamkan secara brutal oleh tentara pemerintah Georgia.<sup>54</sup> Menshevik Georgia mengirimkan tentara nasional dan tentara regulernya ke Tskhinvali (ibukota Ossetia Selatan) untuk menghentikan kerushan tersebut. Akibat dari itu, sekitar 5.000 etnis Ossetia meninggal dan lebih dari 13.000 penduduk sipil mati akibat kelaparan dan wabah penyakit. Pada tahun 1921 tentara Soviet menyerang Georgia, kemudian wilayah otonomi Ossetia Selatan dimasukkan ke dalam Georgia. Insiden ini menciptakan

<sup>53</sup> International Crisis Group, *Georgia: Avoiding War in South Ossetia (Europe Report No. 159)*, Tbilisi/Brussels: ICG, 26 November 2004. Hal. 3.

<sup>54</sup> *Op.cit.* Cornell. Hal 141.

rasa permusuhan yang berkepanjangan antara Ossetia Selatan dan Georgia hingga saat ini.

Gambar 2.  
Penyebaran Etnis di Kaukasus



Sumber: <http://www.lib.utexas.edu/maps/commonwealth/ethnocaucasus.jpg>

Dalam Traktat yang menjadi basis pembentukan Uni Soviet pada tahun 1922, Ossetia Selatan mendapat status sebagai wilayah otonom (*autonomous oblast*) namun masih berada di bawah administrasi Georgia. Penetapan ini tidak

diterima dengan baik oleh kedua belah pihak. Rakyat Ossetia Selatan menuntut perlakuan yang sama dengan Ossetia Utara (yang memperoleh status yang lebih tinggi yaitu *autonomous republic* atau republik otonom) sementara rakyat Georgia merasa bahwa Ossetia Selatan adalah sebuah entitas asing yang pembentukannya tidak lain adalah implementasi dari politik “pecah belah” yang dilakukan Rusia terhadap Georgia.<sup>55</sup>

Selama era Uni Soviet, hubungan antara etnis Georgia dengan etnis Ossetia kurang berjalan dengan baik dan selalu terjadi persaingan diantara keduanya. Etnis Georgia menganggap bahwa etnis Ossetia yang bermukim di wilayah Ossetia Selatan tidak pantas mendapatkan keuntungan-keuntungan yang didapat di bidang perekonomian, tetapi di lain pihak mereka tidak mendapatkan keuntungan dalam bidang politik jika dibandingkan dengan saudara mereka yang berada di wilayah Rusia (Ossetia Utara) dan penduduk di Abkhazia.

Sebuah gerakan yang menyebut dirinya *Ademon Nykhas*, dibentuk pada tahun 1988 untuk menggalang persatuan rakyat demi mencapai kemerdekaan Ossetia Selatan. Mereka mencoba meminta menaikkan status wilayah Ossetia Selatan menjadi Otonomi Republik di dalam wilayah Georgia. Pada tanggal 10 November dewan kota SOAO (*South Ossetia Autonomous Oblast*) mengajukan permohonan untuk merubah statusnya untuk menjadi Otonomi Republik, tetapi hal ini ditolak oleh Georgia.<sup>56</sup>

Selain itu, masalah bahasa juga menimbulkan masalah baru. Pada tahun 1989 pemerintah menetapkan bahasa Georgia sebagai bahasa resmi pemerintah di seluruh wilayah Georgia, bukan lagi menggunakan bahasa Rusia yang kemudian membuat etnis Ossetia beraksi dengan meminta bahasa Ossetia sebagai bahasa resmi di wilayah otonomi Ossetia Selatan. Kedua belah pihak sudah beberapa kali mencoba meredakan konflik dengan mengadakan forum umum yang dihadiri oleh kedua belah pihak, namun pada akhirnya justru menimbulkan konflik menelan korban jiwa.

Pada masa kepemimpinan Gorbachev hubungan antara Georgia dan Oessetia Selatan menghadapi masalah yang serius. Sebuah insiden yang terjadi pada tanggal 9 April 1989, yang menyulut gerakan nasionalisme Georgia, ternyata

<sup>55</sup> *Loc.cit.* International Crisis Group. Hal 3.

<sup>56</sup> *Ibid.* Hal. 4

juga menyulut gerakan yang sama di Ossetia Selatan. Selama musim semi dan musim panas tahun 1989, Georgia dan Ossetia Selatan terlibat dalam sebuah ‘perang undang-undang’ yaitu ketika Tbilisi mengeluarkan peraturan yang menetapkan bahasa Georgia sebagai satu-satunya bahasa resmi di seluruh negara dan Ossetia Selatan membalas dengan mengeluarkan peraturan yang menetapkan bahasa Ossetia sebagai bahasa resmi di wilayah tersebut.<sup>57</sup> ‘Perang undang-undang’ ini mengakibatkan terjadinya konflik etnis yang menyebabkan jatuhnya korban dari kedua belah pihak.

Pada tanggal 10 November Ossetia Selatan secara sepihak menyatakan bersatu dengan Ossetia Utara yang berada di wilayah Rusia. Keesokan harinya Georgia dengan tidak mengakui sikap Ossetia Selatan tersebut dan menyatakan bahwa Ossetia Selatan masih merupakan bagian dari administrasi Georgia. Konflik antara Georgia dengan Ossetia Selatan dimulai pada tanggal 23 November 1989. Pada saat itu Gamsakhurdia bersama dengan Gumbaridze memimpin sekitar 15.000 orang menuju Tskhinvali untuk melakukan perundingan melindungi etnis Georgia di Ossetia Selatan. Kelompok ini berhasil ditahan di perbatasan Georgia-Ossetia Selatan oleh gabungan rakyat dan milisi Ossetia serta satu resimen tentara Soviet untuk tidak masuk ke wilayah Ossetia Selatan. Insiden penahanan ini akhirnya menimbulkan bentrok dan menimbulkan 6 korban tewas, 24 luka ringan dan 140 lainnya mendapatkan perawatan serius.<sup>58</sup> Peristiwa ini mendorong *Ademon Nykhas* untuk mengirim petisi ke Moskow dengan tujuan penyatuan kembali Ossetia Selatan dengan Ossetia Utara, namun petisi ini tidak ditanggapi, karena Moskow sedang menghadapi masalah yang lebih besar.<sup>59</sup>

Selama awal tahun 1990, hubungan antara Georgia dengan Ossetia selatan cenderung stabil karena para elit politik Georgia sedang terlibat perselisihan mengenai masa depan negaranya. Namun pada bulan Agustus 1990 ketegangan dalam hubungan kedua negara tersebut kembali meningkat setelah parlemen Georgia mengadopsi peraturan baru yang tidak memperbolehkan partisipasi partai daerah dalam pemilu legislatif yang akan dilangsungkan pada bulan Oktober

<sup>57</sup> Cornell. *Small Nations and Great Powers*, Hal. 153

<sup>58</sup> *Ibid.*

<sup>59</sup> *Ibid.* Hal. 154

1990. Peraturan ini secara efektif menutup kemungkinan bagi *Ademon Nykhas* atau organisasi daerah lainnya untuk memiliki suara di parlemen.<sup>60</sup>

Dengah terpilihnya Gamaskhurdia sebagai ketua Parlemen Georgia pada pemilu bulan Oktober 1990, hak-hak masyarakat etnis Georgia di wilayah Ossetia Selatan terus diperjuangkan. Hal ini juga dikarenakan pemilih Gamaskhurdia banyak yang berasal dari wilayah Abkhazia dan Ossetia Selatan.<sup>61</sup> Georgia melihat bahwa wilayah Ossetia Selatan dimanfaatkan oleh Rusia untuk terus membuat keadaan di Georgia tidak stabil. Namun sebenarnya kedua wilayah tersebut ingin memisahkan diri dari Georgia karena memang mereka berbeda dan menderita dengan pemaksaan mengeorgiakan wilayah tersebut. Untuk dapat mencapai tujuannya tersebut, wilayah tersebut meminta dukungan dari Rusia, dimana mereka merasa sama secara etnis dibandingkan dengan Georgia. Pemerintah Georgia selalu menduga bahwa keberadaan kelompok separatis di Ossetia Selatan mendapatkan dukungan dari Rusia, terlebih ketika kedua wilayah tersebut menetapkan bahasa Rusia sebagai bahasa utama yang digunakan.

Pada tanggal 9 Desember 1990 Ossetia Selatan mengadakan pemilu sendiri dengan tujuan memilih anggota parlemen dari 'Republik' baru ini. Dua hari kemudian parlemen 'Republik' Ossetia Selatan memilih untuk berada di bawah otoritas Moskow. Ossetia Selatan mendeklarasikan kemerdekaannya dari Georgia dan tindakan ini ditanggapi oleh Gamsakhurdia dengan membatalkan hasil pemilu tanggal 9 Desember, dengan menghapus status *autonomous oblast* Ossetia Selatan dan menyatakan keadaan darurat di wilayah tersebut. Gamsakhurdia kemudian memerintahkan blokade terhadap Ossetia Selatan dan secara resmi memulai perang Georgia-Ossetia Selatan ketika ia memerintahkan pasukannya untuk menduduki Tskhinvali pada bulan Januari 1991.<sup>62</sup> Pemerintah Georgia menetapkan keadaan darurat di wilayah tersebut dan mengangkat komandan tentara dalam negeri Georgia untuk menjabat sebagai walikota Tskhinvali.

---

<sup>60</sup> *Ibid.*

<sup>61</sup> *Ibid.*

<sup>62</sup> *Loc.cit.* International Crisis Group. Hal. 4

### 2.3 Georgia dan Ossetia Selatan Pasca Uni Soviet

Sepanjang tahun 1991, Tskhinvali praktis terbagi menjadi dua antara bagian kota yang dikuasai oleh pasukan Georgia dan bagian yang dikuasai oleh milisi Ossetia. Pasukan Georgia yang sebagian besar terdiri dari kelompok militer yang beranggotakan penduduk Ossetia beretnis Georgia, menggunakan meriam artileri untuk melakukan serangan ke Tskhinvali dan menyebabkan putusnya jalur komunikasi dan logistik. Kedua belah pihak ditengarai terlibat dalam aksi-aksi brutal terhadap penduduk sipil dari etnis yang lain seperti pengusiran, penjarahan dan pemerkosaan. Benar atau tidaknya dugaan itu tidak menutupi kenyataan bahwa perang ini memang menciptakan kondisi hidup yang sangat berat bagi penduduk sipil dari kedua belah pihak. Sekitar 100.000 orang menjadi pengungsi dan sebanyak 10.000 orang menjadi *internally displaced persons* (IDPs) akibat perang ini.<sup>63</sup> Pada bulan November pasukan Georgia berhasil mengepung Tskhinvali dan hampir mengakhiri perang ini secara tuntas apabila tidak terjadi kerusuhan internal yang melanda Georgia pada saat yang bersamaan.

Kerusuhan tersebut terjadi akibat kepemimpinan Presiden Gamsakhurdia yang semakin otoriter. Hal ini menciptakan perpecahan antara Gamsakhurdia dengan sekutunya, seperti Tengiz Kitovani dan Jaba Ioselani. Kitovani dan Ioselani adalah pemimpin militer yang sedikit banyak ikut berperan dalam perang dengan Ossetia Selatan. Kitovani adalah pemimpin Garda Nasional dan Ioselani adalah pemimpin dari satuan paramiliter *Mkhedrioni* (Penunggang Kuda) yang terkenal karena ketangguhannya. Bergabungnya kedua orang ini ke pihak oposisi menyebabkan perpecahan ini meningkat menjadi perang saudara menjelang akhir tahun 1991.<sup>64</sup> Sepanjang bulan November dan Desember, Tbilisi menjadi saksi pertumpahan darah antara tentara Pemerintah dengan pasukan pemberontak pimpinan Kitovani dan Ioselani.

Pada tanggal 22 Desember 1991, pihak pemberontak secara efektif menguasai Tbilisi dan memaksa Gamsakhurdia untuk meletakkan jabatannya dan meninggalkan Georgia. Gamsakhurdia melarikan diri ke Armenia pada tanggal 6 Januari 1992 dan kemudian mendapatkan suaka politik dari Presiden Djokhar Dudayev di Chechnya. Awal tahun 1992 merupakan waktu yang sulit bagi

<sup>63</sup> *Ibid.*

<sup>64</sup> *Op.cit.* Cornel. hal. 157

Georgia. Georgia sudah tidak lagi berada di bawah Uni Soviet namun Georgia berada dalam kondisi yang mendekati anarki. Para pemimpin pemberontak, Kitovani, Ioselani dan mantan Perdana Menteri Tengiz Sigua, membentuk sebuah Dewan Negara untuk menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan sehari-hari, namun tidak berhasil mengendalikan kelompok-kelompok paramiliter yang melakukan penjarahan terhadap penduduk sipil. Kredibilitas dan legitimasi Pemerintah berada pada titik yang sangat rendah, sehingga Dewan Negara kemudian memutuskan untuk mengundang Eduard Shevardnadze untuk kembali ke Georgia dan memimpin kembali negara kelahirannya dan mengatasi situasi dalam negeri yang semakin memburuk.<sup>65</sup>

Keputusan untuk mengundang Shevardnadze untuk kembali ke Georgia merupakan langkah yang tepat, karena setelah menjabat sebagai ketua Dewan Negara pada bulan Maret, ia menunjukkan keahliannya sebagai seorang negarawan dengan melakukan kunjungan ke Tskhinvali untuk meredakan ketegangan antara Georgia dan Ossetia Selatan.<sup>66</sup> Suasana di Ossetia Selatan pada saat itu sebenarnya sudah berangsur-angsur membaik, namun Shevardnadze gagal dalam mengendalikan kelompok-kelompok para militer tersebut, sehingga pada bulan April perang kembali terjadi lagi di Tskhinvali dan para militer Georgia juga terlibat dalam insiden pembantaian terhadap penduduk sipil Ossetia yang sedang mengungsi.<sup>67</sup>

Walaupun Rusia juga mengalami krisis domestik pada saat yang bersamaan, namun tidak berarti Moskow hanya berdiam diri dan membiarkan semua berjalan apa adanya. Rusia bahkan turut berperan dalam menentukan awal dan akhir dari perang antara Georgia dan Ossetia Selatan tersebut. Satu hal yang pasti adalah bahwa dari sudut pandang Georgia, Rusia adalah pihak ketiga yang selalu mencampuri urusan dalam negeri Georgia dan merupakan penyebab dari meningkatnya konflik dengan Ossetia Selatan.<sup>68</sup> Sebelumnya telah disebutkan bahwa keterlibatan awal Rusia dalam konflik di Georgia adalah ketika sebuah resimen tentara Soviet membantu melindungi Tskhinvali dari ribuan pendukung

---

<sup>65</sup> Cornell. *Autonomy and Conflict*. Hal. 166

<sup>66</sup> *Ibid.* Hal. 167

<sup>67</sup> *Ibid.*

<sup>68</sup> *Ibid.* Hal. 167



Gamsakhurdia pada tahun 1989. Rusia kemudian juga secara tidak langsung terlibat dalam perang saudara pada tahun 1991. Pada saat itu, pasukan pemberontak yang menggulingkan Gamsakhurdia diduga memperoleh persenjataan dari pangkalan militer Soviet yang tersebar di wilayah Georgia.<sup>69</sup>

Intervensi Rusia menjadi lebih terbuka setelah eskalasi konflik pada bulan April dan Mei 1992. Politisi-politisi garis keras seperti Ketua Parlemen Rusia, Ruslan Khasbulatov, dan Wakil Presiden Aleksandr Rutskoi, mengeluarkan pernyataan yang berisi kecaman keras terhadap tindakan Georgia dan penerimaan secara implisit terhadap keinginan Ossetia Selatan untuk bergabung dengan Rusia.<sup>70</sup> Memasuki bulan Juni, kedua negara telah berada di ambang peperangan. Helikopter-helikopter Rusia melancarkan serangan terhadap tank dan kendaraan tempur milik Garda Nasional Georgia, sementara satuan militer Rusia dan relawan dari republik-republik Kaukasus Rusia berhimpun di Ossetia Utara. Ossetia Utara juga mendukung saudara-saudaranya yang berada di selatan dengan menghentikan suplai gas alam dari Rusia ke Georgia serta melobi Moskow agar segera menggelar pasukan yang telah terhimpun.<sup>71</sup>

Shevardnadze dan Presiden Rusia pada saat itu, Boris Yeltsin, menyadari bahwa perang yang awalnya merupakan konflik internal ini dapat meluas hingga ke tingkat regional, oleh karena itu kedua pemimpin ini sepakat untuk meredakan ketegangan dengan menandatangani perjanjian gencatan senjata di kota Sochi, Rusia, pada tanggal 22 Juni 1992 yang dihadiri oleh pemimpin Ossetia Utara dan Selatan. Perjanjian ini pada prinsipnya ‘membekukan’ konflik antara Georgia dan Ossetia Selatan hingga waktu yang tidak ditentukan.<sup>72</sup> Untuk menjaga agar gencatan senjata tetap bertahan, kedua negara sepakat untuk membentuk pasukan penjaga perdamaian *Joint Peace Keeping Force* (JPKF) yang terdiri dari personel Rusia, Georgia dan Ossetia (Utara dan Selatan). Pasukan ini mulai aktif pada bulan Juli dan melakukan patroli di zona konflik, yaitu area dalam radius 15 km dari Tskhinvali.

---

<sup>69</sup> Cornel.. *Small Nations and Great Powers*. Hal. 336.

<sup>70</sup> *Ibid.* hal. 157.

<sup>71</sup> *Ibid.*

<sup>72</sup> Cornell. *Autonomy and Conflict*. Hal. 167

Perjanjian ini secara efektif mengakhiri perang di Ossetia Selatan tanpa deklarasi kemenangan salah satu pihak, namun pada kenyataannya, Georgia merupakan pihak yang ‘kalah’ karena walaupun secara *de jure* Ossetia Selatan masih diakui sebagai bagian dari wilayah teritorial Georgia, secara *de facto* Ossetia Selatan telah melepaskan diri dari kontrol Tbilisi. Selain itu, Georgia harus menerima kehadiran personil militer Rusia sebagai pemimpin JPKF di perbatasan yang terletak hanya beberapa jam dari Tbilisi.<sup>73</sup> Kehadiran JPKF relatif berhasil menjaga perdamaian di Ossetia Selatan karena menjadi penghalang bagi Georgia untuk menyelesaikan masalah Ossetia Selatan secara militer. Situasi ini bertahan hingga tahun 2003-2004 ketika terjadi perubahan-perubahan dalam lingkup domestik Georgia yang menghidupkan kembali konflik antara Georgia dan Ossetia Selatan.

#### 2.4 Revolusi Mawar

Selama lebih dari 10 tahun, sejak tahun 1992, Ossetia Selatan menikmati kemerdekaan *de facto*-nya dengan membentuk tatanan pemerintahan layaknya sebuah negara yang berdaulat. Konflik dengan Georgia tetap dalam keadaan ‘beku’ karena pemerintahan Eduard Shevardnadze lebih memfokuskan pada pembangunan ekonomi, stabilisasi politik internal dan rehabilitasi posisi internasional Georgia. Shevardnadze nyatanya berhasil mengubah Georgia dari kondisi semi-anarki pada awal pemerintahannya, menjadi negara yang progresif dan semakin diperhitungkan dalam dunia internasional.<sup>74</sup> Reputasi internasional Shevardnadze sebagai rekan Gorbachev dalam menerapkan *glasnost* dan *perestroika* pada masa Uni Soviet pun membuat dirinya sangat populer di Barat. Shevardnadze menggunakan popularitasnya untuk mendekatkan negaranya dengan Eropa dan Amerika dan menjauh dari pengaruh Rusia. Shevardnadze juga kerap melontarkan retorika pro-Barat dan anti-Soviet. Usahanya tersebut membuahkan hasil, dimana status Georgia pada paruh akhir tahun 90-an sebagai penerima dana bantuan terbesar dari Amerika Serikat. Selama Pemerintahan Shevardnadze, Georgia menerima total US\$ 1 milyar untuk melaksanakan

<sup>73</sup> Cornell. *Small Nations and Great Powers*. Hal. 340.

<sup>74</sup> *Ibid.* Hal. 342

program-program demokratisasi dan pembangunan ekonomi.<sup>75</sup> Namun demikian, di dalam negeri reputasi Shevardnadze adalah sebagai seorang pemimpin yang otoritarianisme dan bertanggung jawab atas korupsi yang semakin merajalela.

Partai politik Persatuan Warga Georgia, *Citizens' Union of Georgia* (CUG), yang dibentuk pada tahun 1993, diduga melakukan kecurangan pemilu sehingga memungkinkan kemenangan mudah Shevardnadze dan CUG dalam pemilu Presiden tahun 1995 dan 2000 serta pemilu legislatif tahun 1999.<sup>76</sup> Ketidakuasan terhadap kepemimpinan Shevardnadze menyebabkan menguatnya kelompok oposisi yang dipimpin oleh Zurab Zhvania, Nino Burjanadze, dan Mikheil Saakashvili. Ketiga orang ini merupakan pejabat dan mantan pejabat tinggi Georgia yang awalnya merupakan didikan Shevardnadze namun kemudian saling berselisih.<sup>77</sup> Zhvania adalah ketua Parlemen Georgia pada tahun 1995-2001 dan Burjanadze menjadi anggota parlemen selama dua periode sebelum menggantikan posisi Zhvania sebagai ketua. Sementara itu Saakashvili adalah seorang pengacara dan mantan anggota CUG yang diangkat Shevardnadze sebagai Menteri Kehakiman pada tahun 2000 namun mengundurkan diri setahun kemudian<sup>78</sup>. Mereka kemudian membangun sebuah aliansi untuk melawan CUG dengan nama *National Democratic Movement* (NDM) dalam pemilu legislatif berikutnya yang diselenggarakan pada awal bulan November 2003.

Dalam pemilu tersebut, Shevardnadze kembali dituduh melakukan kecurangan dan manipulasi pemilu yang kali ini dilakukan secara terang-terangan. Hasil pemilu yang diumumkan oleh pemerintah bertolak belakang dengan penghitungan yang dilakukan oleh pengamat independen asing maupun lokal yang menempatkan NDM sebagai pemenang. NDM mengecam kecurangan tersebut dan menggalang massa pendukungnya untuk mengadakan protes terbuka. Selama 2 minggu berturut-turut jalanan kota Tbilisi dan halaman depan parlemen Georgia dipenuhi lautan manusia yang menuntut agar pemerintah mengakui kemenangan NDM. Ketika pada tanggal 22 November Shevardnadze membuka sesi parlemen

---

<sup>75</sup> *Ibid.*

<sup>76</sup> International Crisis Group, *Georgia: What Now? (Europe Report No. 151)*, ICG: Tblisi/Brussels, 3 Desember 2003. Hal. 3.

<sup>77</sup> Svante E. Cornell, *Georgia After the Rose Revolution: Geopolitical Predicament and Implications for U.S. Policy*, The Strategic Studies Institute, February 2007, hal. 7.

<sup>78</sup> *Loc.cit* ,International Crisis Group. hal. 6-7.

yang terbentuk berdasarkan hasil pemilu yang jelas-jelas curang itu, Saakashvili memimpin massa untuk menyerbu gedung parlemen dan menyebabkan Shevardnadze meninggalkan ruangan. Burjanadze mengumumkan ke seluruh negeri bahwa Shevardnadze telah secara efektif melepaskan jabatannya dan menyatakan dirinya sebagai kepala negara *ad interim*.<sup>79</sup> Keesokan harinya Shevardnadze dan para pemimpin NDM mengadakan pertemuan yang diprakarsai oleh Menteri Luar Negeri Rusia Igor Ivanov untuk mencari solusi damai bagi krisis ini. Hasil dari pertemuan itu adalah pengunduran diri Shevardnadze secara resmi yang kemudian dilanjutkan dengan pelaksanaan pemilu Presiden pada bulan Januari 2004. Pemilu ini dimenangkan secara mutlak oleh Saakashvili dengan mendapatkan 96 persen suara. Kemenangannya diperkuat setelah pemilu legislatif ulangan yang diselenggarakan pada bulan April dimenangkan NDM dengan meraih dukungan 67 % dari total suara.<sup>80</sup>

Pergantian kekuasaan dari Shevardnadze ke Saakashvili ini oleh media Barat dinamakan *Rose Revolution* atau ‘Revolusi Mawar’ karena tindakan para pengunjuk rasa yang membagi-bagikan bunga mawar kepada aparat keamanan yang menjaga gedung parlemen. Saakashvili dipandang sebagai seorang reformis dan pejuang anti-korupsi yang mampu membawa perubahan bagi Georgia setelah 11 tahun berada di bawah pemerintahan Shevardnadze yang lemah dan korup. Mikhail Saakashvili yang pada saat itu berusia 36 tahun ketika menjadi Presiden, mengisi pemerintahannya dengan orang-orang yang relatif muda, sehingga menimbulkan kesan pemerintahan yang dinamis dan aktif untuk membuat perubahan yang lebih baik di Georgia.<sup>81</sup>

Setelah resmi menjabat sebagai Presiden Georgia, Saakashvili berkomitmen untuk menjalankan reformasi di bidang ekonomi dan politik, membangun Georgia menjadi sebuah negara yang kuat dan demokratis, serta menjalin hubungan yang lebih erat dengan Barat. Salah satu upaya untuk menjalin hubungan yang lebih erat tersebut antara lain dengan mengajukan keanggotaan NATO dan Uni Eropa, namun tanpa mengganggu hubungan bertetangga yang

---

<sup>79</sup> *Ibid.* Hal. 9-11

<sup>80</sup> International Crisis Group, *Georgia: Sliding toward Authoritarianism?* (Europe Report No. 189). Tblisi/Brussels: ICG. 19 Desember 2007. Hal. 1.

<sup>81</sup> *Loc.cit.* Hal. 2

baik dengan Rusia.<sup>82</sup> Selain itu, ia juga menyatakan janjinya untuk mengembalikan keutuhan wilayah teritorial Georgia, yaitu mengembalikan Ossetia Selatan pada Pemerintah Georgia.

Pada bulan Mei 2004, Saakashvili mulai mencoba untuk mengambil alih pemerintahan Ossetia Selatan dengan memerintahkan satuan kepolisian dan pasukan khusus (OMON, *Otryad Militsii Osobogo Naznacheniya*, Unit Khusus Kepolisian) untuk melakukan operasi pemberantasan penyelundupan di wilayah Ossetia Selatan. Penyelundupan adalah masalah besar bagi Georgia, namun karena Ossetia Selatan yang tidak memiliki sistem perdagangan yang mapan, menyebabkan penyelundupan adalah cara yang paling efektif untuk memperoleh barang-barang kebutuhan hidup sehari-hari.<sup>83</sup> Pasukan khusus Georgia tersebut disebar di beberapa wilayah konflik dan melakukan razia terhadap barang-barang ilegal serta menutup “pasar gelap” di Ergneti.

Dengan kehadiran pasukan yang bukan termasuk dalam komando JPKF ini, pemerintah dan penduduk Ossetia Selatan menganggap hal ini sebagai persiapan Georgia untuk ‘mencairkan’ konflik yang telah ‘beku’ selama 12 tahun. Pasukan Georgia kembali terlibat bentrokan bersenjata dengan milisi Ossetia Selatan, dan pada bulan Juli dan Agustus 2004, bentrokan ini menjadi perang terbatas setelah kedua belah pihak saling bertukar tembakan senjata ringan dan mortir di zona konflik.<sup>84</sup>

Konflik yang terjadi kali ini dibawa oleh Presiden Georgia, Mikhail Saakashvili hingga ke dunia internasional dengan menuduh Rusia berada dibalik konflik ini. Di hadapan pendukungnya, Saakashvili mengatakan bahwa konflik yang terjadi di Ossetia Selatan sebenarnya adalah masalah antara Georgia dengan Rusia. Sejak saat itu, hubungan antara Georgia dengan Rusia menjadi jauh dan semakin memburuk setelah perang yang terjadi pada bulan Agustus 2008. Pada bulan Agustus ini, tepatnya pada tanggal 8 dini hari, Pemerintah Georgia memutuskan untuk menyelesaikan masalah di Ossetia Selatan dengan melakukan serangan besar-besaran ke wilayah Tskhinvali (Ibukota Ossetia Selatan). Rusia

---

<sup>82</sup> *Loc.cit.* Hal. 3

<sup>83</sup> *Loc.cit.* Hal. 10

<sup>84</sup> Bertil Nygren, *The Rebuilding Greater Russia: Putin's Foreign Policy Toward the CIS Countries*, London: Rountledge, 2008, hal. 145-147.

yang sudah mengantisipasi, langsung masuk ke wilayah Ossetia Selatan melalui terowongan Roki yang menghubungkan antara Ossetia Utara dan Ossetia Selatan. Ini adalah intervensi militer pertama yang dilakukan oleh Rusia setelah runtuhnya Uni Soviet.

Tabel 1

Kronologi konflik Rusia – Georgia terhadap masalah di Ossetia Selatan

No.	Waktu	Kejadian	Keterangan
1.	1922	Georgia menjadi bagian dari Uni Soviet <sup>85</sup>	
2.	1972	Eduard Shevardnadze terpilih sebagai Pemimpin Partai Komunis Georgia <sup>86</sup>	
3.	1989	Ossetia Selatan menuntut untuk menjadi sebuah negara merdeka <sup>87</sup>	Terjadi konflik antara etnis Georgia dan Ossetia di Ossetia Selatan. Rusia menempatkan pasukan penjaga perdamaian di Ossetia Selatan
4.	1990	Pemilu Parlemen Georgia <sup>88</sup>	Partai koalisi mendominasi parlemen yang dipimpin oleh Zviad Gamsakhurdia, yang merupakan seorang pemberontak.
5.	1990-1991	Konflik gerakan separatis Ossetia Selatan dengan Georgia <sup>89</sup>	Memakan korban ratusan orang, dan mengakibatkan puluhan ribu orang mengungsi.
6.	1991	Kemerdekaan Georgia dari Uni Soviet <sup>90</sup>	

<sup>85</sup> A. Fahrurudji, *Rusia Baru Menuju Demokrasi*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2005, Hal. 140.

<sup>86</sup> Britannica Encyclopedia 2009

<sup>87</sup> "Georgia: Avoiding War in South Ossetia. International Crisis Group". 26 November 2004. ICG Europe Report 159.

<sup>88</sup> Ibid.

<sup>89</sup> Human Rights Watch, *Violations of Humanitarian Law and Human Rights in the Georgia-South Ossetia Conflict*, 1992. Hal 17

<sup>90</sup> Ministry of Foreign Affairs of Georgia, [http://embassy.mfa.gov.ge/index.php?lang\\_id=ENG&sec\\_id=10](http://embassy.mfa.gov.ge/index.php?lang_id=ENG&sec_id=10)

7.	1991	Zviad Gamasakurdia terpilih sebagai Presiden pertama Georgia. <sup>91</sup>	Memenangkan 85% suara pada pemilu Presiden.
8.	Januari 1992	Gamaskhurdia mengundurkan diri. <sup>92</sup>	Terjadi setelah terjadi konflik antara tentara pemerintah dengan tentara oposisi.
9.	Januari 1992	Kemerdekaan Ossetia Selatan <sup>93</sup>	Ossetia Selatan memerdekakan diri dari Georgia secara sepihak melalui sebuah referendum yang tidak diakui.
10.	Maret 1992	Eduard Shevardnadze terpilih sebagai ketua Dewan Negara. <sup>94</sup>	
11.	Agustus 1992	Konflik di Abkhazia <sup>95</sup>	Terjadi konflik antara kelompok separatis di Abkhazia dengan tentara Georgia.
12.	Oktober 1992	E. Shevardnadze terpilih sebagai Ketua Parlemen <sup>96</sup>	
13.	September 1993	Tentara Georgia mundur dari Abkhazia.	Kelompok separatis berhasil mengurris tentara Georgia.
14.	Oktober 1993	Georgia bergabung dengan <i>Commonwealth Independent State (CIS)</i> <sup>97</sup>	Georgia juga mendapatkan bantuan dari tentara Rusia untuk menjaga perdamaian.
15.	1994	Perjanjian damai Abkhazia-Georgia. <sup>98</sup>	Kelompok separatis Abkhazia dan Pemerintah Georgia setuju untuk melakukan gencatan senjata, dan menempatkan pasukan penjaga perdamaian Rusia di Abkhazia.
16.	1994	Penetapan konstitusi baru di Georgia. <sup>99</sup>	Penetapan sistem pemerintahan baru, serta mata

<sup>91</sup> Georgia, Britannica Encyclopedia 2009

<sup>92</sup> *Ibid.*

<sup>93</sup> International Crisis Group, *Russia vs Georgia: The Fallout*, Europe Report No. 195, 22 Agustus 2008. Hal. 30

<sup>94</sup> Georgia, Britannica Encyclopedia 2009

<sup>95</sup> *Loc. Cit.* Timeline: Georgia

<sup>96</sup> *Loc. Cit.* Georgia.

<sup>97</sup> *Loc. Cit.* Georgia

<sup>98</sup> Cornell, *Small Nations and Great Powers*, Hal. 325

			uang Lari.
17.	November 1995	Shevardnadze terpilih kembali sebagai Presiden Georgia <sup>100</sup>	
18.	Maret 2001	Perjanjian damai Abkhazia dengan Pemerintah Georgia <sup>101</sup>	Kedua pihak menyetujui kesepakatan untuk tidak melawan dengan menggunakan kekerasan.
19.	Juni 2001	Penyerahan pangkalan militer Vaziani oleh Rusia kepada Georgia <sup>102</sup>	
20.	Oktober 2001	Konflik di Abkhazia	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terjadi konflik antara kelompok separatis Abkhazia dengan pasukan Georgia yang dibantu oleh pasukan dari Kaukasus Utara.<sup>103</sup></li> <li>• Rusia menuduh Georgia membantu pemberontak Chechen, namun Georgia membantah tuduhan tersebut.<sup>104</sup></li> </ul>
21.	November 2001	Perombakan kabinet Georgia. <sup>105</sup>	Pemerintahan E. Shevardnadze dinilai korup.
22.	April 2002	Bantuan AS kepada Georgia <sup>106</sup>	AS membantu memberikan pelatihan dan mempersenjatai pasukan Georgia.
23.	September 2002	Ancaman serangan militer Rusia ke Georgia <sup>107</sup>	Presiden Putin mengancam akan melakukan serangan militer ke Georgia apa bila masih terus membantu pemberontak Chechen di Lembah Pankisi

<sup>99</sup> *Loc.cit.* Timeline: Georgia

<sup>100</sup> *Ibid.*

<sup>101</sup> *Ibid.*

<sup>102</sup> *Ibid.*

<sup>103</sup> *Ibid.*

<sup>104</sup> Human Rights Watch World Report 2002: Europe & Central Asia: Georgia, <http://hrw.org/wr2k2/europe9.html>

<sup>105</sup> *Loc. Cit.* Georgia

<sup>106</sup> *Loc. Cit.* Timeline: Georgia

<sup>107</sup> *Ibid.*



24.	Oktober 2002	Georgia menyetujui permintaan Rusia <sup>108</sup>	Beberapa pemberontak Chechen ditangkap dan diekstradisi ke Rusia
25.	November 2002	Penggulingan Eduard Shevardnadze <sup>109</sup>	Eduard Shevardnadze digulingkan melalui Revolusi Mawar yang damai.
26.	Januari 2004	Mikhail Saakashvili terpilih menjadi Presiden Georgia <sup>110</sup>	
27.	Maret 2004	Konflik di Ajara <sup>111</sup>	Pemerintah Georgia memberikan sanksi terhadap Ajara serta menutup perbatasan dengan wilayah tersebut.
28.	Maret 2004	Pemilu Parlemen Georgia <sup>112</sup>	Partai Saakashvili (Fron Gerakan Demokrasi Nasional), berhasil mendominasi Parlemen Georgia.
29.	May 2004	Penyelesaian konflik Ajara <sup>113</sup>	Pemimpin Ajara, Aslan Abashidze, mengundurkan diri dan pergi dari Georgia setelah Saakashvili memerintahkannya untuk mematuhi konstitusi Georgia dan melakukan perlucutan senjata.
30.	May 2004	Pemilu Parlemen Ossetia Selatan <sup>114</sup>	Pemilu Parlemen tersebut tidak diakui oleh Pemerintah Georgia
31.	Juni 2004	Pencegahan penyelundupan dari Ossetia Selatan <sup>115</sup>	Pemerintah Georgia meningkatkan penjagaan untuk mencegah penyelundupan di Ossetia Selatan. Hal ini ditanggapi dengan negatif oleh pemimpin

<sup>108</sup> *Ibid.*

<sup>109</sup> *Ibid.*

<sup>110</sup> *Ibid.*

<sup>111</sup> *Ibid.*

<sup>112</sup> *Ibid.*

<sup>113</sup> *Loc. Cit.* International Crisis Group, 2007

<sup>114</sup> *Ibid.*

<sup>115</sup> *Ibid.*

			lokal dan pemerintah Rusia.
32.	Agustus 2004	Konflik di Ossetia Selatan <sup>116</sup>	Konflik terjadi antara pemberontak Ossetia Selatan dengan pasukan Georgia.
33.	Januari 2005	Tawaran status Otonomi kepada Ossetia Selatan <sup>117</sup>	Pemerintah Georgia menawarkan status Otonomi kepada Ossetia Selatan. Tawaran tersebut ditolak dan tetap menginginkan kemerdekaan penuh.
34.	Mei 2005	Kunjungan Presiden AS, George Bush, ke Tblisi	George Bush merupakan Presiden AS pertama yang berkunjung ke Georgia. Bush menyebut Georgia sebagai negara yang memancarkan kebebasan.
35.	Mei 2005	Konflik di Ossetia Selatan	Terjadi konflik yang menewaskan seorang anggota kepolisian Georgia dan empat orang kelompok pemberontak.
36.	Januari 2006	Ledakan pipa gas <sup>118</sup>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terjadi ledakan pipa gas di wilayah perbatasan Rusia dan mengganggu aliran listrik dari Rusia ke Georgia. Rusia mencurigai hal tersebut merupakan perbuatan kelompok pemberontak di Kaukasus Utara, sementara Saakashvili menuduh hal tersebut merupakan aksi sabotase yang dilakukan Pemerintah Rusia.</li> <li>• Akibat ledakan tersebut, Georgia menerima</li> </ul>

<sup>116</sup> *Loc. Cit.* "Georgia- South Ossetia: Conflict chronology"

<sup>117</sup> *Ibid.*

<sup>118</sup> Russia blamed for 'gas sabotage', <http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/4637034.stm>

			pasokan gas dari Iran melalui pipa gas Azerbaijan.
37.	Maret-Mei 2006	Penghentian impor Georgia oleh Rusia <sup>119</sup>	Pemerintah Rusia menghentikan impor anggur dan air mineral dari Georgia karena alasan kesehatan. Pemerintah Georgia menaruh tindakan tersebut bermotif politik.
38.	Mei-Juni 2006	Konflik Rusia-Georgia <sup>120</sup>	Pemerintah Georgia meminta pasukan penjaga perdamaian Rusia yang melakukan rotasi di Ossetia Selatan harus memiliki visa sah.
39.	September 2006	Perundingan Georgia-NATO <sup>121</sup>	Georgia melakukan pendekatan dengan NATO agar dapat menjadi anggota.
40.	September 2006	Penangkapan anggota militer Rusia <sup>122</sup>	Rusia menangkap seorang anggota militernya atas tuduhan mata-mata Georgia, sehingga Rusia menutup jalur transportasi ke Georgia serta mendeportasi ratusan orang Georgia ke negaranya.
41.	November 2006	Referendum Kemerdekaan Ossetia Selatan <sup>123</sup>	Masyarakat Ossetia Selatan melakukan referendum untuk mendeklarasikan kemerdekaan. Referendum ini tidak diakui oleh Pemerintah Georgia.
42.	Agustus 2007	Georgia menuduh Rusia telah melanggar batas wilayah udaranya dengan masuknya kapal Rusia ke Georgia sebanyak dua kali. <sup>124</sup>	Pemerintah Rusia membantah semua tuduhan Georgia.

<sup>119</sup> *Loc. Cit.* Timeline: Georgia

<sup>120</sup> *Loc. Cit.* "Georgia- South Ossetia: Conflict chronology"

<sup>121</sup> *Loc. Cit.* Timeline: Georgia

<sup>122</sup> *Ibid.*

<sup>123</sup> *Ibid.*

<sup>124</sup> *Ibid.*

43.	September 2007	Demonstrasi terhadap Saakashvili <sup>125</sup>	Terjadi demonstrasi terhadap Mikhail Saakashvili atas tuduhan korupsi dan melakukan rencana pembunuhan.
44.	November 2007	Keadaan darurat negara Georgia <sup>126</sup>	Pemerintah Georgia menyatakan keadaan darurat setelah terjadi bentrokan antara polisi dengan demonstran yang menuntut Saakashvili mundur sebagai Presiden.
45.	November 2007	Penarikan Pasukan Rusia <sup>127</sup>	Rusia menyatakan telah menarik mundur seluruh pasukannya yang berada di Georgia, kecuali di wilayah yang ingin memisahkan diri, Ossetia Selatan dan Abkhazia
46.	Desember 2007	Kritikan tindakan Pemerintah Georgia terhadap demonstran <sup>128</sup>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Human Rights Watch</i> mengkritik sikap Pemerintah Georgia yang terlalu keras terhadap para demonstran yang terjadi bulan November.</li> <li>• International Crisis Group memperingatkan terhadap berkembangnya pemerintahan otoritarianisme di Georgia.</li> </ul>
47.	Januari 2008	Saakashvili terpilih kembali sebagai Presiden Georgia <sup>129</sup>	
48.	Februari 2008	Kemerdekaan Kosovo <sup>130</sup>	Kosovo mendeklarasikan kemerdekaannya dan mendapatkan pengakuan dari sejumlah negara. Hal ini

<sup>125</sup> *Ibid.*

<sup>126</sup> *Loc. Cit.* Der Spiegel

<sup>127</sup> *Loc Cit.* Timothy L. Thomas. Hal. 59

<sup>128</sup> *Ibid.*

<sup>129</sup> *Ibid.*

<sup>130</sup> *Loc. Cit.* Timeline: Georgia

			memicu Ossetia Selatan untuk melakukan hal serupa untuk mendapatkan pengakuan internasional.
49.	Maret 2008	Permintaan pengakuan Abkhazia kepada PBB <sup>131</sup>	Kelompok separatisme di Abkhazia mengajukan permintaan terhadap PBB untuk mengakui kemerdekaannya.
50.	April 2008	Perundingan keanggotaan Georgia pada NATO <sup>132</sup>	Pada KTT NATO di Bucharest, disepakati pembahasan keanggotaan Georgia pada NATO akan dilakukan pada bulan Desember.
51.	April 2008	Peringatan Rusia terhadap Georgia <sup>133</sup>	Rusia memperingatkan Georgia untuk tidak melibatkan NATO dalam menyelesaikan masalah separatis di Abkhazia dan Ossetia Selatan.
52.	April 2008	Dugaan serangan Georgia ke Abkhazia <sup>134</sup>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menlu Rusia menyatakan bahwa Georgia dapat sewaktu-waktu melakukan serangan ke Abkhazia.</li> <li>• Rusia akan melindungi rakyatnya yang berada di Abkhazia dan Ossetia Selatan dengan cara apapun.</li> </ul>
53.	April 2008	Peningkatan hubungan Rusia dengan Abkhazia dan Ossetia Selatan <sup>135</sup>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sikap Rusia yang mempererat hubungan dengan Abkhazia dan Ossetia Selatan membuat Georgia menuduh Rusia akan melakukan aneksasi terhadap kedua wilayah</li> </ul>

<sup>131</sup> *Loc Cit.* Timothy L. Thomas. Hal. 60

<sup>132</sup> *Ibid.*

<sup>133</sup> *Loc. Cit.* Timeline: Georgia

<sup>134</sup> *Ibid.*

<sup>135</sup> *Loc. Cit.* International Crisis Group, 2011

			tersebut. <ul style="list-style-type: none"> <li>• NATO juga menyatakan bahwa Rusia sengaja melakukan tersebut untuk memperburuk hubungan Rusia-Georgia.</li> </ul>
54.	Mei 2008	Pengiriman pasukan Rusia ke Abkhazia (tanpa senjata) <sup>136</sup>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Georgia menuduh pengiriman pasukan tersebut merupakan rencana intervensi militer yang akan dilakukan oleh Rusia.</li> <li>• Rusia membantah tuduhan tersebut, karena hanya mengirimkan pasukan tanpa senjata.</li> <li>• Menlu AS menyatakan kekhawatirannya terhadap peningkatan pasukan Rusia di Abkhazia.</li> </ul>
55.	Mei 2008	Permintaan penghentian bantuan militer NATO kepada Georgia <sup>137</sup>	Kepala Pertahanan Rusia, Yuri Baluyevsky menuduh NATO membantu mempersenjatai Georgia. AS, Turki, Czech dan Bulgaria dianggap sebagai pemasok utama di Georgia.
56.	Juni 2008	Abkhazia memutuskan hubungan dengan Pemerintah Georgia <sup>138</sup>	Alasan pemutusan hubungan tersebut karena Abkhazia menuduh Pemerintah Georgia telah melakukan beberapa serangan di wilayahnya, namun Georgia membantah semua tuduhan tersebut.
57.	Juni 2008	Tawaran bantuan UE <sup>139</sup>	UE akan mencoba untuk meredakan ketegangan yang terjadi antara Rusia-Georgia terkait masalah di Ossetia

<sup>136</sup> *Loc. Cit.* Timothy L. Thomas. Hal. 60

<sup>137</sup> *Loc. Cit.* Timeline: Georgia

<sup>138</sup> *Ibid.*

<sup>139</sup> *Loc. Cit.* Timothy L. Thomas. Hal. 60

			Selatan dan Abkhazia.
58.	Juni 2008	Pertemuan Medvedev – Saakashvili <sup>140</sup>	Medvedev bertemu dengan Saakashvili untuk membicarakan permasalahan di Ossetia Selatan dan Abkhazia, namun tidak mencapai kesepakatan.
59.	Juli 2008	Georgia menuduh Rusia telah melanggar batas wilayah udaranya. <sup>141</sup>	Rusia mengakui 4 pesawatnya terbang di wilayah Ossetia Selatan, Georgia. Pengakuan ini membuat Georgia menarik Dubesnya di Rusia.
60.	Juli 2008	Terjadi ledakan dan serangan di Abkhazia dan Ossetia Selatan <sup>142</sup>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ledakan yang terjadi di Sukhumi dan pos pasukan penjaga perdamaian Rusia di wilayah perbatasan Abkhazia-Georgia. Pemerintah Rusia menyatakan pasukan khusus Georgia bertanggung jawab atas serangan tersebut.</li> <li>• Kelompok separatis Ossetia Selatan menuduh pasukan Georgia melakukan penembakan terhadap desa di sekitar kota Tskhinvali, namun pasukan Georgia membantah dan menuduh bahwa kelompok separatis yang melakukan serangan.</li> </ul>
61.	Juli 2008	Persiapan Rusia di perbatasan Rusia-Georgia <sup>143</sup>	Sehubungan dengan terjadinya serangan terhadap pasukan penjaga perdamaian Rusia di Georgia, maka Rusia mempersiapkan pasukan untuk membantu pasukan penjaga

<sup>140</sup> *Loc. Cit.* Timeline: Georgia

<sup>141</sup> *Loc. Cit.* Der Spiegel

<sup>142</sup> *Loc. Cit.* Timothy L. Thomas Hal. 62

<sup>143</sup> *Ibid.*

			perdamaian jika terjadi serangan kembali.
62.	Agustus 2008	Konflik di Ossetia Selatan <sup>144</sup>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Konflik antara kelompok separatisme Ossetia Selatan dan Georgia menjadi besar akibat tentara militer Georgia menyerang wilayah tersebut untuk mengambil alih kembali Ossetia Selatan dari kelompok pemberontak yang mendapatkan dukungan Rusia.</li> <li>• Pasukan Georgia juga menewaskan pasukan penjaga perdamaian Rusia.</li> <li>• Rusia melakukan serangan balik dan mengusir pasukan Georgia dari Ossetia Selatan dan Abkhazia.</li> <li>• Georgia menyatakan telah mengajukan kesepakatan damai dan akan menarik mundur seluruh pasukannya, namun Rusia menyatakan tidak melihat adanya penarikan mundur yang dijanjikan Georgia.</li> <li>• Korban tewas pada konflik tersebut diperkirakan mencapai 2000 orang.</li> </ul>
63.	Agustus 2008	Ossetia Selatan dan Abkhazia mendeklarasikan kemerdekaannya <sup>145</sup>	Kemerdekaan Abkhazia dan Ossetia Selatan mendapatkan dukungan dan pengakuan dari Rusia dan Nicaragua.

<sup>144</sup> *Ibid.* Hal. 63

<sup>145</sup> *Loc. Cit.* Timeline: Georgia



			Pengakuan Rusia tersebut mendapatkan kecaman dari negara-negara Eropa Barat dan AS.
64.	Agustus 2008	Perancis berusaha menyelesaikan konflik <sup>146</sup>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sebagai ketua UE pada saat itu, Perancis mencoba melakukan perundingan dengan Presiden Rusia untuk membahas cara penyelesaian konflik di Georgia.</li> <li>• Rusia menyetujui permintaan Perancis untuk menarik mundur seluruh pasukannya dari Georgia pada posisi sebelum terjadinya konflik, namun akan tetap menempatkan pasukan penjaga perdamaian di wilayah Abkhazia dan Ossetia Selatan.</li> </ul>
65.	April 2009	Desakan mundur terhadap Saakashvili <sup>147</sup>	Rakyat Georgia mendesak Saakashvili untuk mundur sebagai Presiden. Mereka tidak ingin konflik dengan Ossetia Selatan dan Abkhazia yang melibatkan Rusia itu terus berlanjut.
66.	May 2009	Percobaan kudeta terhadap Saakashvili <sup>148</sup>	Rusia dituduh berada dibalik rencana kudeta Saakashvili, namun Rusia membantah tuduhan tersebut.
67.	Juni 2009	Latihan militer NATO di Georgia <sup>149</sup>	Rusia mengecam aksi latihan militer yang dilakukan NATO di Georgia.
68.	Juli 2009	Pengamat PBB meninggalkan	Pengamat PBB meninggalkan

<sup>146</sup> *Loc. Cit.* Der Spiegel

<sup>147</sup> Damien McGuinness, *Georgia: Anti-Saakashvili protesters vow to continue*, <http://www.bbc.co.uk/news/world-europe-13499227>

<sup>148</sup> *Loc. Cit.* Timeline: Georgia

<sup>149</sup> *Ibid.*

		Abkhazia <sup>150</sup>	Abkhazia setelah berada selama 16 tahun. Dewan Keamanan PBB tidak dapat memperpanjang misinya karena mendapatkan veto Rusia.
69.	Juli 2009	Dukungan AS terhadap keanggotaan Georgia pada NATO <sup>151</sup>	Dalam kunjungan Wapres AS Joe Biden ke Georgia, ia mengatakan bahwa AS akan mendukung penuh usaha Georgia untuk menjadi anggota NATO.

Dari tabel diatas, terlihat bahwa konflik antara Georgia dengan Ossetia Selatan sudah terjadi sejak tahun 1989 ketika Ossetia Selatan menuntut untuk menjadi sebuah negara yang merdeka dan berdaulat terpisah dari Georgia. Pada tahun 1990 hingga tahun 1991 juga terjadi kembali konflik yang menimbulkan ratusan jiwa korban tewas. Kemerdekaan Georgia dari Uni Soviet pada tahun 1991 membuat Ossetia juga ikut melakukan sebuah referendum untuk memisahkan diri dari Georgia secara sepihak pada tahun 1992. Georgia bergabung menjadi anggota *Commonwealth of Independent States* (CIS) pada tahun 1993 dan mendapatkan bantuan pasukan penjaga perdamaian dari Rusia untuk menjaga perdamaian di wilayah konflik yang berada di antara kedua negara.

Keadaan di wilayah Ossetia Selatan antara tahun 1993 hingga tahun 2004 cenderung stabil, tanpa terjadi konflik dengan Pemerintah Georgia. Mikhail Saakashvili yang terpilih sebagai Presiden Georgia pada tahun 2004 memiliki program untuk mengambil alih wilayah kedaulatan Georgia yang dikuasai oleh kelompok pemberontak, antara lain di wilayah Ossetia Selatan, Ajaria, dan Abkhazia. Keberhasilan dalam menyelesaikan masalah di Ajaria membuat Pemerintah Georgia merasa percaya diri untuk menyelesaikan masalah serupa di wilayah lain. Sejak kepemimpinan Mikhail Saakashvili, Georgia dan Rusia mulai terlibat konflik mengenai permasalahan di wilayah Ossetia Selatan. Selain itu,

<sup>150</sup> *Ibid.*

<sup>151</sup> Biden pledges support for Georgia, <http://news.bbc.co.uk/2/hi/8163876.stm>

masalah diantara kedua negara tersebut memburuk dengan keinginan Georgia menjadi anggota NATO.

Perundingan Georgia dengan kelompok separatis di wilayah Ossetia Selatan tidak pernah mencapai kata sepakat. Kedekatan hubungan Georgia dengan Amerika Serikat membuat Georgia terlalu percaya diri untuk menyelesaikan permasalahan di Ossetia Selatan dengan menggunakan kekerasan. Aksi yang dilakukan oleh Georgia tersebut memicu Rusia untuk menyerang ke wilayah Ossetia Selatan, karena tentara Georgia membunuh pasukan penjaga perdamaian Rusia di wilayah tersebut. Konflik yang pada awalnya merupakan konflik internal di dalam wilayah Georgia, namun dengan membunuh pasukan penjaga perdamaian serta penduduk berpaspor Rusia di wilayah Ossetia Selatan membuat konflik ini membesar dan menjadi perhatian internasional. Uni Eropa melalui Presiden Perancis langsung menyerukan gencatan kepada kedua negara untuk segera menyelesaikan konflik. Akibat dari konflik ini Ossetia Selatan akhirnya memerdekakan diri dan mendapat pengakuan dari Rusia.

### BAB III

## ANALISIS KONFLIK GEORGIA DENGAN RUSIA

### 3.1 Kebijakan Luar Negeri Georgia

Georgia yang secara geografis terletak diantara Laut Hitam, Rusia dan Turki memiliki nilai strategis, karena sebagai pintu gerbang menuju Laut Hitam bagi negara-negara yang berada di sebelah timur dan Selatan Georgia, serta menjadi *buffer zone* bagi Rusia dan Turki. Georgia memiliki nilai-nilai yang menjadi acuan dalam kebijakan luar negerinya, antara lain menjadi negara yang merdeka, aman dan stabil, serta kemakmuran dan demokrasi.<sup>152</sup> Dalam usaha menjadikan negara yang aman, Georgia tentu harus meningkatkan kemampuan pertahanannya untuk menjaga keamanan di dalam wilayahnya, maupun ancaman dari luar. Keadaan negara yang aman akan membuat kondisi negara juga cenderung lebih stabil tanpa adanya pergolakan ataupun usaha-usaha untuk memperlemah kekuasaan pemerintah pusat. Dengan kondisi negara yang stabil maka kegiatan perekonomian akan dapat berjalan dengan baik, sehingga diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan perekonomian dalam negeri. Ketika negara sudah berada dalam kondisi perekonomian yang cukup baik, maka proses demokrasi diharapkan dapat berjalan dengan baik.

Sebagai sebuah negara yang dapat terbilang kecil, Georgia tidak banyak memiliki sumber daya alam jika dibandingkan dengan negara tetangganya. Hal ini membuat angka perdagangan Georgia dengan negara disekitarnya relatif kecil.<sup>153</sup> Namun karena letak geografis yang strategis, Georgia berperan sebagai jalur transit perdagangan antara Turki, Rusia dan negara-negara di kawasan Asia Tengah. Untuk memperlancar kegiatan perekonomian, Georgia berusaha untuk mempermudah investor asing untuk melakukan investasi ataupun melakukan kegiatan perekonomian. Bank Dunia bahkan menjuluki Georgia sebagai negara paling reformis dalam bidang ekonomi karena terbukti berhasil menduduki peringkat 18 (peringkat 112 pada tahun 2005) dalam “Kemudahan Melakukan

---

<sup>152</sup> “Georgia Foreign Policy Strategy”, [http://embassy.mfa.gov.ge/files/Documents/Strategy2006\\_2009.pdf](http://embassy.mfa.gov.ge/files/Documents/Strategy2006_2009.pdf)

<sup>153</sup> Ekspor utama Georgia adalah Anggur, yang sebagian besar diekspor ke Rusia.

Bisnis” pada tahun 2007.<sup>154</sup> Capaian dalam bidang perekonomian tersebut juga terbukti pada pesatnya pertumbuhan perekonomian yang mencapai 12% pada tahun 2007.<sup>155</sup>

Kebijakan luar negeri suatu negara tidak dapat dilepaskan dari kepentingan nasional negara tersebut dalam interaksinya dengan negara-negara lain di dalam sistem internasional. Setiap negara dalam menjalankan pemerintahannya memiliki kepentingan-kepentingan yang harus di jaga dan tercapai di berbagai bidang. Kepentingan-kepentingan ini juga dipengaruhi oleh kondisi geografis negara, politik dalam negeri, ketergantungan antar negara serta keamanan regional. Kepentingan nasional Georgia antara lain sebagai berikut:<sup>156</sup>

1. Menjaga kedaulatan dan integritas wilayah;
2. Mengembangkan institusi negara dan memperkuat demokrasi;
3. Perkembangan sistem keamanan nasional;
4. Meningkatkan persatuan dan kesadaran masyarakat;
5. Menjaga kestabilan pertumbuhan ekonomi jangka panjang;.
6. Menjaga ketahanan energi;
7. Menjaga kestabilan regional;
8. Memperkuat peran Georgia sebagai negara transit;
9. Menjaga ketahanan lingkungan hidup Georgia.
10. Menjaga integrasi dan mempertahankan keunikan budaya;
11. Memperkuat keamanan dunia maya;
12. Keamanan demografis.

Melihat dari kepentingan-kepentingan nasional Georgia tersebut, Georgia dengan cara apapun akan menjaga integritas wilayahnya. Hal ini membuat Georgia untuk memprioritaskan usaha pengambil alihan wilayah-wilayah yang dikuasai oleh kelompok separatis. Georgia seharusnya menggunakan cara-cara damai dan sesuai dengan hukum untuk mengembalikan dan menjaga integritas wilayahnya serta menjaga wilayah perbatasannya yang sudah diakui melalui hukum internasional.<sup>157</sup> Namun Georgia memiliki pertimbangan lain untuk

<sup>154</sup> Doing Business Rank, <http://www.doingbusiness.org/EconomyRankings/Georgia.htm>

<sup>155</sup> CIA Fact Boks, <https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/gg.html>

<sup>156</sup> Georgia National Security Concept, [http://embassy.mfa.gov.ge/files/-Documents/National\\_Security\\_Concept\\_-\\_E.doc](http://embassy.mfa.gov.ge/files/-Documents/National_Security_Concept_-_E.doc)

<sup>157</sup> *Ibid.*

menggunakan kekerasan dalam menyelesaikan masalah di Ossetia Selatan. Kedekatan hubungan Georgia dengan Amerika Serikat membuat mereka merasa terlalu percaya diri dengan apa yang dilakukannya pada saat itu.

Kedekatan hubungan Georgia dengan Amerika Serikat ditujukan untuk membantu penerapan proses di Georgia, dimana Amerika Serikat merupakan negara yang memiliki sistem demokrasi yang sudah cukup maju. Georgia bertujuan untuk menciptakan model pemerintahan di Georgia yang dapat memberikan perkembangan berkelanjutan pada sistem politik demokrasi. Tujuan Georgia adalah memperkuat institusi demokrasi yang dapat menciptakan *rule of law*, perlindungan HAM, dan kebebasan berpendapat, berpikir, beragama dan berkeyakinan, sehingga diperlukan untuk membangun nilai-nilai demokrasi pada kehidupan bermasyarakat untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap demokrasi dan kepercayaan terhadap institusi negara.<sup>158</sup>

Kedekatan hubungan Georgia dengan Amerika Serikat ini juga dimanfaatkan untuk meningkatkan dan mengembangkan sistem keamanan nasional Georgia. Georgia berusaha untuk menciptakan sistem keamanan yang dapat menjamin keamanan dan perkembangan negara serta seluruh rakyat Georgia. Dengan adanya wilayah-wilayah yang dikuasai oleh kelompok separatis, serta ketidakmampuan pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan tersebut, maka Georgia meminta dukungan negara lain dalam hal penyelesaian masalah kelompok separatis. Selain itu, Georgia juga telah bekerja sama dengan Rusia untuk menyelesaikan masalah tersebut dengan melakukan penempatan pasukan penjaga perdamaian untuk menjaga agar wilayah tersebut dalam keadaan aman dan stabil.<sup>159</sup> Georgia dan Rusia sama-sama berkepentingan menjaga stabilitas keadaan di wilayah tersebut.

Selanjutnya, dalam meningkatkan perekonomian dalam negeri, Georgia berusaha untuk melakukan kerja sama dalam bidang investasi dan perdagangan dengan berbagai negara, baik secara bilateral, regional, maupun multilateral. Hal ini juga berkaitan dengan ketahanan pangan dan energi yang akan berdampak langsung terhadap sektor perekonomian. Untuk lebih meningkatkan

---

<sup>158</sup> Seven Questions: Georgia's Special Relationship, [http://www.foreignpolicy.com/articles/2009/01/08/seven\\_questions\\_georgias\\_special\\_relationship](http://www.foreignpolicy.com/articles/2009/01/08/seven_questions_georgias_special_relationship)

<sup>159</sup> *Loc. Cit.* Timothy L. Thomas. Hal. 32

perekonomiannya, prioritas utama Georgia adalah menciptakan kondisi yang stabil untuk peningkatan pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Pemerintah Georgia juga menjamin perkembangan ekonomi secara bebas, memperluas kerja sama perekonomian negan setiap negara, peningkatan arus investasi masuk, serta kebijakan fiskal dan moneter yang konservatif.<sup>160</sup> Saat ini salah satu usaha yang dapat dilakukan untuk mempercepat pertumbuhan perekonomian Georgia adalah bergabung dengan Uni Eropa, walaupun dirasa masih cukup jauh untuk dapat tercapai.

Georgia berkeinginan untuk menjadi bagian dari struktur Eropa dan Euro-Atlantik untuk dapat memperkuat demokrasi dan keamanan nasional. Georgia berpegang teguh terhadap prinsip kebebasan untuk memilih arah strateginya sendiri untuk pembanngunan di masa mendatang termasuk memilih dengan siapa mereka akan beraliansi.<sup>161</sup> Untuk itu Georgia ingin memperluas hubungan regionalnya dengan menjadi anggota organisasi pertahanan NATO untuk memperkuat keamanan nasionalnya. Namun rencananya untuk menjadi anggota NATO justru membuat keamanan regional menjadi tidak stabil karena Georgia berbatasan langsung dengan Rusia, dimana Rusia selalu menentang perluasan NATO ke timur, terlebih lagi dengan negara yang berbatasan langsung dengan Rusia.<sup>162</sup>

Perkembangan yang terjadi di Eropa, wilayah Laut Hitam, Kaukasus, dan Asia Tengah secara langsung akan berpengaruh terhadap keamanan nasional Georgia. Hal ini membuat Georgia berkepentingan untuk menjaga agar segala perselisihan yang terjadi di wilayah tersebut dapat diselesaikan dengan cara damai tanpa menggunakan kekerasan. Kontribusi Georgia dalam menjaga keamanan regional adalah melalui kerja sama yang dilakukan dalam kerangka bilateral dan multilateral.<sup>163</sup> Pada tahun 2002, Georgia membentuk sebuah program *Georgia Train and Equip Programme* (GTEP) yang mendapat dukungan penuh oleh Amerika Serikat.<sup>164</sup> Dukungan Amerika tersebut berupa pemberian peralatan,

---

<sup>160</sup> *Ibid.*

<sup>161</sup> *Ibid.* Hal. 35

<sup>162</sup> *Ibid.*

<sup>163</sup> *Op. Cit.* Cornell. Hal. 160

<sup>164</sup> U.S. Announces New Military Assistance Program for Georgia,  
<http://www.civil.ge/eng/article.php?id=8271>

seperti senjata dan amunisi, peralatan komunikasi, perlengkapan pelatihan, peralatan medis, dan berbagai material bahan konstruksi. Program dibentuk dengan tujuan sebagai usaha untuk melawan terorisme serta meningkatkan keamanan dan stabilitas di kawasan.<sup>165</sup>

### 3.2 Kebijakan Luar Negeri Rusia

Salah satu kebijakan luar negeri Rusia yang menjadi masa pemerintahan Vladimir Putin adalah mengedepankan kepentingan Rusia sebagai negara besar dan salah satu negara yang memiliki pengaruh besar dalam dunia internasional dengan meningkatkan pertahanan negara, menjaga kedaulatan dan kesatuan negara serta memiliki posisi yang kuat, sehingga dapat mendukung perkembangan dalam negeri.<sup>166</sup>

Semasa pemerintahan Putin, Rusia telah berhasil kembali menunjukkan kekuatannya yang sempat hilang pada masa pecahnya Uni Soviet. Ia berhasil melakukan reformasi dalam berbagai bidang dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Rusia dengan sangat cepat dan dalam waktu yang relatif singkat. Hal ini dilakukan dengan cara melakukan nasionalisasi berbagai perusahaan migas di Rusia. Selain itu, Rusia juga diuntungkan dengan melonjaknya harga migas pada saat itu. Pada tahun 2007, Rusia bahkan telah berhasil melunasi seluruh hutang luar negerinya.<sup>167</sup> Pesatnya pertumbuhan perekonomian tersebut membuat Rusia dapat melakukan modernisasi dalam bidang pertahanan. Hal ini ditunjukkan antara lain dengan kembali dioperasikannya pesawat bomber yang berpatroli di sekitar perbatasan Rusia serta serangan Rusia ke Ossetia Selatan dan Abkhazia.

Pada masa pemerintahan Dmitry Medvedev, ia menambahkan beberapa hal dalam kebijakan luar negeri Rusia, antara lain menciptakan kondisi eksternal yang memungkinkan terjadinya proses modernisasi di Rusia, melakukan transformasi dan inovasi dalam bidang ekonomi, memperkuat hubungan antar masyarakat, memperkuat sistem konstitusi, kepastian hukum, demokratisasi, perlindungan HAM serta memastikan Rusia berperan aktif dalam dunia

<sup>165</sup> Global Security, *Georgia Train and Equip Programme (GTEP)*, <http://www.globalsecurity.org/military/ops/gtep.htm>

<sup>166</sup> Russian Ministry of Foreign Affairs, "Kontseptsiya Vneshnei Politiki Rossiskoi Federatsii," 2000, <http://lm.mid.ru/ns-osndoc.nfs/>

<sup>167</sup> Simon Saragih. *Bangkinya Rusia*. Jakarta: Kompas Group. 2008



internasional.<sup>168</sup> Dengan program-program yang dicanangkan oleh Medvedev tersebut, Rusia diprediksikan dalam beberapa tahun ke depan dapat menjadi salah satu pemain utama dalam dunia internasional, meskipun masih mendapat berbagai kritik mengenai HAM dan demokrasi di Rusia.

Dalam sebuah wawancara setelah terjadinya konflik Georgia-Rusia pada bulan Agustus 2008, Medvedev mengatakan lima hal yang menjadi dasar utama kebijakan luar negeri Rusia, atau disebut juga dengan doktrin Medvedev antara lain:<sup>169</sup>

1. Rusia menjalankan politik luar negerinya sesuai dengan hukum internasional yang saat ini sudah berlaku dalam menjalin hubungan antar negara.
2. Dunia ini harus multi polar. Rusia tidak menginginkan dunia ini diatur oleh satu kekuatan tertentu.
3. Rusia tidak menginginkan terjadinya konfrontasi dengan negara manapun dan Rusia bermaksud ingin menjalin hubungan baik dengan setiap negara.
4. Prioritas utama Rusia adalah melindungi warganya dimanapun mereka berada dan melindungi kepentingannya diluar negeri. Rusia mengancam akan bertindak tegas terhadap siapapun yang mengancam warganya.
5. Rusia memiliki kepentingan di dalam suatu wilayah tertentu, dimana di wilayah tersebut terdapat negara-negara yang sudah terjalin hubungan baik serta negara yang memiliki hubungan khusus secara historis, khususnya negara anggota CIS.

Melalui wawancara tersebut, Presiden Medvedev kembali menegaskan bahwa Rusia dalam menjalankan politik luar negerinya selalu sesuai dan mematuhi hukum internasional yang berlaku. Apa bila Rusia melanggar maka akan siap untuk diberikan sanksi, baik oleh dunia internasional maupun PBB. Selanjutnya Rusia juga tidak menginginkan adanya satu kekuatan tersendiri yang mendominasi dunia. Hal tersebut dapat diartikan bahwa Amerika Serikat yang

<sup>168</sup> Jeffery Mankoff. *Russian Foreign Policy*. Maryland: Rowman and Littlefield Inc. 2009. Hal. 33.

<sup>169</sup> Goerge Friedman, "The Medvedev Doctrine and American Strategy", *Stratfor Geopolitical Intelligence Report*, 2 September 2008  
[http://www.stratfor.com/weekly/medvedev\\_doctrine\\_and\\_american\\_strategy](http://www.stratfor.com/weekly/medvedev_doctrine_and_american_strategy).

saat ini merupakan salah satu kekuatan atau polar dunia, harus memiliki penyeimbang agar tidak mendominasi dunia. Rusia dianggap mampu berperan suatu kekuatan atau polar sendiri sebagai penyeimbang Amerika Serikat.<sup>170</sup>

### 3.3 Perluasan NATO ke Timur

Serangan udara NATO terhadap Yugoslavia di Kosovo merupakan titik rendah dalam hubungan antara Rusia dengan organisasi yang dahulu merupakan musuh utamanya. Namun demikian, walaupun permusuhan tersebut berubah menjadi persahabatan setelah berakhirnya Perang Dingin. Hubungan itu diwarnai ketegangan-ketegangan seperti Kosovo, pertanyaan seputar relevansi NATO paska-Perang Dingin, dan terutama perluasan NATO ke timur. Pada tahun 1999 NATO menerima Polandia, Hungaria, dan Republik Ceko sebagai anggota baru dan kemudian pada tahun 2004 tiga negara Baltik bekas Uni Soviet (Lithuania, Latvia dan Estonia) beserta Bulgaria, Rumania, Slovakia dan Slovenia ikut bergabung ke dalam NATO. Secara resmi Pemerintah Rusia pada bulan Mei 2002 melalui Kepala Staf Angkatan Bersenjata Rusia, Yuri Baluyevsky, mengatakan bahwa Rusia tidak takut menghadapi perluasan NATO apabila para anggota baru tidak mengancam keamanan nasional Rusia dan menggunakan infrastruktur NATO untuk menggelar persenjataan strategis.<sup>171</sup> Namun perluasan NATO secara implisit menimbulkan pertanyaan apakah Barat sudah menjadi mitra bagi Rusia atau masih dianggap sebagai ancaman sehingga memperluas keanggotaannya ke wilayah Eropa Timur yang mendekati Rusia.

Pada bulan Desember 1991 NATO meresmikan *North Atlantic Cooperation Council* atau NACC sebagai forum untuk dialog politik, konsultasi, dan kerja sama dalam rangka menjalin hubungan yang baru dengan negara-negara Eropa Tengah dan Timur.<sup>172</sup> NACC yang kemudian berubah menjadi *Euro-Atlantic Partnership Council* (EAPC) merupakan langkah awal dalam menjalin hubungan yang baik antara NATO dengan Rusia ke depannya. Hubungan antara NATO dengan Rusia juga diperkuat oleh Bill Clinton dalam program *Partnership*

<sup>170</sup> *Ibid.*

<sup>171</sup> Gordon Hendrickson, "The Future of NATO-Russia Relations", *The Atlantic Council of the United States Occasional Paper*, 2005. Hal. 12.

<sup>172</sup> Nato Handbook, "The North Atlantic Cooperation Council", <http://www.nato.int/docu/handbook/2001/hb020201.htm>.

*for Peace* (PfP) yang ditujukan kepada negara-negara bekas Uni Soviet dan Pakta Warsawa. PfP ditujukan sebagai sebuah program kerja sama pertahanan dan keamanan antara NATO dengan negara-negara Mitra dan sebagai batu loncatan untuk keanggotaan negara-negara tersebut ke dalam NATO. Tujuan dari PfP antara lain untuk meyakinkan negara-negara Eropa Tengah dan Timur akan keamanan mereka serta untuk mencegah destabilisasi di Rusia yang sedang mengalami krisis domestik pada saat itu.<sup>173</sup>

Tidak dapat dipungkiri, beberapa kebijakan yang digagas oleh Gorbachev sebelum Uni Soviet bubar justru memberikan ruang gerak yang lebih luas kepada negara-negara Warsawa untuk perlahan-lahan melepaskan diri dari pengaruh Soviet. Sebagai contoh *Strategic Defense Initiative* (pengurangan senjata dan kekuatan personel militer secara sepihak oleh Uni Soviet) yang digagas oleh Gorbachev untuk meredam ketegangan yang terjadi selama perang dingin<sup>174</sup>, dilanjutkan dengan penanda-tanganan traktat CFE (*Treaty of Conventional Armed Forces*)<sup>175</sup> 19 November 1990 di Paris semakin meminimalisir pengaruh Soviet di negara-negara satelitnya.

Kemudian keadaan ini semakin diperburuk dengan kebijakan *Glasnost*/ keterbukaan yang semulanya diharapkan mampu menjadi mesin penggerak *Perestroika*/ restrukturisasi disegala bidang untuk melahirkan *Demokratizatsiya*/ Demokrasi di Uni Soviet justru dijadikan kesempatan bagi gerakan separatis untuk penentuan nasib sendiri menuju peta kemerdekaan. Munculnya etnonasionalisme di Cekoslowakia yang kelak berujung pada pemisahan ke dua negara tersebut, tuntutan Baltik yang ingin segera melepaskan diri, diikuti oleh negara-negara satelit lainnya, termasuk Rusia tidak mampu membuat Uni Soviet mempertahankan keutuhan kedaulatannya. Kondisi perekonomian Soviet yang kian terpuruk, ditambah dengan semakin memburuknya citra komunisme di mata negara-negara di Eropa Tengah, Eropa Timur dan dunia internasional, akhirnya membuat Gorbachev harus rela membiarkan beberapa negara serikatnya melepaskan diri dengan harapan selain mengubah pandangan orang terhadap

<sup>173</sup> Donaldson & Noguee, *The Foreign Policy of Russia*, New York: M.E. Sharpe, Inc. 2009, Hal. 230

<sup>174</sup> *Ibid.* Hal 235

<sup>175</sup> Traktat ini mengatur batas maksimal kepemilikan instrumen militer bagi pihak-pihak peratifikasi dan melarang adanya intervensi militer satu sama lain di wilayah kedaulatannya.

komunis (yang identik dengan penanaman ideologi melalui kekerasan dan penindasan). Uni Soviet juga dapat memperoleh manfaat dari perkembangan industrialisasi Eropa Timur yang kelak ditopang oleh Eropa Barat.<sup>176</sup>

Setelah Uni Soviet pecah, Rusia terpaksa mewarisi otoritas atas pengelolaan administratifnya. Sayangnya ketika Rusia berusaha mengembalikan kedigdayaannya kembali di kawasan eks-Warsawa, pada saat yang bersamaan NATO justru sengaja membuka kesempatan keanggotaan. Hal ini merupakan tantangan yang sangat berat, mengingat citra NATO sebagai aliansi pemenang Perang Dingin yang bertolak belakang dengan citranya sebagai negara pewaris kekuatan agresor Uni Soviet. Pada bab ini akan dikemukakan reaksi Rusia ketika diperhadapkan dengan kenyataan bahwa *sphere-sphere* nya justru bergabung dengan aliansi rivalnya.

Pada tahun-tahun pertama pasca kemerdekaannya dari Uni Soviet, Rusia masih terlampau pasif dalam menyikapi hubungannya dengan negara-negara yang juga baru saja merdeka. Rusia lebih memprioritaskan reformasi ekonomi domestiknya ketimbang mengembalikan kekuatan pertahanan militernya. Penarikan pasukan dari beberapa wilayah di Eropa Tengah dan Timur hingga pada pusat kekuatan militernya sempat mewarnai tahun-tahun Rusia.<sup>177</sup>

Namun menjelang tahun 1993, melalui berbagai kritikan dari oposisi pemerintahan, terjadi perubahan yang signifikan pada kebijakan luar negeri Rusia, mulai bangkit kewaspadaan pemerintahan Yeltsin terhadap keamanan *sphere of interest*-nya. Rusia khawatir apabila muncul oknum-oknum tertentu yang berasal dari negara-negara yang baru saja merdeka di perbatasannya yang mencoba untuk memperlemah posisi Rusia. Dari sinilah *turning point* kebangkitan Rusia yang sedang meredefinisikan identitas dan perannya di dunia internasional. Rusia kian aktif dalam mengintegrasikan kembali negara-negara eks-Soviet.

Usaha Rusia sudah dimulai sejak pembentukan *Commonwealth of Independent States* (CIS) pada akhir tahun 1991 bersama-sama dengan Ukraina dan Belarus. CIS dibentuk untuk memfasilitasi kerja sama keamanan dan ekonomi

---

<sup>176</sup> *Ibid.* Hal. 29

<sup>177</sup> Lena Jonson dalam Hansen dan Heurlin, *The Baltic States in World Politics*. Hal. 120

antara negara-negara anggota.<sup>178</sup> Jonson mengungkapkan bahwa melalui CIS, Rusia berharap agar organisasi internasional ini kelak memiliki karakter *supra-state*, walaupun hanya memungkinkan CIS untuk mengembangkan kerja sama yang bersifat *inter-governmental*.<sup>179</sup>

Sejak awal sudah tampak jelas bahwa CIS merupakan media bagi Rusia untuk memperoleh kembali pengaruhnya di kawasan eks-Rusia. Dengan 72% teritori eks-Soviet berada di Rusia, hal ini membuat Rusia menjadi aktor yang dominan. Alexander Ruts koy, Wakil Presiden Federasi Rusia pada masa itu, menekankan bahwa kepentingan nasional Rusia adalah fokus utama CIS, walaupun Rusia masih mentolerir hak dan kedaulatan negara-negara anggota untuk memiliki angkatan senjatanya sendiri. Rusia juga menunjukkan pentingnya melindungi kawasan perbatasan CIS dari campur tangan pihak asing. Sebagai konsekuensi, CIS pada perkembangannya sempat mengalami beberapa kendala, seperti perebutan klaim terhadap legitimasi dan kedaulatan antar negara yang baru saja merdeka (konflik antara Rusia dan Ukraina, sengketa antara Armenia dan Azerbaijan, dan konflik etnik di Tajikistan), dan perbedaan orientasi antar anggota yang menyulitkan terwujudnya koordinasi dalam pengambilan kebijakan di CIS.<sup>180</sup>

Hubungan Rusia-NATO naik ke tingkat yang lebih tinggi pada bulan Mei 1997 ketika kedua belah pihak menandatangani perjanjian *NATO-Russia Founding Act on Mutual Relations, Cooperation and Security*. Perjanjian ini antara lain menjadi dasar pembentukan *Permanent Joint Council (PJC)* antara NATO dengan Rusia dengan misi sebagai suatu mekanisme untuk konsultasi, koordinasi semaksimal mungkin dan sesuai dengan kesepakatan bersama dan aksi bersama dalam meneghadapi isu keamanan bersama.<sup>181</sup> Peristiwa runtuhnya *World Trade Center* di Amerika pada tanggal 11 September 2001 telah menjadi ancaman terhadap keamanan yang mengharuskan NATO untuk melakukan kerja sama yang lebih erat dengan Rusia. PJC dianggap masih memiliki kekurangan sehingga dalam KTT Roma pada tahun 2002 dibentuklah *NATO-Russia Council*

<sup>178</sup> Caroline Kennedy-Pipe dalam Regina Cowen Karp., *Central and Eastern Europe*, New York: Oxford University Press, 1993. Hal. 258

<sup>179</sup> *Op. Cit.* Lena Jonson

<sup>180</sup> Caroline Kenedy-Pipe. *Ibid.* Hal. 259-261

<sup>181</sup> Sakwa, *Op.Cit.* Hal. 418.

(NRC) dimana kedua belah pihak berada dalam posisi yang sejajar untuk mengidentifikasi dan mengejar kesempatan-kesempatan untuk melakukan tindakan bersama, konsultasi berkala mengenai isu-isu keamanan dan pengembangan terhadap kerja sama praktis pada wilayah yang menjadi kepentingan bersama.<sup>182</sup>

Menurut ketentuan Deklarasi Roma, tujuan NRC adalah sebagai suatu sarana mekanisme untuk melakukan konsultasi, kerja sama, *consensus building*, dan aksi bersama bagi anggota NATO dan Rusia dalam konteks yang luas pada isu-isu keamanan dalam wilayah Euro-Atlantic. Isu-isu keamanan tersebut termasuk di dalamnya pemberantasan terorisme, penanganan krisis, non-proliferasi, *arms control* dan *confidence building measures*, kerja sama militer.<sup>183</sup>

Tujuan NRC ini terlihat cukup efektif untuk menutupi ketegangan yang sebenarnya terjadi diantara NATO dan Rusia. Sebagian besar masyarakat Rusia melihat NATO sebagai hasil produk Perang Dingin yang menjadi musuh utama Rusia/Uni Soviet selama lebih dari 40 tahun. Menurut seorang pejabat NATO, banyak orang Rusia yang menganggap NATO sebagai sebuah produk yang ditinggalkan dari Perang Dingin yang didominasi oleh Amerika Serikat serta sebuah blok militer yang memiliki potensi agresif, sehingga perluasan NATO ke timur dianggap sebagai upaya untuk mengambil kesempatan dari kelemahan domestik Rusia yang ditutupi oleh tujuan-tujuan yang ambisius.<sup>184</sup>

Perluasan NATO telah menjadi penghalang dalam hubungan keduanya sejak 1993. Pemilu legislatif Rusia pada tahun itu yang didominasi oleh kelompok ultranasionalis-komunis menciptakan ketakutan di negara negara bekas Uni Soviet dan Pakta Warsawa. Mereka mengkhawatirkan Rusia akan kembali menjadi seperti Uni Soviet, sehingga berkeinginan untuk bergabung dengan NATO. NATO menyambut keinginan ini antara lain melalui program PfP yang pada saat disetujui oleh Rumania, Lithuania, Estonia, Ukraina, Bulgaria, Latvia, Moldova dan Albania. Walaupun Rusia juga ikut tergabung dalam program PfP pada tahun 1995, namun sikap Rusia ini lebih karena adanya keinginan untuk menjalin

---

<sup>182</sup> Hendrickson, *op.cit.* Hal. 6

<sup>183</sup> *Ibid.* Hal. 8

<sup>184</sup> Susan Eisenhower, "The Perils of Victory", dalam Ted Galen Carpenter & Barbara Conry (eds.), *NATO Enlargement: Illusions and Reality*, Washington, DC: The Cato Institute, 1998, h. 103.

hubungan baik dengan Barat. Dari sudut pandang Rusia, perluasan NATO ke Timur akan membahayakan upaya Rusia untuk menjalin hubungan yang baik dengan Eropa secara keseluruhan dan akan mengisyaratkan pengesampingan Rusia dalam keikutsertaan yang sejajar dan setara dalam keamanan Eropa. Muncul kekhawatiran Rusia terhadap perluasan NATO, antara lain:<sup>185</sup>

1. Perluasan NATO ke timur menghilangkan peran organisasi-organisasi internasional seperti PBB dan OSCE;
2. Perluasan NATO diikuti oleh pendefinisian ulang peran NATO yang menekankan misi-misi di luar wilayah geografis yang menjadi kewajiban NATO;
3. Perluasan melemahkan NATO sendiri dengan mengembalikan garis-garis pembagian dalam Eropa yang tidak lain ditujukan kepada Rusia;
4. Perluasan akan menafikan rezim pengendalian senjata (*arms control*) yang berlaku, terutama perjanjian perlucutan senjata seperti perjanjian *Conventional Forces in Europe* (CFE);
5. Perluasan dapat menyebabkan peningkatan ketegangan keamanan regional terutama setelah masuknya ketiga negara Baltik (Lithuania, Latvia dan Estonia) dimana 30 persen dari penduduknya terdiri dari etnis Rusia;
6. Perluasan NATO meningkatkan perasaan isolasi Rusia dan membawa resiko pengesampingan Rusia dari proses pengambilan keputusan di Eropa sehingga dapat mengakibatkan sebuah ‘Perang Dingin Baru’;
7. Perluasan tidak menghasilkan demiliterisasi kebijakan luar negeri sebagaimana yang diharapkan setelah berakhirnya Perang Dingin; sebaliknya, NATO mengharapakan para anggota baru untuk memberikan ‘kontribusi yang memadai’ terhadap pertahanan kolektif NATO.

Menlu Rusia, Sergey Lavrov juga menyatakan bahwa keberadaan NATO saat ini bukanlah sebuah ancaman bagi Rusia, namun kebijakan NATO sangat menentukan konsep keamanan nasional Rusia di wilayah atlantik Utara, termasuk wilayah “*near abroad*”.<sup>186</sup>

<sup>185</sup> Sakwa, *Op. Cit.* Hal. 146-147.

<sup>186</sup> Konferensi Press Menlu Rusia, Sergey Lavrov, pada Pertemuan *Black Sea Economic Cooperation Organization*, Yerevan, 16 April 2009.

Pemerintah Rusia melalui Menlunya menyatakan bahwa perluasan NATO ke wilayah Timur membuat hubungan Rusia-NATO menjadi lebih rumit dan tentunya tidak memperkuat keamanan regional maupun global dari segi manapun. Dengan semakin banyaknya mobilisasi peralatan militer NATO di negara anggotanya yang dekat dengan Rusia dan juga disertai dengan pembangunan pangkalan militer serta melakukan patrol udara tentunya hal ini mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah Rusia terkait dengan keamanan nasional Rusia. Namun demikian, Pemerintah Rusia meyakini bahwa hal tersebut dapat dirundingkan secara damai tanpa adanya penggunaan kekerasan serta memiliki keinginan untuk mempererat kerja sama Rusia-NATO yang lebih konstruktif untuk mengatasi keamanan di wilayah regional maupun global.<sup>187</sup>

Pemerintah Rusia masih menganggap bahwa NATO saat ini bekerja secara sepihak untuk menciptakan keamanan dunia hanya untuk negara-negara anggotanya saja tanpa melibatkan Rusia ataupun negara lain di luar negara anggota NATO.<sup>188</sup> Hal ini membuat prospek hubungan antara Rusia-NATO menjadi tidak jelas dan tidak dapat diprediksi, karena NATO sendiri masih menganggap Rusia sebagai ancaman. Rencana pembangunan sistem pertahanan misil NATO di Ceko dan Polandia merupakan bukti nyata bahwa Rusia masih dianggap sebagai ancaman, terlebih setelah kebangkitan Rusia pada masa pemerintahan Presiden Putin.

### **3.4 Konflik Georgia-Rusia di Ossetia Selatan pada bulan Agustus 2008**

Konflik yang terjadi antara Rusia dan Georgia berfokus pada konflik yang terjadi di wilayah Ossetia Selatan. Pada saat ini konflik antara kedua negara juga terjadi di wilayah Abkhazia, namun konflik lebih berpusat di wilayah Ossetia Selatan. Kelompok separatisme di Ossetia Selatan sudah sejak tahun 1989 ingin memisahkan diri dari Georgia. Ossetia Selatan sempat memproklamkan kemerdekaannya secara *de facto* pada 19 Januari 1992 dan bergabung dengan Ossetia Utara yang berada di wilayah Federasi Rusia, namun hal ini ditentang oleh

---

<sup>187</sup> *Ibid.*

<sup>188</sup> *Ibid.*



Georgia. Ossetia Selatan juga sempat melakukan referendum pada 2006 dengan 90% pemilih menyatakan ingin memisahkan diri dari Georgia, namun tidak mendapat pengakuan masyarakat internasional.

Situasi di Ossetia Selatan juga semakin memanas akibat konflik yang melibatkan Georgia, milisi Ossetia Selatan dan pasukan penjaga perdamaian Rusia. Situasi ini berlangsung hingga Saakashvili memutuskan untuk menyelesaikan masalah Ossetia Selatan untuk selamanya dengan memerintahkan serangan darat terhadap Tskhinvali pada tanggal 8 Agustus 2008 dini hari. Rusia tentu telah mengantisipasi tindakan Georgia ini dan mengirim pasukan melalui terowongan Roki yang menghubungkan Ossetia Utara dan Selatan. Dengan tindakan ini maka mulailah serangan militer pertama yang dilakukan Rusia setelah lepas dari Uni Soviet. Perang antara Georgia dengan Rusia dimulai pada tanggal 8 Agustus 2008 ketika pasukan Georgia mulai masuk ke kota Tskhinvali, ibukota Ossetia Selatan dengan tujuan mengambil alih wilayah tersebut sebagai bagian dari pemerintahan Georgia. Menurut OSCE yang saat itu memantau keadaan di Tskhinvali menyatakan bahwa pihak Ossetia Selatan sama sekali tidak melakukan tembakan ataupun melakukan penyerangan.<sup>189</sup>

Pada 9 Agustus 2008 Presiden Georgia Mikhail Saakashvili mengeluarkan dekrit yang menyatakan negara dalam keadaan perang dan darurat selama 15 hari sebagai reaksi atas pengerahan pasukan Federasi Rusia ke wilayah Ossetia Selatan pada 8 Agustus 2008.<sup>190</sup> Saakashvili juga menegaskan bahwa Georgia tidak akan pernah melepas sejenkal pun dari wilayah teritorialnya. Apapun yang terjadi, Georgia tidak akan menyetujui aksi pemisahan wilayah dari Georgia, dan tindakan apapun yang dapat melemahkan sistem demokrasi Georgia.<sup>191</sup> Georgia pada saat itu juga mendapatkan dukungan dari Barat dalam melakukan aksinya. Salah satu bukti keterlibatan Barat adalah ditemukannya satelit konstelasi di wilayah konflik yang ditinggalkan oleh pasukan Georgia. Georgia tidak memiliki peralatan satelit

---

<sup>189</sup> Der Spiegel, "The West Begins to Doubt Georgian Leader". 15 September 2008., <http://www.spiegel.de/international/world/0,1518,578273-2,00.html>

<sup>190</sup> *Ibid.*

<sup>191</sup> Georgia conflict: Key statements, <http://news.bbc.co.uk/2/hi/7556857.stm>

konstelasi, sehingga penemuan tersebut dapat membuktikan adanya bantuan Barat untuk memberikan data kepada Georgia melalui satelit konstelasi tersebut.<sup>192</sup>

Menurut Rusia, masuknya pasukan Rusia ke wilayah Georgia tersebut dimaksudkan untuk melindungi pasukannya yang bertugas sebagai penjaga perdamaian (dalam kerangka CIS) serta warga setempat, yang mayoritas pemegang paspor Rusia. Rusia menuduh serangan Georgia ke wilayah Ossetia Selatan pada 6 Agustus 2008 yang mengakibatkan tewasnya pasukan penjaga perdamaian Rusia dan penduduk sipil Ossetia Selatan adalah bentuk dari pembantaian etnis.<sup>193</sup>

Untuk mengatasi konflik Georgia-Rusia, Presiden Perancis Nicolas Sarkozy yang menjabat sebagai Presiden UE telah bertemu dan melakukan perundingan dengan Presiden Rusia Dmitry Medvedev pada tanggal 15 Agustus 2008. Dari pertemuan tersebut, disepakati 6 (enam) prinsip penanganan<sup>194</sup>, yaitu:

1. Tidak akan menggunakan kekerasan dalam bentuk apapun;
2. Menghentikan semua pertikaian yang sedang terjadi;
3. Pemberian akses kepada bantuan kemanusiaan;
4. Pasukan Georgia harus ditarik pada posisi sebelum sebelumnya;
5. Penarikan pasukan Rusia dari konflik kembali kepada posisi sebelum terjadinya pertikaian. Pasukan penjaga perdamaian Rusia dapat ditempatkan di wilayah konflik untuk menjaga perdamaian di wilayah tersebut;
6. Masa depan dan langkah untuk menjamin keamanan di Ossetia Selatan dan Abkhazia akan dibahas dalam suatu diskusi berskala internasional.

Pada 26 Agustus 2008 Presiden Federasi Rusia Dmitry Medvedev, dengan dukungan penuh Parlemen Federasi Rusia atas permintaan Parlemen Ossetia Selatan dan Abkhazia, mengeluarkan Dekrit yang menyatakan pengakuan atas kemerdekaan wilayah Ossetia Selatan sebagai negara merdeka. Pengakuan Rusia tersebut menimbulkan reaksi pro dan kontra dari dunia internasional.<sup>195</sup>

<sup>192</sup> *Loc. Cit.* Timothy L. Thomas. Hal 48

<sup>193</sup> *Loc. Cit. Timeline: Georgia*

<sup>194</sup> *Loc. Cit.* International Crisis Group

<sup>195</sup> *Ibid.*

Pemerintah Rusia, melalui Presiden Dmitry Medvedev, memberikan pernyataan resmi terhadap serangan militer yang dilakukan ke wilayah Georgia, yaitu:<sup>196</sup>

1. Pemimpin-pemimpin Georgia bertanggung jawab atas aksi-aksi kekerasan yang menimpa warga Ossetia Selatan selama 15 tahun terakhir;
2. Serangan terhadap warga dan personil militer Rusia yang ditempatkan di Ossetia Selatan sebagai penjaga perdamaian harus dibalas;
3. Pemimpin-pemimpin Georgia melancarkan serangannya untuk menuntaskan masalah Ossetia Selatan secara tuntas, dan Rusia memiliki kewajiban untuk mencegah agresi serta genosida terhadap penduduk Ossetia Selatan;
4. Rusia bertindak untuk membela warganya yang diserang berdasarkan prinsip pasal 51 Piagam PBB tentang pembelaan diri (*self-defense*).

Konflik antara Georgia dengan Rusia ini ini membangkitkan kembali kekhawatiran mengenai terjadinya sebuah ‘Perang Dingin Baru’, antara Rusia dengan Barat terutama anggota NATO. Kekhawatiran ini dibantah antara lain oleh Richard Sakwa yang mengatakan bahwa bipolarisme dan konfrontasi ideologis yang menjadi ciri Perang Dingin antara Amerika Serikat dan Uni Soviet sudah menjadi bagian dari masa lalu, dan bahwa sesungguhnya istilah ‘Perang Dingin’ adalah “metafora untuk sebuah hubungan yang pada dasarnya diwarnai ketegangan yang tidak bisa diselesaikan melalui kerangka cara pandang dunia yang dimiliki masing-masing pihak namun melalui sebuah proses pemikiran ulang oleh keduanya.”

---

<sup>196</sup> Hans-Henning Schröder, “‘A Short, Victorious War?’ Russian Perspectives on the Caucasus Crisis”, dalam Hans-Henning Schröder (ed.), *The Caucasus Crisis: International Perceptions and Policy Implications for Germany and Europe*, SWP-Berlin Research Paper No. 9, November 2008, h. 7.

Gambar 3  
Peta wilayah Georgia



Sumber: <http://www.un.org/Depts/Cartographic/map/profile/georgia.pdf>

Dalam Deklarasi Bersama *Shanghai Cooperation Organization (SCO)*, 28 Agustus 2008 di Dushanbe Summit, Tajikistan, SCO menyambut baik 6 prinsip penyelesaian konflik di Ossetia Selatan dan mendukung Rusia berperan aktif dalam menciptakan perdamaian dan kerja sama di wilayah tersebut. Negara-negara SCO menyampaikan kekhawatiran berkaitan dengan terjadinya ketegangan seputar masalah Ossetia Selatan dan menghimbau pihak-pihak terkait untuk menyelesaikan konflik melalui dialog dan perundingan damai. Negara-negara SCO menegaskan prinsip-prinsip penghormatan integritas wilayah suatu negara dan upaya-upaya untuk melindungi negara kesatuan dan integritas wilayah.<sup>197</sup>

Selanjutnya dalam pertemuan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Uni Eropa (UE) di Brussels, 1 September 2008, UE hanya memutuskan menunda

<sup>197</sup> "Russia-Georgia tensions still high one year on from conflict", <http://www.cnn.com/2009/WORLD/europe/08/07/goergia.background/index.html?iref=allsearch>

pembicaraan lanjutan dengan Rusia dan tidak menjatuhkan sanksi sebagaimana usulan beberapa negara anggota UE, seperti Inggris dan Polandia. UE mendesak Rusia agar segera menarik pasukannya dari wilayah Ossetia Selatan dan Abkhazia. Presiden Perancis Nikolas Sarkozy yang menjabat Presiden UE menyampaikan bahwa saat ini bukan untuk menerapkan sanksi, tapi penyelesaian masalah melalui dialog damai. Penundaan pembicaraan tersebut sebagai protes UE terhadap pengakuan Rusia atas kemerdekaan Ossetia Selatan dan Abkhazia. Namun demikian, Rusia tetap tidak akan merubah keputusannya tersebut.<sup>198</sup>

Pada 2 September 2008 Georgia memutuskan hubungan diplomatik dengan Rusia dan sebagai balasannya pada 3 September 2008 Rusia memutuskan hubungan diplomatik dengan Georgia, namun kedua negara tetap menjalin hubungan pada tingkat konsuler. Pada tanggal 2 September, Nikaragua mendukung Rusia atas pengakuan kemerdekaan Ossetia Selatan dan Abkhazia. Sementara itu, Tajikistan, Venezuela dan Syria mendukung kebijakan Rusia, namun tidak menyatakan secara resmi. Presiden Belarus Alexander Lukashenko juga menyampaikan bahwa Belarus akan mengakui kemerdekaan Ossetia Selatan dan Abkhazia setelah Pemilihan Umum di Belarus tahun 2012.<sup>199</sup>

Pada 8 September 2008 Presiden Perancis Nikolas Sarkozy bertemu dengan Presiden Rusia Dmitry Medvedev untuk membahas tindak lanjut penyelesaian konflik di Ossetia Selatan, terutama menindak lanjuti 6 butir kesepakatan Medvedev-Sarkozy yang dilakukan pada 12 Agustus 2008.<sup>200</sup> Presiden Sarkozy menyampaikan bahwa pasukan Rusia harus keluar dari Georgia dan menempati posisinya seperti sebelum terjadinya konflik dengan tenggat waktu 15 Oktober 2008. Presiden Medvedev menyampaikan bahwa Rusia berketetapan menarik penuh pasukannya dalam waktu satu bulan dari Georgia, kecuali dari Ossetia Selatan dan Abkhazia setelah UE mengirimkan 200 pengamatnya untuk bergabung dengan 220 pengamat internasional lainnya di Georgia. Pada tanggal 9 Oktober 2008, Rusia telah merealisasikan ketetapan penarikan penuh pasukannya dari *buffer zones* dekat wilayah Abkhazia dan Ossetia Selatan.<sup>201</sup>

---

<sup>198</sup> *Loc. Cit.* International Crisis Group

<sup>199</sup> *Loc. Cit.* Timeline: Georgia

<sup>200</sup> *Ibid.*

<sup>201</sup> *Loc. Cit.* Der Spiegel

Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov Pada 9 September 2008 menyatakan bahwa Rusia secara resmi menjalin hubungan diplomatik dengan Ossetia Selatan dan Abkhazia melalui pertukaran nota pembentukan hubungan diplomatik tingkat kedutaan. Pada 9 September 2008 Presiden Georgia Mikhail Saakashvili menandatangani dokumen tentang langkah-langkah lebih lanjut untuk kestabilan situasi di Ossetia Selatan dan Abkhazia. Dokumen yang menyatakan penggantian pasukan Rusia oleh pasukan internasional tersebut telah disetujui oleh Presiden Rusia dan Perancis yang bertemu pada 8 September 2008.<sup>202</sup>

Pada 24 September 2008, rombongan pemantau UE tiba di Georgia. Hal tersebut sesuai dengan perjanjian perdamaian yang ditandatangani Presiden Rusia dan Presiden Perancis mengenai penyelesaian konflik Rusia-Georgia, bahwa sebelum 1 Oktober 2008 akan dikirim 200 pemantau UE ke daerah perbatasan Georgia dengan Abkhazia dan Ossetia Selatan, dan sebelum 10 Oktober 2008 semua pasukan Rusia telah harus ditarik mundur.<sup>203</sup>

Setelah dilakukan pengamatan oleh para pengamat dari berbagai negara, memang konflik yang terjadi antara Rusia dan Georgia di Ossetia Selatan tidak dapat sepenuhnya menjadi tanggung jawab salah satu pihak. Kedua belah pihak dinilai bertanggung jawab atas konflik yang telah menelan korban hingga 2000 orang tersebut. Menurut laporan Komisi Eropa, pada konflik tersebut Georgia seharusnya tidak melakukan serangan besar-besaran untuk mengambil alih Ossetia Selatan dari kelompok pemberontak.<sup>204</sup> Aksi yang dilakukan pasukan Georgia di wilayah Ossetia Selatan tersebut justru menimbulkan banyak korban jiwa dan dianggap sebagai pembantaian etnis Ossetia di Ossetia Selatan, walaupun demi menjaga integritas negara Georgia. Etnis Ossetia yang pada umumnya memiliki paspor Rusia tentunya akan dilindungi oleh Pemerintah Rusia, sehingga aksi yang dilakukan Georgia tersebut memicu Rusia untuk melindungi dan menyerang masuk ke dalam Georgia. Pemerintah Georgia juga telah mengetahui

---

<sup>202</sup> Kremlin, Совместная пресс-конференция по итогам переговоров с Федеральным канцлером Германии Анжелой Меркель, <http://news.kremlin.ru/transcripts/1102>

<sup>203</sup> International Crisis Group, *Learn To Live like Neighbours*, Europe Briefing No. 65, Tblisi/Brussels/Istanbul/Moscow, 8 August 2011.

<sup>204</sup> Ian Traynor, *Georgian president Mikheil Saakashvili blamed for starting Russian war*, <http://www.guardian.co.uk/world/2009/sep/30/georgia-attacks-unjustifiable-eu>

bahwa Rusia telah menyatakan secara resmi akan melindungi rakyatnya yang berada di wilayah Abkhazia dan Ossetia Selatan.

Konflik bersenjata antara Rusia dengan Georgia di Ossetia Selatan tersebut dipicu oleh aksi penyerangan tentara Georgia terhadap pasukan perdamaian Rusia dan penduduk di kota Tskhinvali pada tanggal 7 dan 8 Agustus 2008. Hal inilah yang membuat Rusia untuk melakukan serangan militer guna menghentikan pembantian etnis Ossetia yang dilakukan oleh pasukan Georgia serta melindungi penduduk berpaspor Rusia dan pasukan penjaga perdamaian yang ditempatkan di Ossetia Selatan. Aksi Georgia memprovokasi Rusia tersebut merupakan upaya Georgia untuk mencari perhatian dunia internasional bahwa negaranya telah mendapatkan serangan besar-besaran dari Rusia. Karena merasa terancam oleh Rusia, maka Georgia berharap dapat menjadi anggota NATO dan didukung oleh seluruh anggotanya, terutama AS.<sup>205</sup>

Dari paparan diatas, dapat disimpulkan bahwa tujuan Georgia memprovokasi Rusia untuk menyerang masuk ke wilayah Ossetia Selatan adalah karena adanya kedekatan hubungan Georgia dengan AS. Georgia dan AS memiliki hubungan yang sangat erat, bahkan AS telah memberikan bantuan persenjataan militer kepada Georgia dengan program GTEP, yang digunakan pada saat konflik dengan Rusia bulan Agustus 2008.<sup>206</sup> Walaupun tidak mendapatkan bantuan pada saat terjadinya konflik dengan Rusia, namun AS masih tetap mendukung penuh keanggotaan Georgia pada NATO. Sehingga aksi provokasi yang dilakukan oleh Georgia terhadap Rusia tersebut merupakan suatu usaha agar memperoleh keanggotaan NATO di masa mendatang dengan alasan ancaman dari Rusia.<sup>207</sup>

Harold Lasswell menilai bahwa masalah utama yang dihadapi setiap negara adalah membangun kekuatan untuk menangkal atau mengalahkan suatu serangan atau kebebasan dari pendiktean negara lain.<sup>208</sup> Georgia yang selama ini tidak terbebas dari pengaruh Rusia menyatakan keinginannya untuk menjadi anggota NATO, dan apabila keanggotaannya diterima, dapat menjadi inspirasi

<sup>205</sup> *Loc. Cit.* Timoty L. Thomas. Hal. 40

<sup>206</sup> *Ibid.*

<sup>207</sup> *Loc. Cit.* Ian Treynor

<sup>208</sup> Joseph R. Romm, *Defining National Security*, <http://books.google.co.in/books?id=shxDOnuVcyYC>

bagi negara-negara bekas Uni Soviet lainnya untuk menjadi bagian dari struktur organisasi Barat, baik NATO maupun Uni Eropa. Georgia sendiri juga terinspirasi oleh langkah yang dilakukan oleh tiga negara baltik yang sudah terlebih dahulu menjadi bagian dari organisasi regional Barat.<sup>209</sup> Dalam KTT Bucharest tahun 2008, NATO masih membuka kemungkinan bagi Georgia untuk menjadi anggota, dengan didukung oleh Amerika Serikat dan Jerman. Pada tanggal 17 Agustus 2008, Kanselir Jerman Angela Merkel menyatakan bahwa Georgia dapat bergabung dengan NATO jika mereka mau.<sup>210</sup>

Sejak awal perhitungan Georgia untuk mendapatkan dukungan dari NATO maupun AS dalam serangannya melawan Rusia di Ossetia Selatan sudah tidak masuk akal. Dengan perhitungan apapun, Georgia tidak akan mampu menandingi kekuatan militer Rusia. Perdana Menteri Rusia, Putin, juga telah memperingatkan Georgia untuk tidak melakukan aksi provokasi, namun jika memang Georgia menginginkan terjadinya perang, maka Rusia siap untuk berperang.<sup>211</sup> Di bulan April 2009, rakyat Georgia selama beberapa hari melakukan unjuk rasa agar Presiden Saakashvili mundur dari jabatannya. Dalam unjuk rasa tersebut ditekankan bahwa mereka tidak menginginkan hubungan yang lebih buruk lagi antara Georgia dan Rusia terkait isu Ossetia Selatan.<sup>212</sup>

Salah satu unsur kepentingan nasional yang dijelaskan oleh Holsti adalah keamanan.<sup>213</sup> Presiden Georgia Mikhail Saakashvili yang lebih pro terhadap Barat tentu cenderung lebih dekat dengan negara-negara Barat dibandingkan dengan Rusia, walaupun mereka berbatasan langsung. Karena perbedaan ideologi ini, Rusia secara tidak langsung menjadi ancaman bagi Georgia, karena bagi Rusia, Georgia adalah wilayah yang termasuk dalam *near abroad* Rusia. Menteri Luar Negeri Rusia telah menegaskan bahwa Rusia memiliki kepentingan di wilayah tersebut.<sup>214</sup> Untuk melindungi negaranya dari ancaman tersebut, Georgia tentu

<sup>209</sup> *Loc. Cit.* Timeline: Georgia

<sup>210</sup> Georgia conflict: Key statements, <http://news.bbc.co.uk/2/hi/7556857.stm>

<sup>211</sup> Condoleezza Rice, *No Higher Honor: A Memoir of My Years in Washington*, New York: Crown Publisher, 2011. Hal. 421

<sup>212</sup> Thousands gather for street protests against Georgian president. <http://www.guardian.co.uk/world/2009/apr/09/georgia-protests-mikheil-saakashvili>

<sup>213</sup> Holsti, *Op.cit.*, h. 84.

<sup>214</sup> *Loc. Cit.* Konferensi Press Menlu Rusia.



harus berpihak terhadap salah satu kekuatan besar dunia, yaitu Amerika Serikat. Keberpihakan Georgia terhadap Barat ini terus bertambah hingga munculnya keinginan Georgia menjadi anggota NATO, dan bahkan Uni Eropa. Dengan menjadi anggota organisasi tersebut, Georgia diharapkan mampu menerapkan dan mengembangkan demokrasi di negaranya, sehingga kedekatan hubungan Georgia dan Amerika Serikat ini diharapkan dapat merealisasikan tujuan Georgia menjadi anggota NATO, walaupun terus ditentang oleh Rusia.

Georgia tidak memiliki industri persenjataan dalam negeri, sehingga tidak memiliki pilihan lain selain mengimpor dari negara lain. Hal ini tentu akan menambah biaya pertahanan bagi Georgia, sementara tingkat pertumbuhan ekonomi Georgia tidak lebih baik dari Rusia. Dengan besarnya kekuatan pertahanan Rusia, Georgia juga tentu akan meningkatkan pertahanannya melalui kerja sama militer dengan Amerika Serikat.<sup>215</sup> Kedekatan hubungan bilateral Georgia dengan Amerika Serikat ini tentu merupakan ancaman bagi Rusia. Hal ini membuat Rusia akan terus meningkatkan kemampuan pertahanannya, karena secara geografis Georgia berbatasan langsung dengan Rusia di bagian selatan. Georgia yang merasa mendapatkan ancaman dari Rusia sangat memperjuangkan keanggotaannya pada NATO, sehingga dengan cara apapun harus mendapatkan keanggotaan tersebut.<sup>216</sup>

Sesuai dengan konsep *security dilemma* yang dikemukakan oleh R. Jervis<sup>217</sup>, Rusia yang sudah merasa terancam dengan keinginan Georgia untuk masuk menjadi anggota NATO tentu akan meningkatkan lagi kemampuan pertahanannya dan harus senantiasa siap untuk mendapatkan serangan dan menyerang balik. Persaingan antara Rusia dengan Amerika Serikat tidak akan pernah dapat terselesaikan. Amerika Serikat sengaja membentuk NATO untuk membangun kekuatan baru bersama negara-negara di Eropa agar dapat mengimbangi kekuatan Rusia. Begitupula dengan Rusia yang mendirikan CIS untuk dapat tetap mengendalikan negara-negara yang telah merdeka setelah pecahnya Uni Soviet.

---

<sup>215</sup> *Loc. Cit.* Global Security

<sup>216</sup> *Loc. Cit.* [http://embassy.mfa.gov.ge/files/-Documents/National\\_Security\\_Concept\\_-\\_E.doc](http://embassy.mfa.gov.ge/files/-Documents/National_Security_Concept_-_E.doc)

<sup>217</sup> *Op. Cit.* Jervis.

Seiring dengan pesatnya pertumbuhan ekonomi Rusia, maka meningkat pula anggaran pertahanannya. Menurut buku “The Military Balance” tahun 2011, peningkatan anggaran pertahanan Rusia cukup tinggi dan tidak dapat dibandingkan dengan negara sekecil Georgia dengan angka perekonomian yang tidak terlalu baik. Peningkatan pertahanan Rusia ini tidak hanya pada peningkatan personel militernya, namun juga memproduksi alutsista, bahkan salah satu produsen alutsista utama di dunia. Sehubungan dengan hal tersebut, maka Rusia tidak mengkhawatirkan terjadinya keterbatasan peralatan akibat embargo. Dengan menggunakan alutsista produk dalam negerinya sendiri, tentu pengeluarannya bisa ditekan, sehingga hal ini merupakan salah satu keuntungan yang dimiliki oleh Rusia.

Sejak masa Uni Soviet, Rusia telah memproduksi dan meningkatkan kemampuan pertahanannya praktis tanpa bantuan negara lain. Hingga saat ini Rusia pun enggan menggunakan produk-produk militer buatan asing, dan lebih memilih produk dalam negerinya. Dengan menggunakan produk buatan asing, suatu negara tidak secara leluasa dapat terus menggunakan peralatan tersebut, karena masih harus membutuhkan suku cadang, amunisi dan sebagainya. Bahkan produk tersebut dapat disusupi dengan peralatan yang dapat menyadap seluruh kegiatan yang dilakukan. Sangatlah tepat apabila Rusia menggunakan produk alutsista dalam negerinya sendiri untuk menghindari segala resiko yang dapat timbul di kemudian hari.

Peningkatan kemampuan militer Rusia ini lebih ditujukan untuk mengimbangi kekuatan NATO, bukan terhadap Georgia secara khusus. Namun karena hubungan erat Georgia dan AS, ancaman terhadap Rusia tentu cukup besar. Secara perhitungan normal, Georgia tidak akan dapat mengimbangi kekuatan Rusia sekalipun mendapatkan bantuan dari AS dan NATO. Jarak wilayah negara-negara aliansi Georgia cukup jauh dan memakan waktu cukup lama untuk mengirimkan bantuan pasukan. Kalaupun Georgia mendapatkan bantuan untuk melakukan persiapan menyerang Ossetia Selatan, tentu akan terlebih dahulu terdeteksi oleh Rusia. Sementara itu, untuk memberikan bantuan

kepada Georgia setelah mendapatkan serangan dari Rusia, tentu dapat dengan lebih mudah diserang oleh Rusia.

Georgia pada saat itu tidak memperhitungkan NATO yang juga sedang melakukan misinya di Irak sejak tahun 2003. Untuk membantu Georgia, tentu NATO harus mengirimkan pasukan beserta logistiknya ke dua tempat yang berbeda Irak dan Georgia. Perang membantu Georgia sama saja dengan perang melawan Rusia, sehingga sudah pasti akan membuat permasalahan menjadi lebih besar, perang dingin baru. Dengan kekuatan militer Rusia yang sangat besar, perang melawan Rusia akan sangat mahal, baik secara finansial maupun personel. Rakyat AS telah memprotes kebijakan pemerintahnya yang melakukan serangan ke Irak, karena telah menewaskan ribuan tentara AS. Hal ini juga menjadi pertimbangan AS untuk tidak membantu Georgia dalam perang melawan Rusia. NATO memang memiliki kepentingan untuk memperluas keanggotaannya ke Timur, namun tidak mungkin bagi NATO untuk berkorban demi sebuah negara kecil.

Holsti menjelaskan unsur lain dalam kepentingan nasional sebuah negara adalah otonomi, kesejahteraan dan prestise.<sup>218</sup> Keputusan Mikhail Saakashvili untuk memprovokasi Rusia menyerang ke wilayah Georgia merupakan salah satu usahanya untuk mendapatkan dukungan dalam negeri dalam menjaga integritas wilayah Georgia sebagai salah satu kepentingan nasional Georgia.<sup>219</sup> Selain itu, keinginan Georgia untuk bergabung dengan organisasi regional Barat juga bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. Hal ini terbukti dengan masuknya tiga negara Baltik ke dalam Uni Eropa membuat kondisi perekonomian ketiga negara tersebut terus meningkat dengan pesat. Selain itu Georgia juga menginginkan kebebasan untuk menjalankan pemerintahannya yang demokrasi tanpa adanya campur tangan negara lain yang berusaha melemahkan proses demokrasi di Georgia. Amerika Serikat yang dianggap sudah menerapkan proses demokrasi dengan baik, membuat Georgia lebih mendekati diri terhadap Amerika Serikat, dibandingkan dengan Rusia.

---

<sup>218</sup> Holsti, *Op.cit.*, h. 84.

<sup>219</sup> *Loc. Cit.* [http://embassy.mfa.gov.ge/files/-Documents/National\\_Security\\_Concept\\_-\\_E.doc](http://embassy.mfa.gov.ge/files/-Documents/National_Security_Concept_-_E.doc)

Seluruh usaha yang dilakukan oleh Pemerintah Georgia tersebut merupakan usaha untuk memenuhi kepentingan nasionalnya. Namun rakyat Georgia sendiri akhirnya melakukan demonstrasi menuntut Mikhail Saakashvili untuk mengundurkan diri sebagai Presiden Georgia. Mereka tidak ingin Georgia selalu dalam pertikaian dengan Rusia mengenai permasalahan di Ossetia Selatan. Saakashvili juga dianggap telah melakukan pembantian etnis Ossetia dan pasukan penjaga perdamaian Rusia di Ossetia Selatan, serta menghancurkan seluruh kota Tskhinvali. Georgia menolak tuduhan telah menghancurkan kota Tskhinvali, dan mengklaim bahwa kota itu dihancurkan oleh Rusia guna menghadang pasukan Georgia untuk dapat menyerang lebih jauh.<sup>220</sup>

Menurut wawancara dan pengakuan masyarakat yang menetap di wilayah Ossetia Selatan, pasukan Georgia masuk menyerang kota Tskhinvali dalam jumlah besar dan dipersenjatai lengkap. Mereka secara membabi buta menembaki penduduk di kota Tskhinvali serta menghancurkan perumahan milik warga.<sup>221</sup> Selain menyerang kelompok pemberontak dan masyarakat sipil, pasukan Georgia juga menyerang pasukan penjaga perdamaian Rusia yang berada di wilayah tersebut. Pasukan penjaga perdamaian Rusia tentu tidak dapat mengimbangi kekuatan pasukan Georgia yang secara jumlah lebih banyak dan persenjataan yang lebih siap tempur. Hal ini membuat aksi penyerangan Rusia ke wilayah Ossetia Selatan sudah sesuai dengan hukum internasional yang berusaha melindungi warganya yang terancam, serta melindungi etnis Ossetia dari pembantaian etnis (*responsibility to protect*<sup>222</sup>).

Reaksi masyarakat internasional memberikan reaksi yang berbeda terhadap aksi Georgia di Ossetia selatan. Menurut pengamatan PBB, aksi yang dilakukan Georgia ini dinilai sebagai pelanggaran terhadap Piagam PBB. Hal ini diutarakan oleh Presiden Sidang Umum PBB pada saat itu, Miguel d'Escoto Brockmann, dimana Georgia terbukti telah melakukan agresi militer ke Ossetia

<sup>220</sup> *Loc. Cit.* Timothy L. Thomas

<sup>221</sup> Video dokumentasi Alim Salbiev, 2008.

<sup>222</sup> United Nations General Assembly, *2005 World Summit Outcome*, <http://www.who.int/hiv/universalaccess2010/worldsummit.pdf>

Selatan dan menyerang masyarakat sipil.<sup>223</sup> Selain itu, sebagian negara menyatakan bahwa konflik yang terjadi tersebut merupakan tanggung jawab Georgia yang telah melakukan provokasi terhadap Rusia untuk menyerang ke Ossetia Selatan. Negara yang mendukung aksi Rusia dan menyatakan Georgia telah melakukan memprovokasi antara lain Belarus<sup>224</sup>, Bosnia<sup>225</sup>, Suriah<sup>226</sup>, Kuba<sup>227</sup>, Kazakhstan<sup>228</sup>, Nikaragua<sup>229</sup>, Arab Saudi<sup>230</sup> dan Venezuela<sup>231</sup>.

Sementara itu ada pula negara yang menyatakan bahwa Rusia bertanggung jawab atas konflik yang terjadi di Ossetia Selatan dan mendukung serta meminta Rusia untuk menghormati integritas wilayah Georgia. Negara-negara yang mengecam aksi Rusia tersebut antara lain adalah Latvia<sup>232</sup>, Lithuania<sup>233</sup>, Estonia<sup>234</sup>, Polandia<sup>235</sup>, Ukraina<sup>236</sup>, Australia<sup>237</sup>, Denmark<sup>238</sup>, Austria<sup>239</sup>, Israel<sup>240</sup> dan Azerbaijan<sup>241</sup>. Bahkan etnis Georgia yang berada di Azerbaijan ikut membantu pasukan Georgia di wilayah konflik.<sup>242</sup> Selain itu, tidak sedikit pula negara yang bersikap netral terhadap peristiwa tersebut. Negara seperti Cina<sup>243</sup>,

<sup>223</sup> "UN GA President labels Georgia as aggressor, slams U.S.",

<http://www.panarmenian.net/eng/world/news/26966/>

<sup>224</sup> *Loc. Cit.* Timeline: Georgia

<sup>225</sup> [http://www.vladars.net/sr-SP-](http://www.vladars.net/sr-SP-Latn/Vlada/media/vijesti/Pages/Vlada_RS_uputila_saucesce_porodicama_stradalih_u_Juznoj_Ose)

[Latn/Vlada/media/vijesti/Pages/Vlada\\_RS\\_uputila\\_saucesce\\_porodicama\\_stradalih\\_u\\_Juznoj\\_Ose\\_tiji.aspx](http://www.vladars.net/sr-SP-Latn/Vlada/media/vijesti/Pages/Vlada_RS_uputila_saucesce_porodicama_stradalih_u_Juznoj_Ose_tiji.aspx)

<sup>226</sup> <http://edition.presstv.ir/detail/67216.html>

<sup>227</sup> *Loc. Cit.* Timothy L. Thomas. Hal. 65

<sup>228</sup> *Loc. Cit.* Timeline: Georgia

<sup>229</sup> *Ibid.*

<sup>230</sup> Саудовская Аравия с пониманием отнеслась к действиям России в Южной Осетии,

[http://www.gazeta.ru/news/lenta/2008/09/04/n\\_1266558.shtml](http://www.gazeta.ru/news/lenta/2008/09/04/n_1266558.shtml)

<sup>231</sup> [http://www.dfat.gov.au/geo/venezuela/venezuela\\_country\\_brief.html](http://www.dfat.gov.au/geo/venezuela/venezuela_country_brief.html)

<sup>232</sup> <http://www.riigikogu.ee/index.php?id=50815>

<sup>233</sup> *Loc. Cit.* Timeline: Georgia

<sup>234</sup> *Ibid.*

<sup>235</sup> *Loc. Cit.* Timothy L. Thomas. Hal. 65

<sup>236</sup> <http://www.mfa.gov.ua/mfa/ua/publication/content/19588.htm>

<sup>237</sup> <http://news.smh.com.au/national/australia-calls-for-ceasefire-in-georgia-20080810-3suq.html>

<sup>238</sup> <http://www.dr.dk/Nyheder/Politik/2008/08/09/121043.htm?rss=true>

<sup>239</sup> Plassnik demands Russian ceasefire,

[http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/english\\_news/77291\\_Plassnik-demands-Russian-ceasefire.html](http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/english_news/77291_Plassnik-demands-Russian-ceasefire.html)

<sup>240</sup> MFA statement on the situation in Georgia,

<http://www.mfa.gov.il/MFA/About+the+Ministry/MFA+Spokesman/2008/MFA+statement+on+the+situation+in+Georgia+10-Aug-2008.htm>

<sup>241</sup> Azerbaijani Foreign Ministry: "Georgia's actions comply with international law",

<http://today.az/news/politics/46850.html>

<sup>242</sup> *Ibid.*

<sup>243</sup> Foreign Ministry Spokesperson Qin Gang's Remarks on the Conflicts in South Ossetia,

<http://www.fmprc.gov.cn/eng/xwfw/s2510/t464558.htm>

Prancis<sup>244</sup>, Belanda, Serbia<sup>245</sup> dan Selandia Baru<sup>246</sup> memilih untuk berikap netral. Mereka pada umumnya menginginkan adanya penyelesaian secara damai melalui dialog dan siap membantu proses pemulihan keadaan, seperti penempatan pasukan perdamaian di wilayah konflik jika diperlukan.

Tabel 2

Kronologi konflik pada bulan Agustus 2008 di Ossetia Selatan

No.	Waktu	Kejadian	Keterangan
1.	1 Agustus 2008	Terjadi ledakan di Ossetia Selatan <sup>247</sup>	Melukai 2 anggota kepolisian Georgia
2.	2 Agustus 2008	Konflik antara kelompok separatis Ossetia Selatan dengan pasukan Georgia <sup>248</sup>	Konflik ini juga melibatkan pasukan penjaga perdamaian Rusia. Presiden Ossetia Selatan menyatakan siap untuk menyerang balik Georgia.
3.	7 Agustus 2008	Serangan Georgia ke Ossetia Selatan <sup>249</sup>	Georgia menuduh Ossetia Selatan memicu pasukan Georgia untuk menyerang.
4.	8 Agustus 2008	Saling klaim wilayah antara Georgia dan Ossetia Selatan <sup>250</sup>	Georgia menuduh Rusia telah memprovokasi Georgia untuk menyerang ke Ossetia Selatan. Rusia membantah tuduhan tersebut dan mengancam akan menyerang balik.
5.	8 Agustus 2008	Pasukan Rusia masuk ke wilayah Georgia <sup>251</sup>	

<sup>244</sup> Loc. Cit. Timothy L. Thomas. Hal. 58

<sup>245</sup> [http://www.b92.net/eng/news/politics-article.php?yyyy=2008&mm=08&dd=14&nav\\_id=52690](http://www.b92.net/eng/news/politics-article.php?yyyy=2008&mm=08&dd=14&nav_id=52690)

<sup>246</sup> <http://www.beehive.govt.nz/release/hostilities-and-loss-life-south-ossetia>

<sup>247</sup> Six Die in S.Ossetia Shootout, <http://www.civil.ge/eng/article.php?id=18871>

<sup>248</sup> *Ibid.*

<sup>249</sup> The West Begins to Doubt Georgian Leader, <http://www.spiegel.de/international/world/0,1518,578273-2,00.html>

<sup>250</sup> CBSNEWS,

[http://www.cbsnews.com/elements/2008/08/12/in\\_depth\\_world/timeline4342593.shtml](http://www.cbsnews.com/elements/2008/08/12/in_depth_world/timeline4342593.shtml)

6.	9 Agustus 2008	Pernyataan Perang oleh Presiden Georgia <sup>252</sup>	Presiden Georgia menyatakan negara dalam keadaan perang.
7.	9 Agustus 2008	Penembakan pesawat Rusia <sup>253</sup>	Georgia mengklaim telah menembak jatuh dua pesawat Rusia
8.	9 Agustus 2008	Konflik di Abkhazia <sup>254</sup>	Menlu Abkhazia menyatakan telah berhasil mengusir pasukan Georgia keluar dari wilayahnya.
9.	10 Agustus 2008	Terjadi serangan ke Tblisi <sup>255</sup>	Telah terjadi serangan bom dekat pangkalan udara militer di Tblisi
10.	10 Agustus 2008	Kecaman Presiden AS dan Menlu Inggris terhadap serangan Rusia di Ossetia Selatan <sup>256</sup>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Presiden AS menyatakan bahwa Rusia seharusnya tidak menanggapi serangan tersebut dengan agresi militer.</li> <li>• Menlu Inggris mengecam serangan Rusia yang jauh melebihi Ossetia Selatan.</li> </ul>
11.	10 Agustus 2008	Georgia menyatakan bahwa serangan Rusia telah menewaskan 130 orang dan melukai lebih dari 1.000 rakyat sipil <sup>257</sup>	Rusia membantah telah menyerang warga sipil di wilayah Georgia.
12.	10 Agustus 2008	Pengajuan kesepakatan damai oleh Georgia. <sup>258</sup>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Georgia mengajukan kesepakatan damai terhadap Rusia, dan</li> </ul>

<sup>251</sup> *Ibid.*

<sup>252</sup> *Ibid.*

<sup>253</sup> Georgia declares 'state of war' over South Ossetia,

<http://www.guardian.co.uk/world/2008/aug/09/georgia.russia2>

<sup>254</sup> Day-by-day: Georgia-Russia crisis. <http://news.bbc.co.uk/2/hi/7551576.stm>

<sup>255</sup> *Ibid.*

<sup>256</sup> *Ibid.*

<sup>257</sup> *Ibid.*

<sup>258</sup> *Loc. Cit.* Timothy L. Thomas

			<p>akan menarik mundur seluruh pasukannya.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Rusia tidak melihat adanya tanda-tanda akan dilakukannya gencatan senjata oleh Georgia, sehingga meminta seluruh pasukan Georgia untuk keluar dari wilayah Ossetia Selatan.</li> </ul>
13.	11 Agustus 2008	Pasukan Rusia masuk ke wilayah Abkhazia <sup>259</sup>	
14.	11 Agustus 2008	Menlu Perancis datang ke Georgia <sup>260</sup>	Dalam keadaan perang, Menlu Perancis datang ke Georgia melakukan mediasi antara Rusia dan Georgia untuk melakukan gencatan senjata.
15.	11 Agustus 2008	Permintaan perlucutan senjata oleh Rusia <sup>261</sup>	Rusia meminta pasukan Georgia yang berjumlah 1500 orang di Zugdidi untuk melakukan perlucutan senjata. Georgia menolak melakukan perlucutan senjata.
16.	11 Agustus 1008	Komisi Eropa meminta Rusia untuk menghentikan segala aksi militernya di wilayah Georgia <sup>262</sup>	
17.	11 Agustus 2008	Penempatan pasukan Rusia di Abkhazia <sup>263</sup>	Rusia menempatkan 9000 pasukan di Abkhazia, hal ini melebihi jumlah

<sup>259</sup> *Loc. Cit.* Day by Day: Georgia-Russia Crisis

<sup>260</sup> *Ibid.*

<sup>261</sup> *Ibid.*

<sup>262</sup> *Ibid.*

<sup>263</sup> *Ibid.*



			pasukan yang disetujui (3000) menurut perjanjian antara Rusia-Georgia pada tahun 1994.
18.	11 Agustus 2008	Pemulangan pasukan Georgia dari Irak <sup>264</sup>	Rusia menganggap pemulangan pasukan Georgia dari Irak dan difasilitasi oleh AS tersebut merupakan usaha untuk menambah jumlah pasukan di wilayah konflik di Georgia. Pemulangan tersebut juga termasuk seluruh persenjataan siap tempur.
19.	11 Agustus 2008	Kunjungan Menlu Perancis ke Gori <sup>265</sup>	Menlu Perancis berkunjung ke kota Gori, 50km dari Tblisi untuk melihat keadaan.
20.	12 Agustus 2008	Kunjungan Presiden Perancis dan Menlu Perancis ke Moscow <sup>266</sup>	Sarkozy berkunjung ke Moscow untuk mengupayakan dilakukannya gencatan senjata antara Rusia dan Georgia.
21.	16 Agustus 2008	Rusia menyetujui gencatan senjata <sup>267</sup>	Rusia setuju untuk melakukan senjata dan menarik mundur seluruh pasukannya pada posisi sebelum terjadinya konflik.
22.	17 Agustus 2008	Rusia akan mulai menarik mundur seluruh pasukannya pada tanggal 18 Agustus sesuai perjanjian yang di tandatangani <sup>268</sup>	

<sup>264</sup> *Ibid.*

<sup>265</sup> *Ibid.*

<sup>266</sup> *Ibid.*

<sup>267</sup> Day by Day: Georgia-Russia Crisis, <http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/7577150.stm>

<sup>268</sup> *Ibid.*

23.	19 Agustus 2008	Penempatan pasukan perdamaian Rusia di wilayah konflik. <sup>269</sup>	Rusia akan menempatkan pasukan penjaga perdamaian di wilayah <i>buffer zone</i> perbatasan Georgia dan Ossetia Selatan
24.	19 Agustus 2008	Pembekuan hubungan NATO-Rusia <sup>270</sup>	NATO menyatakan tidak dapat melakukan hubungan dengan Rusia secara baik. <i>North Atlantic Council</i> (NAC) menyatakan kekhawatirannya terhadap integritas wilayah Georgia.
25.	20 Agustus 2008	Teguran UE dan AS kepada Rusia <sup>271</sup>	UE dan AS melakukan teguran terhadap Rusia karena tidak sepenuhnya melakukan kesepakatan damai yang ditandatangani pada tanggal 16 Agustus 2008. Mereka mendesak Rusia untuk menarik mundur seluruh pasukannya di wilayah Georgia.
26.	21 Agustus 2008	Pembekuan kerja sama militer NATO-Rusia <sup>272</sup>	
27.	21 Agustus 2008	Permintaan pengakuan kemerdekaan Abkhazia kepada Rusia <sup>273</sup>	Terjadi demonstrasi di Abkhazia yang menuntut pengakuan kemerdekaan Abkhazia oleh Rusia.
28.	22 Agustus 2008	Rusia berjanji untuk menarik mundur seluruh pasukan penjaga perdamaian yang berada di wilayah Georgia. <sup>274</sup>	

<sup>269</sup> *Ibid.*

<sup>270</sup> *Ibid.*

<sup>271</sup> *Ibid.*

<sup>272</sup> Day-by-Day: Georgia-Russia Conflict, <http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/7577122.stm>

<sup>273</sup> *Ibid.*

<sup>274</sup> *Ibid.*

29.	26 Agustus 2008	Pengakuan Rusia terhadap kemerdekaan Abkhazia dan Ossetia Selatan. <sup>275</sup>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Presiden Medvedev secara resmi mengakui kemerdekaan Abkhazia dan Ossetia Selatan.</li> <li>• Presiden Medvedev juga menuduh Saakashvili telah melakukan pembantaian etnis di Ossetia Selatan</li> </ul>
-----	-----------------	---	--

Dari tabel kronologis kejadian perang Georgia dengan Rusia pada bulan Agustus 2008, terlihat bahwa Georgia terbukti terlebih dahulu melakukan serangan ke wilayah Ossetia Selatan dan membunuh pasukan penjaga perdamaian Rusia. Hal ini adalah sebagai penyebab utama Rusia melakukan serangan ke wilayah Ossetia Selatan, bahkan hingga mencapai ibukota Georgia. Rusia sebelumnya telah mengancam akan melakukan penyerangan apabila Georgia terus memprovokasi Rusia, namun Georgia tidak menghiraukan ancaman tersebut karena terlalu percaya diri akan mendapatkan bantuan Barat. Konflik yang terjadi pada bulan Agustus ini setidaknya mengakibatkan 2000 orang tewas, serta ribuan orang lainnya terluka dan mengungsi.

Konflik ini langsung mendapatkan perhatian internasional dengan desakan dari berbagai negara untuk segera menyelesaikan konflik secara damai. Uni Eropa melalui Presiden Perancis langsung menemui Presiden Rusia untuk membicarakan langkah-langkah penyelesaian konflik Georgia dengan Rusia secara damai. Georgia dan Rusia menyetujui gencatan senjata dan menarik mundur seluruh pasukannya dari wilayah konflik. NATO yang mengecam aksi penyerangan Rusia tersebut melakukan pembekuan kerja sama militer. Rusia tidak terlalu menghiraukan aksi yang dilakukan NATO tersebut dan justru memberikan dukungan dan pengakuan terhadap kemerdekaan Ossetia Selatan pada tanggal 26 Agustus 2008.

<sup>275</sup> <http://document.kremlin.ru/doc.asp?ID=47560>

## BAB IV

### KESIMPULAN

Presiden Georgia Mikhail Saakashvili yang pro terhadap Barat tentu akan berusaha mendekatkan negaranya dengan Barat, antara lain dengan berusaha bergabung menjadi anggota NATO ataupun Uni Eropa. Tujuan Mikhail Saakashvili tersebut tentu tidak dapat tercapai dengan mudah, karena Rusia akan menentang keanggotaan negara-negara bekas Uni Soviet ke dalam organisasi regional Barat, baik NATO maupun Uni Eropa. Terlebih dengan bangkitnya Rusia, tentu pihak Barat juga akan melakukan mempertimbangan matang untuk dapat menerima Georgia ataupun negara bekas Uni Soviet sebagai anggota.

Konflik yang terjadi antara Georgia dan Rusia di Ossetia Selatan pada bulan Agustus 2008 terbukti merupakan aksi provokasi yang dilakukan oleh Georgia. Pemerintah Georgia terbukti telah terlebih dahulu menyerang pasukan perdamaian Rusia di Ossetia Selatan dan melakukan penyerangan terhadap kelompok separatis yang berada di Ossetia Selatan. Penyerangan tersebut tentu akan membuat Rusia melakukan perlindungan terhadap warganya, sehingga membuat Rusia masuk menyerang ke wilayah Ossetia Selatan, sesuai dengan konsep *responsibility to protect*.

Pertama, tujuan Georgia memprovokasi Rusia untuk menyerang ke wilayah Ossetia Selatan pada bulan Agustus 2008 adalah untuk mempercepat keanggotaannya pada NATO dan Uni Eropa, karena Georgia terbukti mendapatkan ancaman serius dari Rusia. Sesuai dengan kepentingan nasional Georgia, Georgia berusaha untuk menjaga integritas wilayahnya dengan mengambil alih wilayah yang dikuasai oleh kelompok separatis, namun harus dengan cara perundingan damai tanpa kekerasan. Penggunaan kekerasan oleh Georgia dalam menyelesaikan masalah di dalam negerinya sudah merupakan pelanggaran terhadap kebijakannya sendiri.

Kedua, Hubungan dekat Georgia dengan Amerika Serikat membuat Georgia terlalu percaya diri untuk melakukan provokasi terhadap Rusia. Dengan bantuan pelatihan militer dari Amerika Serikat melalui program *Georgia Train and Equip Program* dan peralatan mutakhir yang dimiliki, Georgia merasa dapat mengulur waktu agar mendapatkan bantuan dari negara lain. Walaupun pada akhirnya tidak mendapatkan bantuan, namun sebelum terjadinya perang Georgia sudah mendapatkan bantuan peralatan militer dari Amerika Serikat.

Dengan memprovokasi Rusia untuk menyerang masuk ke wilayah Ossetia Selatan tentu Georgia sudah memperkirakan kemungkinan lepasnya wilayah tersebut. Namun dengan lepasnya wilayah Ossetia Selatan, Georgia diharapkan mendapatkan keuntungan yang lebih besar, yaitu keanggotaan NATO. Ossetia Selatan yang saat ini sudah terlepas dari Georgia menjadi *buffer zone* antara Rusia dan Georgia. Dengan adanya *buffer zone* antara Georgia dan Rusia tersebut, diharapkan Rusia merubah sikapnya dalam proses keanggotaan Georgia pada NATO.

Perhitungan Georgia sejak awal untuk memprovokasi Rusia menyerang ke wilayahnya, sehingga akan mendapatkan bantuan NATO tentu tidak masuk akal. NATO memang berkepentingan untuk melakukan perluasan ke wilayah Timur, namun untuk berkorban untuk membantu Georgia menghadapi serangan Rusia tentu sama saja dengan NATO melawan Rusia. Hal ini dapat memperburuk hubungan NATO dengan Rusia serta dapat menimbulkan perang dingin baru. Pada saat yang bersamaan, NATO juga sedang menjalankan misinya di Irak, sehingga untuk melakukan 2 misi di saat yang bersamaan dinilai cukup berat, baik dari sisi finansial maupun personel.

Rencana perluasan NATO dan Uni Eropa ke wilayah timur merupakan suatu hal yang diinginkan oleh Georgia. Hubungan bilateral yang cukup erat antara Georgia dan Amerika Serikat diharapkan dapat merealisasikan rencana Georgia untuk bergabung dengan NATO. Sebelumnya, pada tahun 1999 dan tahun 2004 NATO telah berhasil melakukan perluasan negara anggota ke Timur, negara-negara eks Pakta Warsawa serta tiga negara Baltik bekas Uni Soviet. Walaupun negara-negara tersebut tidak berbatasan langsung dengan Rusia, namun

perluasan NATO tersebut sudah mengancam keamanan Rusia, sehingga rencana perluasan ke Ukraina dan Georgia tentu akan digagalkan dengan cara apapun. Terlebih lagi, kedua negara tersebut berbatasan langsung dengan Rusia.

Rakyat Georgia pada akhirnya menentang aksi Pemerintah. Mereka tidak menginginkan terus terjadinya konflik dengan Rusia mengenai masalah di wilayah Ossetia Selatan. Hal ini terlihat dari demonstrasi yang dilakukan terhadap Presiden Mikhail Saakashvili untuk segera mundur dari jabatannya setelah terjadinya konflik di Ossetia Selatan. Mereka menyadari bahwa pertimbangan Georgia untuk mendapatkan simpati masyarakat internasional serta merealisasikan keanggotaannya pada NATO dengan menyerang Ossetia Selatan jauh dari perkiraan.



## DAFTAR PUSTAKA

### Sumber Buku

- Britannica Encyclopedia 2009
- Brown, Chris & Kirsten Ainley, *Understanding International Relations* (3rd ed.), London: Palgrave MacMillan, 2005.
- Carpenter, Ted Galen & Barbara Conry (eds.). *NATO Enlargement: Illusions and Reality*. Washington, DC: The Cato Institute, 1998
- Cornell, Svante E. *Small Nations and Great Powers: A Study of Ethnopolitical Conflict in the Caucasus*. London: Routledge, 2001
- Cowen, Regina. *Central and Eastern Europe: The Challenge of Transition*. London: Oxford University Press, 1994.
- Diamond, Larry & Marc F. Plattner (ed.), *Nasionalisme, Konflik Etnis dan Demokrasi* (Terj). Bandung: Penerbit ITB, 1998.
- Donaldson & Noguee, *The Foreign Policy of Russia*, 3<sup>rd</sup> edition. New York: M E Sharpe Inc, 2005
- Fachrurozi, A. *Rusia Baru Menuju Demokrasi*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2005.
- Gottschalk, Luis. *Mengerti Sejarah*. Terj. Nugroho Notosusanto, Jakarta: UI-Press, 1975
- Hansen, Birthe (ed.) & Heurlin, Bertel (ed.). *The Baltic States in World Politic*. New York: Palgrave Macmillan, 1998.
- Harris, R. & Jerry Harris. *The Nation in the Global Era: Conflict and Transformation*. Brill, 2009
- Holsti, K.J. *International Politics: A Framework for Analysis* (7th ed.). New Jersey: Prentice-Hall, 1995
- Jervis, Robert. *Perception and Misperception in International Politics Princeton*. New Jersey: Princeton University Press, 1976.
- Kuntowijoyo. *Pengantar Ilmu Sejarah*. Yogyakarta: PT. Bentang Pusaka, 1995
- Lippmann, Walter. *The Good Society*. New Jersey: Transaction Publishers, 2004
- Lucas, Edward. *The New Cold War: Putin's Russia and the Threat to the West*, 2<sup>nd</sup> Edition. New York: Palgrave Macmillan, 2009.

- Nygren, Bertil. *The Rebuilding Greater Russia: Putin's Foreign Policy Toward the CIS Countries*. London: Routledge, 2008
- Mankoff, Jeffrey. *Russian Foreign Policy: The Return of Great Power Politics*. Maryland: Rowman & Littlefield Publishers, 2009.
- Nygren, Bertil. *The Rebuilding Greater Russia: Putin's Foreign Policy Toward the CIS Countries*. London: Routledge, 2008.
- Papp, Daniel S. *Contemporary International Relations: Frameworks for Understanding* (5th ed.). Boston: Allyn & Bacon, 1997
- Rice, Condoleezza. *No Higher Honor: A Memoir of My Years in Washington*. New York: Crown Publisher, 2011.
- Romm, Joseph R. *Defining National Security*, diunduh dari <http://books.google.co.in/books?id=shxDOnuVcyYC> (5 Januari 2012)
- Rosenau, James N. *The Study of World Politics (Vol. 1: Theoretical and Methodological Challenges)*, London: Routledge, 2006
- Sakwa, Richard. *Russian Politics and Society*, 4<sup>th</sup> Edition. London: Routledge, 2008
- Saragih, Simon. *Bangkitnya Rusia, Peran Putin dan Eks KGB*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2008.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (ed. 3), Jakarta: Balai Pustaka, 2005.
- Waltz, Kenneth. *Man, The State, and War*. New York: Columbia University Press, 2001.
- Majalah The Economist. *Cold Comfort*. 7-13 September 2008
- Majalah The Economist. *Russia Resurgent*. 14-20 September 2008

### **Sumber Transkripsi Wawancara**

- Kremlin, Совместная пресс-конференция по итогам переговоров с Федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель, <http://news.kremlin.ru/transcripts/1102>. (25 Juli 2011)
- Kremlin, Интервью телекомпании «Раша тудей», <http://news.kremlin.ru/transcripts/1226>. (20 Januari 2011)



- Medvedev, Dmitry. *Meeting with Servicemen who Distinguished Themselves in Battle in the Georgian-South Ossetian Conflict Zone*,  
[http://eng.kremlin.ru/text/speeches/2008/08/18/2230\\_type82917type84779\\_205494.shtml](http://eng.kremlin.ru/text/speeches/2008/08/18/2230_type82917type84779_205494.shtml) . (25 Desember 2010)
- , Интервью телекомпания Би-Би-Си,  
<http://news.kremlin.ru/transcripts/1228>. (5 Mei 2011)
- , Пресс-конференция по итогам встречи с Президентом Франции Николя Саркози, <http://news.kremlin.ru/transcripts/1330>. (20 November 2010)
- Transkripsi wawancara PM Rusia, Vladimir Putin, dengan CNN, Sochi, 22 Agustus 2008.
- Transkripsi wawancara Presiden Rusia, Dmitri Medvedev dengan BBC Television, Sochi, August 26, 2008
- Transkripsi wawancara Presiden Rusia, Dmitri Medvedev with TF1 Television, Sochi, August 26, 2008
- Transkripsi Konferensi Press Menlu Rusia, Sergey Lavrov, pada Pertemuan Black Sea Economic Cooperation Organization, Yerevan, 16 April 2009.
- Akim Salbiev, Film Dokumenter August Tskhinval, 2008

### Sumber Internet

- “Australia calls for ceasefire in Georgia”,  
<http://news.smh.com.au/national/australia-calls-for-ceasefire-in-georgia-20080810-3suq.html> (31 Desember 2011)
- “Azerbaijani Foreign Ministry: ‘Georgia's actions comply with international law’”, <http://today.az/news/politics/46850.html> (2 Januari 2012).
- “Day-by-day: Georgia-Russia crisis”, <http://news.bbc.co.uk/2/hi/7551576.stm> (2 Januari 2012)
- “Death toll from North Ossetia suicide bomb rises to 12”,  
<http://www.cnn.com/2008/WORLD/europe/11/07/north.ossetia.suicide.bomb/index.html?iref=allsearchwww.bbc.com> (4 November 2010)
- “Declaration of Presidents of Parliaments of the Baltic States”,  
<http://www.riigikogu.ee/index.php?id=50815> (31 Desember 2011)

- “Donors pledge \$4.5bn to Georgia”,  
<http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/7683413.stm> (5 September 2010)
- “Ethnolinguistic Groups in The Caucasus Region”,  
<http://www.lib.utexas.edu/maps/commonwealth/ethnocaucasus.jpg> (3 September 2011)
- “Fogh støtter Georgien”,  
<http://www.dr.dk/Nyheder/Politik/2008/08/09/121043.htm?rss=true> (2 Januari 2012).
- “Foreign Ministry Spokesperson Qin Gang’s Remarks on the Conflicts in South Ossetia”, <http://www.fmprc.gov.cn/eng/xwfw/s2510/t464558.htm> (10 Januari 2012).
- “Georgia-South Ossetia: conflict chronology“,  
<http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/georgia/2522729/Georgia--South-Ossetia-conflict-chronology.html>. (2 Juni 2010)
- “Georgia declares 'state of war' over South Ossetia”,  
<http://www.guardian.co.uk/world/2008/aug/09/georgia.russia2> (2 Juni 2010)
- “Georgia Foreign Policy Strategy”, [http://embassy.mfa.gov.ge/files/Documents/Strategy2006\\_2009.pdf](http://embassy.mfa.gov.ge/files/Documents/Strategy2006_2009.pdf) (2 Juni 2011)
- “Global Security, *Georgia Train and Equip Programme (GTEP)*”,  
<http://www.globalsecurity.org/military/ops/gtep.htm> (3 Juni 2011)
- “Hostilities and loss of life in South Ossetia”,  
<http://www.beehive.govt.nz/release/hostilities-and-loss-life-south-ossetia>  
 (2 Juni 2010).
- “Human Rights Watch World Report 2002: Europe & Central Asia: Georgia”,  
<http://hrw.org/wr2k2/europe9.html> (2 Juni 2011)
- “Jeremić takes draft ICJ resolution to New York”,  
[http://www.b92.net/eng/news/politics-article.php?yyyy=2008&mm=08&dd=14&nav\\_id=52690](http://www.b92.net/eng/news/politics-article.php?yyyy=2008&mm=08&dd=14&nav_id=52690) (2 Juni 2011)
- “MFA statement on the situation in Georgia”,  
<http://www.mfa.gov.il/MFA/About+the+Ministry/MFA+Spokesman/2008/MFA+statement+on+the+situation+in+Georgia+10-Aug-2008.htm> (2 Juni 2011).

“Ministry of Foreign Affairs of Georgia”

[http://embassy.mfa.gov.ge/index.php?lang\\_id=ENG&sec\\_id=10](http://embassy.mfa.gov.ge/index.php?lang_id=ENG&sec_id=10) (10 Januari 2012)

“National Security Concept of Georgia”,

[http://embassy.mfa.gov.ge/files/Documents/National\\_Security\\_Concept\\_-\\_E.doc](http://embassy.mfa.gov.ge/files/Documents/National_Security_Concept_-_E.doc) (25 Desember 2011)

“Nato Handbook: The North Atlantic Cooperation Council”,

<http://www.nato.int/docu/handbook/2001/hb020201.htm> (1 Januari 2012)

“Plassnik demands Russian ceasefire”,

[http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/english\\_news/77291\\_Plassnik-demands-Russian-ceasefire.html](http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/english_news/77291_Plassnik-demands-Russian-ceasefire.html) (5 Januari 2012)

“Russia-Georgia tensions still high one year on from conflict”,

<http://www.cnn.com/2009/WORLD/europe/08/07/goergia.background/index.html?iref=allsearch>. (31 Desember 2010)

“Russia blamed for 'gas sabotage””,

<http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/4637034.stm> (31 Desember 2011)

"Russia vetoes U.N. mission in Georgia",

<http://www.cnn.com/2009/WORLD/europe/06/15/un.georgia/index.html?iref=allsearch>. (7 September 2010)

“Seven Questions: Georgia's Special Relationship”,

[http://www.foreignpolicy.com/articles/2009/01/08/seven\\_questions\\_georgias\\_special\\_relationship](http://www.foreignpolicy.com/articles/2009/01/08/seven_questions_georgias_special_relationship) (30 Desember 2011)

“Six Die in S.Ossetia Shootout”, <http://www.civil.ge/eng/article.php?id=18871> (12 januari 2012).

“Syria backs Russia's move in Georgia”, <http://edition.presstv.ir/detail/67216.html> (30 Desember 2011)

“The West Begins to Doubt Georgian Leader”,

<http://www.spiegel.de/international/world/0,1518,578273-2,00.html> (2 mei 2011)

“The World Fact Book: Georgia”, <https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/gg.html> (2 januari 2012)

“Thousands gather for street protests against Georgian president.”

<http://www.guardian.co.uk/world/2009/apr/09/georgia-protests-mikheil-saakashvili> (2 juni 2011)

“Timeline: Georgia”,

[http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/country\\_profiles/1102575.stm](http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/country_profiles/1102575.stm) (2 Juni 2011)

“UN GA president labels Georgia as aggressor, slams U.S.”,

<http://www.panarmenian.net/eng/world/news/26966/> (8 Juli 2011)

“U.S. Announces New Military Assistance Program for Georgia”,

<http://www.civil.ge/eng/article.php?id=8271> (17 Agustus 2011)

United Nations General Assembly. 15 September 2005.

<http://www.who.int/hiv/universalaccess2010/worldsummit.pdf> (17 Agustus 2011)

“UN GA President labels Georgia as aggressor, slams U.S.”,

<http://www.panarmenian.net/eng/world/news/26966/> (17 Agustus 2011)

“Саудовская Аравия с пониманием отнеслась к действиям России в Южной Осетии”, [http://www.gazeta.ru/news/lenta/2008/09/04/n\\_1266558.shtml](http://www.gazeta.ru/news/lenta/2008/09/04/n_1266558.shtml) (31 Desember 2011).

“Станом на 22 серпня ц.р. 5 літаками МНС України до Грузії доставлено 156 тон різних гуманітарних вантажів загальною вартістю близько 8 млн. доларів США”,

<http://www.mfa.gov.ua/mfa/ua/publication/content/19588.htm> (31 Desember 2011)

CBSNEWS,

[http://www.cbsnews.com/elements/2008/08/12/in\\_depth\\_world/timeline4342593.shtml](http://www.cbsnews.com/elements/2008/08/12/in_depth_world/timeline4342593.shtml) (5 Mei 2011)

Friedman, George. “The Medvedev Doctrine and American Strategy” dalam *Stratfor Geopolitical Intelligence Report*, 2 September 2008,

[http://www.stratfor.com/weekly/medvedev\\_doctrine\\_and\\_american\\_strategy](http://www.stratfor.com/weekly/medvedev_doctrine_and_american_strategy) (25 Desember 2011)

Reynolds, Paul. “New Russian world order: the five principle”,

<http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/7591610.stm>. (3 Mei 2011)

- Russian Ministry of Foreign Affairs, “Kontseptsiya Vneshnei Politiki Rossiskoi Federatsii,” 2000, <http://lm.mid.ru/ns-osndoc.nfs/> (5 Januari 2012)
- McGuinness, Damien. *Georgia: Anti-Saakashvili protesters vow to continue*, <http://www.bbc.co.uk/news/world-europe-13499227> (14 Februari 2011)
- Traynor, Ian. *Georgian president Mikheil Saakashvili blamed for starting Russian war*, <http://www.guardian.co.uk/world/2009/sep/30/georgia-attacks-unjustifiable-eu> . (5 Mei 2011)
- <http://www.un.org/Depts/Cartographic/map/profile/georgia.pdf> (peta wilayah Georgia)

### Sumber Jurnal

- Allison, Roy. “Russia Resurgent? Moscow’s Campaign to coerce Georgia to Peace” dalam *International Affairs* 84:6 (2008): 1145-1171.
- Baranovsky, Vladimir. “Russia: A Part of Europe or Apart from Europe?” dalam *International Affairs* 76: 3 (July 2000): 443-444.
- Buszynski, Leszek. *Russia's New Role in Central Asia* dalam *Asian Survey*, Vol. 45, No. 4 (Jul. - Aug., 2005), pp. 546-565
- Cornell, Svante E. “Georgia After the Rose Revolution: Geopolitical Predicament and Implications for U.S. Policy” dalam *The Strategic Studies Institute*, February 2007
- Cornell, Svante E. *Autonomy and Conflict: Ethnoterritoriality and Separatism in the South Caucasus – Cases in Georgia*. Uppsala University, Swedia, 2002.
- Eisenhower, Susan. “The Perils of Victory”, dalam Carpenter, Ted Galen & Barbara Conry (eds.), *NATO Enlargement: Illusions and Reality*, Washington, DC: The Cato Institute, 1998
- Erangler, Stephen. “Yeltsin Voices Russia’s Anger at Ethnic Wars Roiling the Old Soviet Empire” dalam *New York Times*, 22 Juni 1992
- Garb, Paula. “The View from Abkhazia of South Ossetia Ablaze” dalam *Central Asian Survey*, Vol. 28 No. 2, June 2009: 235-246.
- Hendrickson, Gordon. “The Future of NATO-Russia Relations” dalam *The Atlantic Council of the United States Occasional Paper*, 2005.

- International Crisis Group. *Georgia: Avoiding War in South Ossetia* (Europe Report No 159). Tbilisi/Brussels: ICG 26 November 2004
- International Crisis Group. *Georgia: Sliding toward Authoritarianism?* (Europe Report No. 189). Tbilisi/Brussels: ICG. 19 Desember 2007
- International Crisis Group. *Learn To Live like Neighbours* (Europe Briefing No. 65), Tbilisi/Brussels/Istanbul/Moscow, 8 August 2011.
- . *Georgia: Sliding Towards Authoritarianism* (Europe Report No 189). Tbilisi/Brussels: ICG 19 December 2007
- . *Russia vs Georgia: The Fall Out* (Europe Report No 195). Tbilisi/Brussels: ICG 22 August 2008
- Lieven, Anatol. *The Secret Policemen's Ball: the United States, Russia and the international order after 11 September* *International Affairs* (Royal Institute of International Affairs 1944-), Vol. 78, No. 2 (Apr., 2002), pp. 245-259
- Martin Malek, *Georgia & Russia: The "Unknown" Prelude To The "Five Day War"*. 2009
- Rahman, M. Sajjadur. *Georgia and Russia: What Caused the August War*, dalam "Identity, Culture and Politics: An Afro-Asian Dialogue." Juli 2009
- Sakwa, Richard. "New Cold War or Twenty Years Crisis? Russia and International Politics" dalam *International Affairs* 84:4 (2008): 241-267
- Schröder, Hans-Henning (ed.). "The Caucasus Crisis: International Perceptions and Policy Implications for Germany and Europe" dalam *SWP-Berlin Research Paper* No. 9, November 2008.
- Shetsova, Lilia. *After the battle: What the August Conflict Will Mean for Russia's Domestic Politics*. Chatham House briefing note REP BN 08/02, September 2008.
- Trenin, Dmitri. "Russia Leaves the West" dalam *Foreign Affairs*, Vol. 85, No. 4 (Jul. - Aug., 2006), pp. 87-96
- Thomas, Timothy L. "The Bear Went Through the Mountain: Russia Appraises its Five-Day War in South Ossetia" dalam *Journal of Slavic Military Studies*, (2009) 22:31-67